



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan Laporan Keuangan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyajikan informasi serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan informasi mengenai apakah pendapatan periode berjalan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah dianggarkan.

2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.



- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 7) Laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

2. Jenis Laporan Keuangan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka di dalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Kota Magelang. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Magelang dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Surplus/ defisit

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar.

Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang Pajak dan bukan pajak
- 3) Persediaan
- 4) Aset Tetap
- 5) Ekuitas Dana

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.



d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit LPE pada periode bersangkutan, koreksi- koreksi yang berlangsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara Komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; dan
- 5) Lain-lain;
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi

3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;



- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2018;
- s. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018;
- t. Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- u. Surat Edaran Walikota Magelang Nomor 900/822/440 Tanggal 7 Desember 2018 perihal Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - a. Maksud penyusunan laporan keuangan
 - b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Jenis Laporan Keuangan
3. Landasan Hukum

Bab II Gambaran Umum Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Gambaran Umum Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Kebijakan Pendapatan Daerah



4. Kebijakan Belanja Daerah
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. Perkembangan Realisasi Pendapatan
3. Perkembangan Realisasi Belanja
4. Perkembangan Realisasi Pembiayaan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

1. Sistematisasi Kebijakan Akuntansi
2. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
3. Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5. Penerapan Kebijakan Akuntansi
 - a. Penyusutan
 - b. Akuntansi Pendapatan
 - c. Akuntansi Beban dan Belanja
 - d. Akuntansi Pembiayaan
 - e. Akuntansi Aset
 - f. Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

1. Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan LRA
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
 - e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
2. Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
3. Penjelasan Pos-Pos Akun Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas



4. Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Operasional (LO)
 - a. Pendapatan LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Perubahan Ekuitas
 - e. Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

1. Susunan Perangkat Daerah
2. Penghapusan Piutang
3. Penyelesaian Pembayaran Klaim PT Asuransi Jiwa Bakrie

Bab VII Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pemerintah daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun setiap tahun sebagai representasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui penetapan Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018.

Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2018 tersebut, ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1. Gambaran Umum Ekonomi Makro

Berdasarkan dinamika nasional dan regional, kondisi perekonomian Kota Magelang pada tahun 2018 masih akan menghadapi tantangan antara lain sebagai berikut :

1. Menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan khususnya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor basis dan optimasi lapangan usaha potensial ekspor.
2. Meningkatkan daya saing lokal dalam menghadapi kompetisi bebas dalam segala bidang khususnya dalam meningkatkan sektor ekonomi makro.
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan dan meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses pada infrastruktur dasar.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik.
6. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta penjangkaran riset novatif untuk meningkatkan daya saing Kota Magelang.
7. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan.
8. Meningkatkan program pro-poor dan pemerataan pembangunan untuk memperkecil kesenjangan dalam menekan kemiskinan.
9. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.
10. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan



pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan variasi infrastruktur yang berkualitas.

11. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Magelang.
12. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Magelang sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
13. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
14. Mengelola inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

Berdasarkan tantangan perekonomian yang masih dihadapi Pemerintah Kota Magelang, kondisi historis dan penetapan statistik indikator makro yang telah diprediksi sebelumnya, maka prospek perekonomian Kota Magelang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi tumbuh sekitar 4,8%-5,3%.
- b. Inflasi diperkirakan pada kisaran angka 3,15%-4,73% kecenderungan menurun.
- c. Laju pertumbuhan penduduk diprediksi terkendali pada angka 0,39%.
- d. PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan mencapai Rp 8,374 triliun tumbuh 8,72% (deviasi $\pm 0,68\%$).
- e. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar Rp. 5,721 juta per bulan (d disesuaikan dengan asumsi prediksi pertumbuhan PDRB).

Adapun gambaran umum ekonomi Kota Magelang Tahun 2017 berdasarkan prospek dan prediksi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

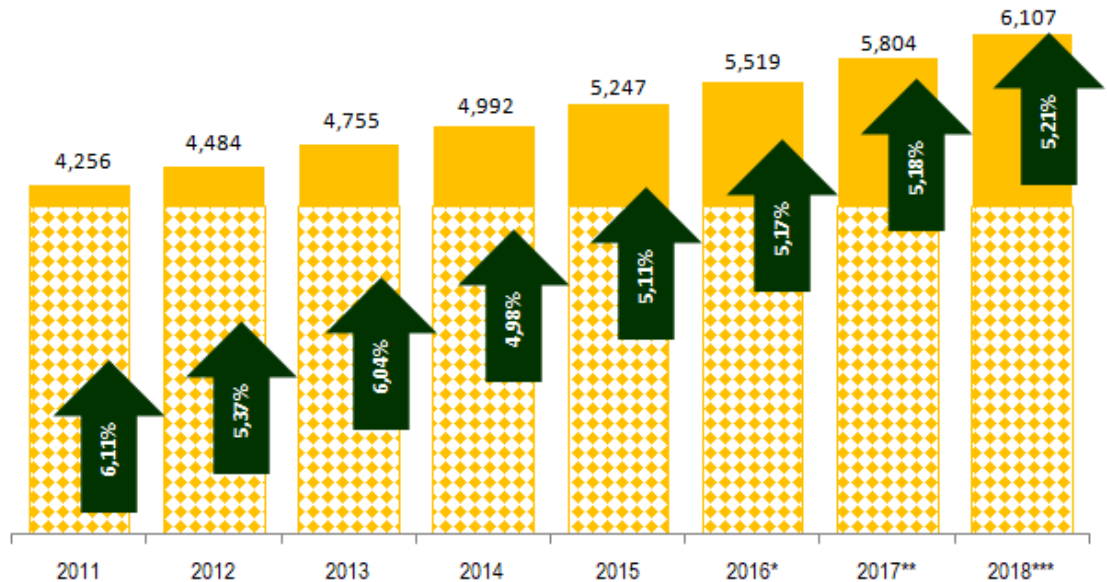
a. Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Pada tahun 2017 Kota Magelang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,18% setelah di tahun sebelumnya mencapai 5,17%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,07%).

Berdasar tahun dasar 2010, secara riil PDRB Kota Magelang tahun 2017 mencapai 5,804 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi level sektoral tertinggi dialami oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (9,60%), Jasa Lainnya (8,83%) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,25%).

Stabilnya perkembangan harga, akselerasi laju produktivitas di berbagai sektor ekonomi dan kondusifnya iklim investasi sepanjang tahun 2018 memberikan hasil prediksi yang cukup optimis bagi perekonomian Kota Magelang. Sampai dengan

akhir tahun 2018, diprediksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mampu mencapai angka 5,21% (deviasi 0,52%). Gambaran dari tahun-ke tahun sebagai berikut:



Gambar 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam Triliun Rp) dan Pertumbuhan Ekonomi (dalam %) di Kota Magelang, 2011-2017 dan Prediksi Tahun 2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi $\pm 0,52\%$)

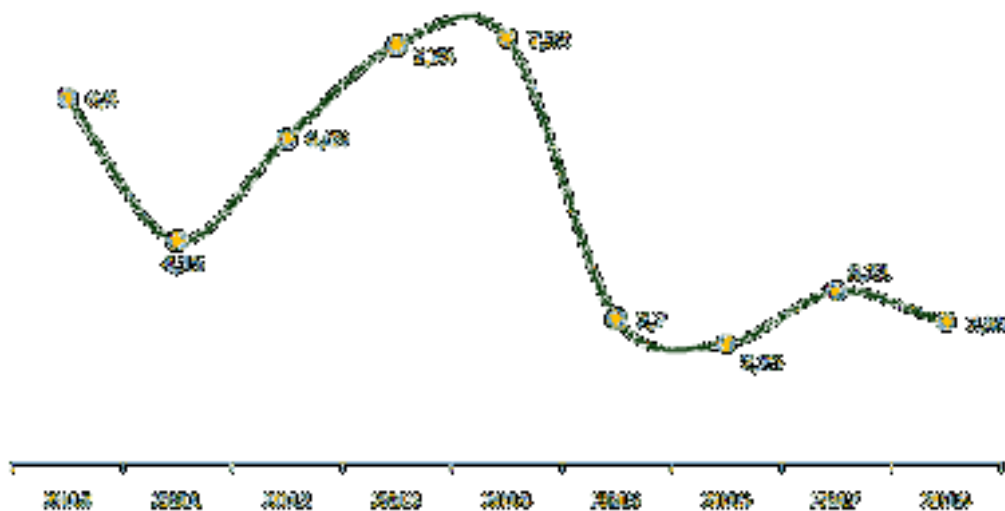
b. Inflasi

Kota Magelang memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang secara rutin menerapkan protokol pengendalian harga dengan baik, sehingga sepanjang tahun 2018 tidak ditemukan gejolak harga yang berarti pada seluruh komoditas pengeluaran. Beberapa program dan kegiatan TPID Kota Magelang di tahun 2018 antara lain adalah:

- 1) Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan.
- 2) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan.
- 3) Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan.
- 4) Program pengembangan budidaya perikanan.
- 5) Program peningkatan produksi hasil peternakan.
- 6) Pemanfaatan Toko Tani Indonesia (TTI).
- 7) Sampai dengan saat ini di Kota Magelang terdapat delapan TTI. TTI menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan/atau Bulog.
- 8) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- 9) Pengembangan sistem informasi pasar dengan melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di tiga pasar tradisional (Kebonpolo, Cacaban dan

- Rejowinangun), toko/warung yang menyediakan bahan pangan di 17 kelurahan dan sembilan pedagang grosir pangan di luar pasar.
- 10) Publikasi perkembangan harga melalui aplikasi Sihati (Sistem Informasi Harga dan Komoditi Jawa Tengah), Magelang FM dan sistem DataGO
 - 11) Melaksanakan kegiatan panel harga pangan.
 - 12) Program peningkatan efisiensi perdagangan melalui kegiatan peningkatan sistem kerja, jaringan informasi perdagangan, pengembangan pasar dan distribusi produk sehingga tersedia informasi perusahaan yang akurat dan meningkatnya pangsa pasar produk-produk UMKM.

Adapun Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2018 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir Desember 2018 inflasi yang terjadi sebesar 0,36% (2,65% year on year) seiring dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 2,82%) dan nasional (yoy 3,13%). Akhir Desember 2018 terdapat kenaikan IHK sehingga mencapai 132,48. Inflasi terjadi karena peningkatan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 1,18%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,35%, kelompok sandang sebesar 0,29%, kelompok kesehatan sebesar 0,28%, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,14%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,01% (BPS, 2019). Di tahun 2018 deflasi terjadi pada bulan April (0,05%), Agustus (0,21%) dan September (0,06%). Sementara itu inflasi tertinggi terjadi di bulan Juni yang sebagian besar disebabkan karena hari raya. Meski demikian inflasi di bulan Juni tersebut tetap terkendali dan hanya mencapai 0,73%.

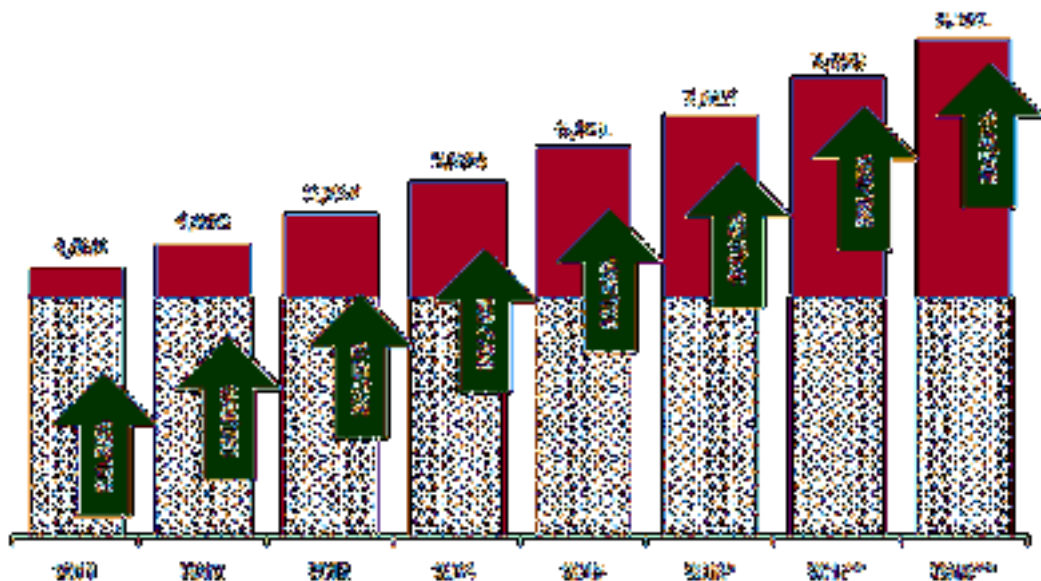


Gambar 2.2. Perkembangan Inflasi Year on Year Kota Magelang, 2010-2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019

c. PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Perekonomian makro Kota Magelang di tahun 2017 tumbuh 8,88% (atas dasar harga berlaku), lebih cepat dari tahun 2016 yang tumbuh 8,25%. Besarnya nominal nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh di tahun 2017 mencapai 7,639 triliun Rupiah, berkembang hampir 1,9 kali lipat dibandingkan kondisi ekonomi di tahun dasar 2010. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (14,47%), Pengadaan Listrik dan Gas (13,0%) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (12,65%). Meski merupakan sektor andalan di Kota Magelang, namun lapangan usaha Industri Pengolahan masih memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum di tahun 2017. Di sisi lain, meski tumbuh lambat namun beberapa lapangan usaha seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta lapangan usaha Jasa Pendidikan memiliki prospek yang sangat baik untuk dapat terus dioptimalkan perannya dalam tahun-tahun mendatang, mengingat lapangan usaha ini merupakan sektor ekonomi penunjang utama bagi pariwisata dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.3. PDRB (dalam Triliun Rp) dan Indeks Perkembangan PDRB (dalam %) di Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2017 dan Prediksi Tahun 2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi $\pm 0,71\%$)



Kinerja perekonomian makro skala kota untuk tahun 2018 secara resmi belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian diprediksi kondisi ekonomi makro Kota Magelang di tahun 2018 akan terus mengalami pertumbuhan positif dengan perolehan PDRB diprediksi mencapai 8,281 triliun rupiah (deviasi 0,71%). Di tahun 2018 diprediksi tidak ada pergeseran peran lapangan usaha yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kota Magelang dengan prediksi seluruh lapangan usaha memiliki pertumbuhan positif. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017 dan Prediksi Tahun 2018

Lapangan Usaha	2016*	2017**	2018***
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135.991,13	142.383,19	149.480,88
Industri Pengolahan	1.128.331,29	1.215.266,29	1.308.449,79
Pengadaan Listrik dan Gas	20.361,13	23.009,03	24.446,82
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.979,24	9.571,97	10.274,19
Konstruksi	1.163.178,22	1.253.077,36	1.348.125,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.288,45	1.098.483,10	1.182.961,31
Transportasi dan Pergudangan	471.954,33	531.675,42	588.818,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	422.789,76	464.170,03	517.523,73
Informasi dan Komunikasi	334.082,07	382.437,14	417.950,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	366.184,95	398.625,19	442.577,97
Real Estate	224.952,98	241.977,59	264.152,22
Jasa Perusahaan	24.810,72	27.548,28	30.963,53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842.640,29	890.831,67	966.765,32
Jasa Pendidikan	529.008,56	587.146,02	619.448,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.466,24	216.839,28	236.721,71
Jasa lainnya	140.360,73	155.562,97	172.324,25
PDRB	7.015.380,09	7.638.604,53	8.280.985,31

Sumber: BPS Kota Magelang, Prediksi oleh Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

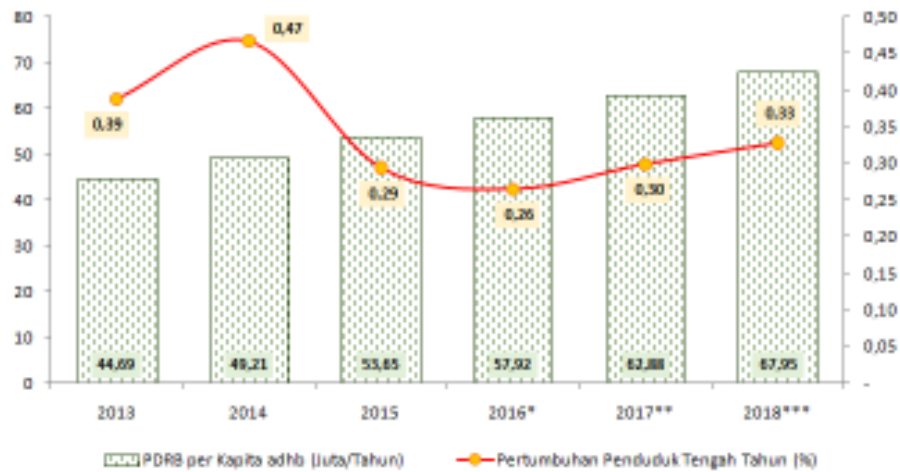
** Tahun Dasar 2010 (tahun 2013 angka sementara, tahun 2014 angka sangat sementara)

*** Metode Baru

na : data belum terpublikasi

d. PDRB per Kapita

Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.474 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 5,24 juta/bulan (atas dasar harga berlaku). Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Di tahun 2018, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada level 5,21% dan prediksi total penduduk tengah tahun sebesar 121.872 jiwa, maka PDRB per kapita Kota Magelang (atas dasar harga berlaku) diprediksi mampu tumbuh 8,06%.



Gambar 2.4. PDRB per Kapita (adhb) dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tengah Tahun Kota Magelang, 2013-2017 dan Prediksi 2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi $\pm 0,71\%$)

Tabel 2.2. PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2016-2017 dan Prediksi Tahun 2018

Uraian	2016*	2017**	2018***
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	7.015.380,09*	7.638.607,53**	8.280.985,32 ***
PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	5.518.684,55*	5.804.311,98**	6.106.575,37***
Proyeksi penduduk tengah tahun (jiwa)	121.112,00	121.474,00	121.872,00
Proyeksi penduduk akhir tahun (jiwa)	121.293,00	121.673,00	121.992,00
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp/kapita/tahun)	57,92*	62,88**	67,95***

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi adhb $\pm 0,71\%$; deviasi adhk $\pm 0,52\%$)

2. Kebijakan Keuangan Daerah

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2018, kebijakan anggaran dalam tahun 2018 di Kota Magelang diarahkan untuk:

1. Melakukan Sinkronisasi program kegiatan dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Magelang,
2. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya (diutamakan urusan wajib dan urusan pilihan),
3. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah,
4. Menyelenggaraan urusan pemerintahan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang



diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan,

5. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termajinalkan) yang bersumber dari APBD maupun kemitraan. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan per Kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain:
 - a. Meningkatkan SDM Kota Magelang dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk.
 - b. Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - c. Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk.
6. Tetap melaksanakan dan melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal guna mendukung *program* Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Implementasi Masterplan *Smart City, Sustainable Development Goals*.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Pengggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip : realistis dan elastis (artinya dapat / mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat) serta adil dan merata secara vertical dan horisontal (vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak).
2. Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
3. Melakukan Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
4. Menerapkan konsep ear marking untuk pendapatan dimana pajak dan retribusi daerah dikembalikan lagi kepada wajib pajak melalui pembangunan infrastruktur pendukung pajak dan retribusi daerah.



5. Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
6. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerja pemungut dan pengelola pajak dan retribusi daerah) sehingga akan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak serta meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak.
8. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik / wajib pajak.
9. Meningkatkan pengawasan. Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan pendampingan pengisian SPTPD, melakukan pemeriksaan secara insidental / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
10. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
11. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Adapun perbandingan anggaran pendapatan tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perbandingan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2018

No	URAIAN	ANGGARAN 2017	ANGGARAN 2018
1	Pendapatan Asli Daerah	218.085.185.000,00	225.916.332.000,00
	a. Pajak Daerah	29.821.800.000,00	30.646.800.000,00
	b. Retribusi Daerah	5.422.657.000,00	4.909.300.000,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.710.904.000,00	8.693.811.000,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.129.824.000,00	181.666.421.000,00
2	Pendapatan Transfer	685.575.423.000,00	658.491.405.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	576.667.228.000,00	583.609.549.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak	30.920.025.000,00	28.944.144.000,00
	a. Bagi Hasil Bukan Pajak	2.143.527.000,00	1.377.798.000,00
	b. Dana Alokasi Umum	440.041.244.000,00	440.041.244.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus	103.562.432.000,00	113.246.363.000,00



No	URAIAN	ANGGARAN 2017	ANGGARAN 2018
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	47.039.466.000,00	18.250.000.000,00
	a. Dana Penyesuaian	47.039.466.000,00	18.250.000.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	51.494.329.000,00	52.555.256.000,00
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	51.494.329.000,00	52.555.256.000,00
	Bantuan Keuangan	10.374.400.000,00	4.076.600.000,00
	a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	10.374.400.000,00	4.076.600.000,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.985.271.000,00	18.268.200.000,00
	a. Pendapatan Hibah	23.985.271.000,00	18.268.200.000,00
	PENDAPATAN DAERAH	927.645.879.000,00	902.675.937.000,00

i. Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang tahun 2018 masih tetap diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas.

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja.

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

4. Optimalisasi Belanja Langsung.

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel.

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.



Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang secara umum seperti yang disebutkan di atas, pada tahun 2017 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Memenuhi pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah sesuai amanat PP 48 tahun 2008 dan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10%.
3. Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perhitungan gaji untuk tiap tahunnya ditambah akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai.
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib dan urusan pilihan terlebih dahulu.
5. Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diutamakan untuk memenuhi/mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan fasilitas umum pemukiman.
6. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun.
7. Melaksanakan kegiatan yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Magelang dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. yaitu program kegiatan yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan E-Government secara Komprehensif dan Integral: Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals.

Perbandingan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dapat dilihat berikut ini:



Tabel. 2.4. Perbandingan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2017 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2017	Anggaran 2018
5	BELANJA	1.075.623.121.000,00	1.066.383.927.000,00
5.1	Belanja Operasi	780.902.222.000,00	778.542.161.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai	398.105.223.000,00	369.547.967.000,00
5.1.2	Belanja Barang	366.357.847.000,00	389.616.770.000,00
5.1.3	Belanja Hibah	9.997.833.000,00	10.886.043.000,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.880.616.000,00	7.830.678.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00	660.703.000,00
52.2	Belanja Modal	271.948.238.000,00	281.978.826.000,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	20.596.805.000,00	23.868.391.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.122.901.000,00	56.133.385.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	97.999.900.000,00	120.743.116.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	58.735.567.000,00	77.758.715.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.550.824.000,00	1.926.383.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	942.241.000,00	1.548.836.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	22.772.661.000,00	5.862.940.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	22.772.661.000,00	5.862.940.000,00

ii. **Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2018 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah.

Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2018 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

b) Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2018 diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal



diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 2.5. Perbandingan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017	ANGGARAN 2018
7	PEMBIAYAAN		
7.1	PENERIMAAN		
7.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	165.144.899.000,00	184.770.764.000,00
7.1.2	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	162.344.899.000,00	180.992.764.000,00
7.1.3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	2.800.000.000,00	3.778.000.000,00
	Jumlah	165.144.899.000,00	184.770.764.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.167.657.000,00	21.062.774.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	14.167.657.000,00	21.062.774.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	17.167.657.000,00	21.062.774.000,00
	Pembiayaan Netto	147.977.242.000,00	163.707.990.000,00
3.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0,00	0,00



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 tercapai sebesar Rp908.089.485.909,00 (100,60%) atau melebihi target sebesar Rp5.413.548.909,00 (0,60%) dari total anggaran pendapatan sebesar Rp902.675.937.000,00. Sedangkan untuk realisasi belanja sebesar Rp936.685.044.170,00 (87,89%) atau berkurang sebesar Rp129.038.179.830,00 (12,11%) dari anggaran yakni Rp1.065.723.224.000,00. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp660.702.300,00 atau terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp660.703.000,00 atau naik sebesar Rp100.000.000,00 atau 17,83% dari anggaran tahun 2017, hal ini di sebabkan karena pada tahun 2018 Pemerintah Kota Magelang memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp100.000.000,00 kepada Pemerintah Kabupaten Sulawesi Tenggara (Sulteng) yang terkena bencana.

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat di gambarkan dalam tabel 3.1 sampai tabel 3.3 sebagaimana tertuang pada lampiran 1.

**Tabel 3.1 REALISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN TRANSFER SERTA PEMBIAYAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/ (KURANG)	
		ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	4	(5)=(4-3)	(6)=(5):(3)
1	PENDAPATAN LRA	902.675.937.000,00	908.089.485.909,00	5.413.548.909,00	0,60
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA	225.916.332.000,00	249.877.424.347,00	23.961.092.347,00	10,61
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	30.646.800.000,00	34.283.039.991,00	3.636.239.991,00	11,86
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	4.909.300.000,00	5.642.331.979,00	733.031.979,00	14,93
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LRA	8.693.811.000,00	8.693.813.515,00	2.515,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah –LRA	181.666.421.000,00	201.258.238.862,00	19.591.817.862,00	10,78
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	658.491.405.000,00	639.410.274.912,00	(19.081.130.088,00)	(2,90)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pem Pusat-LRA	583.609.549.000,00	570.455.641.253,00	(13.153.907.747,00)	(2,25)
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak-LRA	28.944.144.000,00	23.082.924.075,00	(5.861.219.925,00)	(20,25)
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA	1.377.798.000,00	1.340.170.369,00	(37.627.631,00)	(2,73)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum-LRA	440.041.244.000,00	440.041.244.000,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus-LRA	113.246.363.000,00	105.991.302.809,00	(7.255.060.191,00)	(6,41)
1.2.2	Pendapatan Transfer Pem Pusat Lainnya-LRA	18.250.000.000,00	18.250.000.000,00	0,00	0,00



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/ (KURANG)	
		ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	4	(5)=(4-3)	(6)=(5):(3)
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	18.250.000.000,00	18.250.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	52.555.256.000,00	46.788.343.659,00	(5.766.912.341,00)	(10,97)
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA	52.555.256.000,00	46.788.343.659,00	(5.766.912.341,00)	(10,97)
1.2.4	Bantuan Keuangan	4.076.600.000,00	3.916.290.000,00	(160.310.000,00)	(3,93)
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Propinsi Lainnya	4.076.600.000,00	3.916.290.000,00	(160.310.000,00)	(3,93)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA	18.268.200.000,00	18.801.786.650,00	533.586.650,00	2,92
1.3.2	Hibah Dana BOS-LRA	18.268.200.000,00	18.087.872.725,00	(180.327.275,00)	(0,99)
1.3.3	Pendapatan Lainnya-LRA	0,00	713.913.925,00	713.913.925,00	0,00
2	BELANJA	1.066.383.927.000,00	937.345.746.470,00	(129.038.180.530,00)	(12,10)
2.1	BELANJA OPERASI	778.542.161.000,00	699.922.832.277,00	78.619.328.723,00	(10,10)
2.1.1	Belanja Pegawai	369.547.967.000,00	317.860.101.090,00	(51.687.865.910,00)	(13,99)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	389.616.770.000,00	364.256.470.509,00	(25.360.299.491,00)	(6,51)
2.1.3	Belanja Hibah	10.886.043.000,00	10.447.285.378,00	(438.757.622,00)	(4,03)
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7.830.678.000,00	6.698.273.000,00	(1.132.405.000,00)	(14,46)
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	660.703.000,00	660.702.300,00	(700,00)	0,00
2.2	BELANJA MODAL	281.978.826.000,00	237.422.914.193,00	(44.555.911.807,00)	(15,80)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	23.868.391.000,00	15.078.648.890,00	(8.789.742.110,00)	(36,83)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.133.385.000,00	50.034.279.487,00	(6.099.105.513,00)	(10,87)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.743.116.000,00	99.301.309.579,00	(21.441.806.421,00)	(17,76)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.758.715.000,00	70.172.294.944,00	(7.586.420.056,00)	(9,76)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.926.383.000,00	1.391.667.188,00	(534.715.812,00)	(27,76)
2.2.6	Belanja Modal Aset Tak Berwujud/Aset lainnya	1.548.836.000,00	1.444.714.105,00	(104.121.895,00)	(6,72)
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.862.940.000,00	0,00	(5.862.940.000,00)	(100,00)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.862.940.000,00	0,00	(5.862.940.000,00)	(100,00)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	184.770.764.000,00	184.727.834.875,00	(42.929.125,00)	(0,02)
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	180.992.764.000,00	180.992.764.876,00	876,00	0,00
3.1.3	Penerimaan kembali Investasi non Permanen	3.778.000.000,00	3.735.069.999,00	(42.930.001,00)	(1,14)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.062.774.000,00	21.062.774.000,00	0,00	0,00



Pemerintah Kota Magelang
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/ (KURANG)	
		ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	4	(5)=(4-3)	(6)=(5):(3)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000,00	21.062.774.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	163.707.990.000,00	163.665.060.875,00	(42.929.125,00)	0,03

a. Perkembangan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 tercapai sebesar Rp908.089.485.909,00 atau melebihi target sebesar Rp5.413.548.909,00 (0,60%) dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp902.675.937.000,00 turun sebesar Rp1.436.377.011,00 atau 0,16% dari realisasi Tahun 2017 sebesar Rp909.525.862.920,00. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel 3.2 sebagaimana tertuang berikut ini :

Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018

NO.	URAIAN	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	% LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1	PENDAPATAN -LRA	909.525.862.920,00	908.089.485.909,00	(1.436.377.011,00)	(0,16)
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	233.557.714.356,00	249.877.424.347,00	16.319.709.991,00	6,99
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	31.206.960.485,00	34.283.039.991,00	3.076.079.506,00	9,86
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	6.243.021.736,00	5.642.331.979,00	(600.689.757,00)	(9,62)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	7.711.404.121,00	8.693.813.515,00	982.409.394,00	12,74
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	188.396.328.014,00	201.258.238.862,00	12.861.910.848,00	6,83
1.2	PENDAPATAN TRANSFER-LRA	651.711.303.112,00	639.410.274.912,00	(12.301.028.200,00)	(1,89)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA	553.115.007.612,00	570.455.641.253,00	17.340.633.641,00	3,14
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak-LRA	25.341.079.039,00	23.082.924.075,00	(2.258.154.964,00)	(8,91)
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA	1.344.690.250,00	1.340.170.369,00	(4.519.881,00)	(0,34)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum-LRA	440.041.244.000,00	440.041.244.000,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus-LRA	86.387.994.323,00	105.991.302.809,00	19.603.308.486,00	22,69
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	47.039.466.000,00	18.250.000.000,00	(28.789.466.000,00)	(61,20)
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	47.039.466.000,00	18.250.000.000,00	(28.789.466.000,00)	(61,20)
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	41.855.667.000,00	46.788.343.659,00	4.932.676.659,00	11,78



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO.	URAIAN	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	% LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.855.667.000,00	46.788.343.659,00	4.932.676.659,00	11,78
1.2.4	Bantuan Keuangan-LRA	9.701.162.500,00	3.916.290.000,00	(5.784.872.500,00)	(40,37)
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	9.701.162.500,00	3.916.290.000,00	(5.784.872.500,00)	(40,73)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.256.845.452,00	18.801.786.650,00	(5.455.058.802,00)	(22,48)
1.3.1	Pendapatan Hibah-LRA	2.000.000.000,00	1.491.000.000,00	(509.000.000,00)	(25,45)
1.3.2	Hibah Dana BOS-LRA	22.050.844.059,00	16.596.872.725,00	(5.453.971.334,00)	(24,74)
1.3.3	Pendapatan Lainnya-LRA	206.001.393,00	713.913.925,00	507.912.532,00	246,56

b. Perkembangan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 tercapai sebesar Rp937.345.746.470,00 atau meningkat sebesar Rp57.937.565.023,00 (6,59%) dari realisasi Tahun 2017 sebesar Rp879.408.181.447,00. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel 3.3 sebagaimana tertuang berikut ini :

Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2017 dan 2018

NO	URAIAN	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	% LEBIH/ (KURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)	(6)=(5:3)
2	BELANJA	878.847.479.147,00	936.685.044.170,00	57.837.565.023,00	6,58
2.1	BELANJA OPERASI	645.645.777.975,00	699.262.129.977,00	53.616.352.002,00	8,30
2.1.1	Belanja Pegawai	321.762.777.524,00	317.860.101.090,00	(3.902.676.434,00)	(1,21)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	310.534.234.831,00	364.256.470.509,00	53.722.235.678,00	17,30
2.1.3	Belanja Hibah	8.385.895.620,00	10.447.285.378,00	2.061.389.758,00	24,58
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4.962.870.000,00	6.698.273.000,00	1.735.403.000,00	34,97
2.2	BELANJA MODAL	233.070.956.632,00	237.422.914.193,00	4.351.957.561,00	1,87
2.2.1	Belanja Tanah	1.476.985.650,00	15.078.648.890,00	13.601.663.240,00	920,91
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	83.664.119.327,00	50.034.279.487,00	(33.629.839.840,00)	(40,20)
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	91.270.842.710,00	99.301.309.579,00	8.030.466.869,00	8,80
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.058.480.055,00	70.172.294.944,00	17.113.814.889,00	32,25
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.683.803.267,00	1.391.667.188,00	(1.292.136.079,00)	(48,15)
2.2.6	Belanja Aset Tak Berwujud	916.725.623,00	1.444.714.105,00	527.988.482,00	57,60
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	130.744.540,00	0,00	(130.744.540,00)	(100)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	130.744.540,00	0,00	(130.744.540,00)	(100)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO (1)	URAIAN (2)	REALISASI 2017 (Rp) (3)	REALISASI 2018 (Rp) (4)	LEBIH/ (KURANG) (Rp) (5)=(4-3)	% LEBIH/ (KURANG) (6)=(5:3)
3	TRANSFER	560.702.300,00	660.702.300,00	100.000.000,00	17,83
3.1	Transfer Bantuan Keuangan	560.702.300,00	660.702.300,00	100.000.000,00	17,83
3.1.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.1.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	560.702.300,00	560.702.300,00	0,00	0,00

c. Perkembangan Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp184.727.834.875,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp19.685.094.472,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp165.042.740.403,00. Untuk realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2018 Rp21.062.774.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.895.117.000,00 dibandingkan dengan tahun 2017 Rp14.167.657.000,00. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel 3.4 sebagaimana tertuang berikut ini:

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 dan 2018

NO (1)	URAIAN (2)	REALISASI 2017 (Rp) (3)	REALISASI 2018 (Rp) (4)	LEBIH/KURANG (Rp) (5)=(4-3)	% LEBIH/ (KURANG) (6)=(4:3)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	165.042.740.403,00	184.727.834.875,00	19.685.094.472,00	11,93
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	162.344.899.952,00	180.992.764.876,00	18.647.864.924,00	11,49
3.1.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	2.697.840.451,00	3.735.069.999,00	1.037.229.548,00	38,45
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	165.042.740.403,00	184.727.834.875,00	19.685.094.472,00	11,93
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.167.657.000,00	21.062.774.000,00	6.895.117.000,00	48,67
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.167.657.000,00	21.062.774.000,00	6.895.117.000,00	48,67
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.167.657.000,00	21.062.774.000,00	6.895.117.000,00	48,67
	Pembiayaan Netto	150.875.083.403,00	163.665.060.875,00	12.789.977.472,00	8,48



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Magelang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan disusunnya kebijakan akuntansi adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pada Pemerintah Kota Magelang terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Yang di maksud Entitas pelaporan dalam laporan keuangan ini adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda, dalam hal ini adalah BPKAD Kota Magelang yang berkedudukan di Jln.Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang. Sedangkan entitas akuntansi adalah semua Perangkat Daerah, pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang mengelola anggaran dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan.

2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Magelang adalah basis akrua, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrua untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Umum Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh rekening kas umum daerah, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening umum kas daerah.

Basis akrua untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi



lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Daerah berdasarkan nilai nominal uang.

b. Kas di Bendahara Penerima

Kas di bendahara penerima berasal dari dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2018. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2018. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Bendahara Layanan Umum Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada BLUD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

Penerimaan berupa pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada Pemerintah Daerah.

e. Kas di Bendahara BOS

Kas di bendahara BOS adalah uang tunai dan saldo rekening Bank pada Bendahara BOS.

f. Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah uang atau saldo simpanan di bank pada Perangkat Daerah /unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan, yang bukan menjadi hak Perangkat Daerah/unit kerja pada perangkat daerah (uang titipan).

g. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek dilakukan dengan metode biaya. Kecuali dalam hal surat berharga (saham, obligasi, deposito) diperoleh tanpa biaya perolehan, misalnya dari donasi, maka investasi jangka pendek ini dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value* menggunakan harga pasar atau nilai appraisal) investasi jangka pendek pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Jadi harga pasar ini



selanjutnya diperlakukan sebagai harga perolehan investasi jangka pendek tersebut. Investasi dalam bentuk non saham misalnya deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

h. Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Atau sebesar kewajiban bayar pihak yang berhutang (nilai nominal dari SKP yang belum dilunasi)

Pengukuran piutang atas :

- 1) Piutang pajak dan Piutang retribusi
Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang tertunggak.
- 2) Piutang Dana Bagi Hasil
Piutang dana bagi hasil (DBH) dan Sumber Daya Alam disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
- 3) Piutang Dana Alokasi Umum
Dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
- 4) Piutang Dana Alokasi Khusus
Dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.
- 5) Piutang Transfer Lainnya
Dicatat sebesar sisa yang belum ditransfer dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 6) Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi dicatat sebesar jumlah alokasi definitive sesuai surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang belum dibayar sampai akhir tahun
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah
Dicatat sebesar hasil realisasi pendapatan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 8) Piutang Kelebihan Transfer
Dicatat sebesar kelebihan transfer dari yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah berdasarkan sebab terjadinya kesalahan transfer (kesalahan administrative atau ketentuan/peraturan yang ada) dan berdasarkan arah transfer.

i. Penyisihan piutang

Penghitungan Penyisihan piutang pajak daerah dan retribusi diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (aging schedule) sebagai berikut:

- 1) Piutang dengan umur 0 bulan sampai dengan 12 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 10%.



- 2) Piutang dengan umur lebih dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 50%.
- 3) Piutang dengan umur lebih dari 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 100%.

Penyisihan piutang selain pajak daerah dan retribusi diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (aging scedule) sebagai berikut:

- 1) Piutang dengan umur 0 bulan sampai dengan 12 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 10%.
- 2) Piutang dengan umur lebih dari 12 bulan sampai dengan 24 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 25%.
- 3) Piutang dengan umur lebih dari 24 bulan sampai dengan 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 35%.
- 4) Piutang dengan umur lebih dari 36 bulan sampai dengan 48 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 50%.
- 5) Piutang dengan umur lebih dari 48 bulan sampai dengan 60 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 75%.
- 6) Piutang dengan umur lebih dari 60 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 100%.

Klasifikasi umur piutang (aging scedule) dihitung setelah tanggal jatuh tempo.

Pencatatan Penyisihan Piutang

- 1) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value) bukan sebagai beban belanja.
- 2) Jurnal penyesuaian secara umum mendebet ekuitas dan mengkredit penyisihan piutang tidak tertagih (sebagai pengurang dari akun piutang/contra account).

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan

j. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.



k. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya persiapan tempat;
- 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 3) Biaya pemasangan (*installation cost*);
- 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- 5) Biaya konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal perolehan/pengadaan baru, memenuhi kriteria kapitalisasi yang sama dengan atau lebih sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Per Unit (Rp)
1.	Tanah	0
2.	Peralatan dan Mesin	500.000
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5.	Aset Tetap Lainnya	100.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
7.	Aset Lainnya	0

l. Penyusutan

Untuk mengetahui pengukuran penyusutan nilai aset tetap harus diketahui terlebih dahulu nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap maka penyusutan aset tetap tidak dapat dilakukan dan besarnya nilai buku juga tidak dapat dihitung. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan. Nilai sisa/residu aset tetap yang disusutkan diabaikan dalam menghitung penyusutan karena :

- 1) aset tetap pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan;
- 2) tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya;



- 3) penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan.

Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- Menghitung dan mencatat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih/ditetapkan;
- Melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Ekuitas dan mengkredit Akumulasi Penyusutan;
- Menyusun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah metode garis lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

MASA MANFAAT MASING-MASING JENIS ASET

REKENING	JENIS ASET	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	
1.3.2.01	ALAT BESAR DARAT	10
1.3.2.02	ALAT BESAR APUNG	8
1.3.2.03	ALAT BANTU	7
1.3.2.04	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1.3.2.05	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1.3.2.06	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1.3.2.07	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1.3.2.08	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1.3.2.09	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1.3.2.10	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1.3.2.11	ALAT UKUR	5
1.3.2.12	ALAT PENGOLAHAN	4
1.3.2.13	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	5
1.3.2.14	ALAT KANTOR	5
1.3.2.15	ALAT RUMAH TANGGA	5
1.3.2.16	KOMPUTER	4



REKENING	JENIS ASET	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.17	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.18	ALAT STUDIO	5
1.3.2.19	ALAT KOMUNIKASI	5
1.3.2.20	PERALATAN PEMANCAR	10
1.3.2.21	ALAT KEDOKTERAN	5
1.3.2.22	ALAT KESEHATAN	5
1.3.2.23	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1.3.2.24	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH/PERCONTOHAN	10
1.3.2.25	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
1.3.2.26	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	15
1.3.2.27	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1.3.2.28	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1.3.2.29	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1.3.2.30	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1.3.2.32	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1.3.2.33	AMUNISI	10
1.3.2.34	SENJATA SINAR	5
1.3.2.35	ALAT KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN	5
1.3.3	BANGUNAN GEDUNG	
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1.3.3.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	40
1.3.3.04	BANGUNAN BERSEJARAH	50
1.3.3.05	TUGU PERINGATAN	50
1.3.3.06	CANDI/PRASASTI	50
1.3.3.07	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	50
1.3.3.08	TUGU PERINGATAN	50
1.3.3.09	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	50
1.3.3.10	RAMBU-RAMBU	7
1.3.3.11	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1.3.4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	
1.3.4.01	JALAN	10
1.3.4.02	JEMBATAN	50



REKENING	JENIS ASET	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.4.03	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1.3.4.04	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	50
1.3.4.05	BANGUNAN AIR RAWA	25
1.3.4.06	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN	10
1.3.4.03	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	50
1.3.4.07	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1.3.4.08	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.10	BANGUNAN AIR	40
1.3.4.11	INSTALASI AIR MINUM/AIR BERSIH	30
1.3.4.12	INSTALASI AIR KOTOR	30
1.3.4.13	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DAN NON ORGANIK	10
1.3.4.14	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1.3.4.15	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1.3.4.16	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1.3.4.17	INSTALASI PERTAHANAN	30
1.3.4.18	INSTALASI GAS	30
1.3.4.19	INSTALASI PENGAMAN	20
1.3.4.20	JARINGAN AIR MINUM	30
1.3.4.21	JARINGAN LISTRIK	40
1.3.4.22	JARINGAN TELEPON	20
1.3.4.23	JARINGAN GAS	30

m. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Aset Tak Berwujud (ATB) yang memiliki masa manfaat terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) diamortisasi sesuai dengan Tabel Masa Manfaat atau masa manfaat yang ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang, dipilih mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merk dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, dll) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika manfaat ekonomi di masa depan tidak ada maka dapat diajukan proses penghapusan ATB sesuai ketentuan perundang-undangan. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas diindikasikan mengalami penurunan



nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, (misalnya nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan system, dll)

Metode yang digunakan adalah metode garis lurus dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Amortisasi per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Masa manfaat yang digunakan sebagai dasar perhitungan amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas di Pemerintah Kota Magelang dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

NO	JENIS ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT
1	Hak Paten atau Hak Cipta	5
2	Royalti	3
3	Software	5
4	Lisensi	3
5	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	3

- n. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap (*Subsequent Expenditures*)**
Definisi : Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- o. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal**
Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).
Kapitalisasi merupakan penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
Belanja modal adalah seluruh pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pengadaan aset tetap.



Pengeluaran dalam rangka perolehan awal aset tetap merupakan pengeluaran modal/belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian/pengadaan aset tetap yang manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan;
- 2) Perolehan aset tetap tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- 3) Aset tetap tersebut tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain;
- 4) Aset tetap tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal yang merupakan belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat ekonomis;
- 2) Pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- 3) Pengeluaran yang memperpanjang umur aset/masa manfaat;
- 4) Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 5) Pengeluaran yang akan meningkatkan standar kinerja;
- 6) Jumlah pengeluaran melebihi batas minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Magelang.

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - b) Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
 - c) Bertambah volume; dan/atau
 - d) Bertambah Kapasitas atau mutu produksi.

Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang.

p. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengukuran pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka:

- 1) Memperpanjang masa manfaat; atau
- 2) Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.

Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama, maksudnya:

- a) Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut dan biaya pengembangan tersebut akan menambah harga perolehan aset tetap bersangkutan;
- b) Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap dan biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambah biaya penggantian.



Aset Tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :

- 1) Tidak disajikan dalam Neraca (*on face*);
- 2) Diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan, seperti tanggul lumpur lapindo, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar di lereng gunung Merapi tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal pengeluaran setelah perolehan untuk hasil pengembangan, renovasi dan restorasi, memenuhi kriteria kapitalisasi yang sama dengan atau lebih sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Per Unit (Rp)
1.	Tanah	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	100.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7.	Aset Lainnya	0,00

4. AKUNTANSI PENDAPATAN

a. Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah.

Pengakuan Pendapatan -LO

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

- 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
 - a) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).



- 3) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah pada kas umum daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pengukuran Pendapatan - LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO (termasuk Hibah) dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan – LRA diakui pada saat :

- 1) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
 - 2) Kas diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - 3) Kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
 - 4) Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD
- Pengakuan Pendapatan

Pengukuran Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA dilakukan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).



Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan LRA (termasuk Hibah) dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :

- 1) urusan pemerintahan daerah;
- 2) organisasi; dan
- 3) kelompok.

Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :

- 1) jenis;
- 2) obyek; dan
- 3) rincian obyek pendapatan.

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan menjadi tiga jenis yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Pendapatan Transfer.
- 3) Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pengungkapan

Hal hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang berkaitan dengan pendapatan – LRA antara lain :

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan tahun bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus;
- 3) Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



5. AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

a. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat wajib dan tidak mengikat.

1) Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi aset;
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

2) Pengukuran Beban

Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga perolehan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Beban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

3) Penyajian Beban

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Realisasi beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Pada penerapan akuntansi berbasis akrual, beban hibah disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.



1) Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Belanja Hibah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh SKPKD. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang BLUD.

2) Pengukuran Belanja

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah berdasarkan asas bruto. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

3) Penyajian Belanja

Realisasi belanja hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi, dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4) Koreksi atas Belanja

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LRA. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang ekuitas SAL pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan



sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas SAL yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

5) Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- a) Rincian belanja per SKPD;
- b) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;
- b) Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;
- c) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

6. AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

a. Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengukuran Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

c. Penyajian Pembiayaan

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

Pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa konsultasi.

d. Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan adalah:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;

e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

Penyajian dan Pengungkapan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

Pengeluaran Pembiayaan untuk dana bergulir dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir yang secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).



Nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) diperoleh dengan melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*).

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dengan mengurangkan penyisihan pada perkiraan Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dana Bergulir perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain berisi informasi:

- 1) dasar penilaian dana bergulir;
- 2) jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- 3) besarnya suku bunga yang dikenakan;
- 4) saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- 5) jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

7. AKUNTANSI ASET

Definisi Aset

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas; Investasi Jangka Pendek; Piutang; Piutang Lain-lain; dan Persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, meliputi:

- a) Uang tunai yang terdiri atas uang kertas dan logam atau simpanan di Bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
- b) Uang tunai atau simpanan di Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat;
- c) Seluruh Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS) yang belum dipertanggungjawabkan, termasuk bukti pembelian barang (kwitansi, nota, faktur dan bukti lainnya) serta penyerahan uang muka atau panjar yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja secara sah;
- d) Saldo simpanan atau Rekening di Bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;



Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara Kas terdiri dari:

- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b) Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab *selain* Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

- a) Saldo rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada Bank yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;
- c) Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

Kas yang sudah diterima oleh Bank Operasional, yaitu Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai bank penerimaan atau pengeluaran, merupakan bagian dari Kas Daerah.

Setiap entitas pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat diminta menyusun neraca awal.

Untuk menentukan nilai Saldo Awal kas di rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah dapat menggunakan Saldo Rekening Koran Pemerintah Daerah per tanggal Neraca.

Penyusunan neraca awal biasa adalah sumber data kas yang tersebar dan masing-masing berada di bawah tanggung jawab yang berbeda.

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a) Kas di Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d) Kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan Pemerintahan;
- e) Kas di Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



- a) Konversi valuta asing ke dalam rupiah bermakna menukar suatu mata uang dengan mata uang yang lainnya.
- b) Translasi atau penjabaran artinya mengubah ekspresi pelaporan yang semula menggunakan nilai dalam valuta asing menjadi nilai rupiah.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- c) Berisiko rendah.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari:

- a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek;
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
- e) Investasi salam Saham;
- f) Investasi Jangka Pendek BLUD;
- g) Investasi Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terbagi menjadi:

a) Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang terjadi, terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

(1) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ Pungutan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah maupun peraturan daerah yang berlaku di Pemerintah Daerah antara lain meliputi:

- (a) Piutang pajak;
- (b) Piutang pendapatan daerah selain pajak antara lain piutang retribusi; utang atas bagian laba BUMD; piutang retribusi; piutang lain-lain PAD yang Sah.
- (c) Piutang dalam valuta asing

(2) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul karena terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman; transaksi jual beli; kemitraan dengan pihak lain; pemberian fasilitas/jasa; transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi:

- 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- 2) Piutang Bantuan Keuangan;
- 3) Piutang Hibah; dan
- 4) Piutang Pendapatan Lainnya.

b) Piutang BLUD

Merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLUD.

c) Piutang berdasarkan Transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada



saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Perimbangan keuangan vertikal dan horizontal mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan, berupa :

- (1) Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- (2) Transfer dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota,
- (3) Transfer antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintah terdiri dari:

- (1) Piutang Transfer Pemerintah Pusat antara lain:
 - Piutang Bagi Hasil Pajak;
 - Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya antara lain:
 - Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
 - Piutang Dana Penyesuaian;
 - Piutang Dana Insentif Daerah (DID).
- (3) Piutang Transfer Pemerintah Daerah antara lain:
 - Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak Provinsi;
 - Piutang Pendapatan Dana Hibah; dan
 - Piutang Pendapatan Dana Darurat.
- (4) Piutang Kelebihan Transfer.

4) Piutang Lainnya

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi:

- a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas.

Piutang lain-lain terdiri dari:

- a) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- b) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang kepada entitas lainnya;
- c) Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- d) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;



- e) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- f) Piutang Dividen;
- g) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
- h) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
- i) Uang Muka Belanja;
- j) Beban Dibayar Dimuka;
- k) Uang Muka Yang Harus Dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang BLUD diakui dengan kriteria:

- a) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggungjawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; atau
- b) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- c) Telah diterbitkan surat penagihan

Pengukuran Piutang

- a) Piutang dinilai sebesar kewajiban bayar pihak yang berutang (nilai nominal dari SKP yang belum dilunasi).
- b) Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal dari Surat Kesepakatan/Surat Ketetapan/Surat Tagihan yang belum dilunasi.

5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;



- c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- a) Barang konsumsi;
- b) Bahan untuk pemeliharaan;
- c) Suku cadang;
- d) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- e) Benda pos, pita cukai, leges, karcis;
- f) Bahan Baku;
- g) Barang dalam proses/setengah jadi;
- h) Tanah/Bangunan/barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- i) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Persediaan yang termasuk dalam pendekatan aset antara lain persediaan obat di Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas, persediaan yang direncanakan untuk diserahkan kepada masyarakat. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Termasuk dalam beban persediaan adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Beban Persediaan

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Persediaan dicatat



secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.

Investasi Permanen adalah:

- a. investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
- b. investasi untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen adalah:

- a. investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- b. kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Aset Tetap terdiri dari Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Instalasi; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan.



Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Masa manfaat lebih dari 12 bulan berarti bahwa aset tersebut masa manfaatnya jangka panjang, pengertian digunakan adalah bahwa aset tersebut digunakan dalam operasional pemda. Terdapat penambahan kriteria yaitu : memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

8. AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Klasifikasi kewajiban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.



Kewajiban dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*).
- b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
- c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Penjelasan untuk masing-masing pos akun LRA sebagai berikut:

5.1.a. PENDAPATAN - LRA

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp902.675.937.000,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2018. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp908.089.485.909,00 atau 100,60% dari target yang ditetapkan.

Pendapatan Daerah Kota Magelang sesuai SAP meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dalam TA 2018 serta realisasi TA 2018 dan realisasi TA 2017, sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Per Kelompok Pendapatan
Kota Magelang Tahun Anggaran 2018

Pendapatan Daerah –LRA :	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LRA	225.916.332.000,00	249.877.424.347,00	110,61	233.557.714.356,00
Pendapatan Transfer-LRA	658.491.405.000,00	639.410.274.912,00	97,10	651.711.303.112,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA	18.268.200.000,00	18.801.786.650,00	102,92	24.256.845.452,00
Jumlah Pendapatan Daerah-LRA	902.675.937.000,00	908.089.485.909,00	100,60	909.525.862.920,00

Realisasi Pendapatan Kota Magelang TA 2018 sebesar Rp908.089.485.909,00 mengalami kenaikan dari target sebesar Rp5.413.548.909,00 atau naik sebesar 0,60% dari anggarannya. Kemudian apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1.436.377.011,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,16%. Hal ini dikarenakan terdapat dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang bersifat “*given*” khususnya dari Dana Alokasi Khusus yang tidak turun sampai dengan 100%. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.a.1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2018 dan 2017, dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut:



5.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang
Tahun Anggaran 2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah-LRA	30.646.800.000,00	34.283.039.991,00	111,86	31.206.960.485,00
Retribusi Daerah-LRA	4.909.300.000,00	5.642.331.979,00	114,93	6.243.021.736,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah-LRA	8.693.811.000,00	8.693.813.515,00	100,00	7.711.404.121,00
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	181.666.421.000,00	201.258.238.862,00	110,78	188.396.328.014,00
Jumlah	225.916.332.000,00	249.877.424.347,00	110,60	233.557.714.356,00

Realisasi PAD TA 2018 sebesar Rp249.877.424.347,00 melampaui anggaran sebesar Rp23.961.092.347,00 atau naik 10,61% dari anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2018 yaitu Rp225.916.332.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp16.319.709.991,00 atau naik sebesar 6,99%. Kontribusi kenaikan pendapatan asli daerah ini terbesar terdapat di Lain-lain PAD yang sah yang berasal dari penerimaan BLUD RSU Tidar dan Puskesmas dengan total sebesar Rp186.559.675.976,00. Kemudian disusul Pajak Daerah dari target Rp30.646.800.000,00 capaian penerimaannya adalah sebesar Rp34.283.039.991,00 atau 111,86%. Kontribusi selanjutnya adalah berasal dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target Rp8.693.811.000,00 capaiannya sebesar Rp8.693.813.515,00 atau 100% dan terakhir dari Retribusi Daerah target Rp4.909.300.000, capaiannya sebesar Rp5.642.331.979,00 atau 114,93% .



Grafik 5.1

Proporsi Jenis Penerimaan Terhadap Kontribusi PAD Tahun 2018 (%)

Sumber: BPKAD Kota Magelang (LRA simda)

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 dan 2017, tersaji sebagai berikut:

**5.1.a. 1) a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA**

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut, antara lain Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Pendapatan Pajak Daerah Kota Magelang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, dengan realisasi selama TA 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

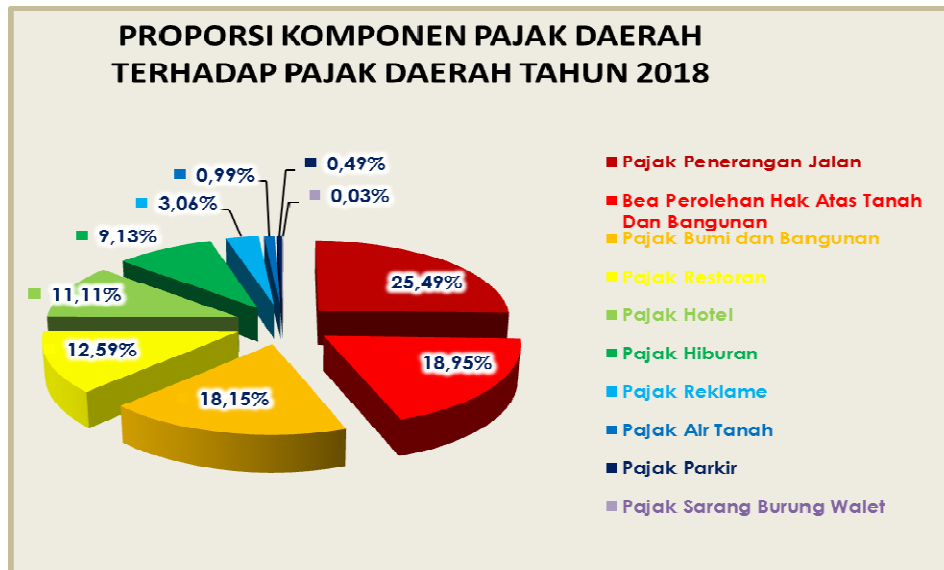
Tabel 5.3 Realisasi Pajak Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2018

Pendapatan Pajak Daerah-LRA :	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hotel	3.184.000.000,00	3.807.832.675,00	119,59	3.304.979.480,00
Restoran	3.654.000.000,00	4.317.338.777,00	118,15	3.388.469.448,00
Hiburan	2.525.000.000,00	3.131.630.218,00	124,02	1.886.016.938,00
Reklame	913.000.000,00	1.048.503.343,00	114,84	885.662.074,00
Penerangan Jalan	8.210.000.000,00	8.739.029.394,00	106,44	8.189.824.792,00
Parkir	150.000.000,00	167.276.733,00	111,52	207.502.220,00
Air Tanah	300.000.000,00	340.191.320,00	113,40	334.209.700,00
Sarang Burung Walet	10.800.000,00	10.925.000,00	101,16	10.925.000,00
Bumi dan Bangunan	5.700.000.000,00	6.222.937.224,00	109,17	6.257.673.488,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.000.000.000,00	6.497.375.307,00	108,29	6.741.697.345,00
Jumlah	30.646.800.000,00	34.283.039.991,00	111,86	31.206.960.485,00

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2018 sebesar 34.283.039.991,00, melampaui sebesar Rp3.636.239.991,00 atau naik 11,86% dari anggarannya. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp3.076.079.506,00 atau naik sebesar 9,86%.

Upaya yang telah dilakukan sehingga penerimaan pajak daerah naik atau melebihi target yang di tetapkan sebesar 11,86% antara lain:

- Optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui laporan keuangan entitas seperti melakukan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak hotel dan restoran, melakukan pemantauan omset wajib pajak dan restoran.
- Penerimaan pajak hiburan melebihi target, hal ini karena pada tahun 2018 terdapat penerimaan pajak hiburan dari pertandingan olah raga.
- Melakukan penagihan piutang pajak daerah, memberikan *law inforcement* bagi wajib pajak yang menunggak dengan bekerjasama dengan kejaksaan.
- Penilaian kembali tanah dan bangunan obyek pajak PBB-P2, dan pemutakhiran data secara periodik.



Grafik 5.2 Kontribusi terbesar rincian objek pajak daerah

Sumber: BPKAD Kota Magelang (LRA simda)

Dari 10 rincian objek pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang semuanya tercapai dan melebihi target anggaran pendapatan tahun 2018.

5.1.a. 1) b) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah penghasil, dengan realisasi selama TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:



Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi-LRA :	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
RETRIBUSI JASA UMUM				
Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	340.217.000,00	543.570.000,00	159,77	486.829.000,00
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	318.134.000,00	321.832.600,00	101,16	326.865.600,00
Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/ Pengabuan Mayat	175.000.000,00	241.697.500,00	138,11	597.003.750,00
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	640.940.000,00	669.970.000,00	104,53	654.850.000,00
Pelayanan Pasar	1.395.582.000,00	1.738.809.925,00	124,59	1.576.138.050,00
Pelayanan Pengujian Kend.Bermotor	383.792.000,00	418.622.500,00	109,08	388.045.500,00
Pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran	7.500.000,00	10.245.000,00	136,60	7.520.000,00
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00	31.350.000,00	261,25	24.890.000,00
Pelayanan Tera/Tera Ulang	14.000.000,00	65.986.600,00	471,33	0,00
Pengendalian Menara Telekomunikasi	30.000.000,00	38.660.854,00	128,87	0,00
JUMLAH RETRIBUSI JASA UMUM	3.317.165.000,00	4.080.744.979,00	123,02	4.062.141.900,00
RETRIBUSI JASA USAHA				
Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah	0,00	0,00	0,00	42.284.500,00
Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan	0,00	0,00	0,00	527.743.836,00
Pemakaian Kekayaan Daerah – Peralatan dan mesin	0,00	0,00	0,00	27.400.000,00
Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	15.000.000,00	25.845.000,00	172,30	22.349.000,00
Tempat Khusus Parkir	230.760.000,00	230.760.000,00	100,00	229.560.000,00
Rumah Potong Hewan	108.750.000,00	110.290.000,00	101,42	96.345.000,00
Tempat rekreasi	180.000.000,00	292.896.000,00	162,72	82.623.000,00
Pelayanan Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	158.975.000,00
JUMLAH RETRIBUSI JASA USAHA	534.510.000,00	659.791.000,00	123,44	1.187.280.336,00
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU				
Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	878.746.000,00	83,69	916.262.000,00
Izin gangguan tempat usaha.kegiatan kepada orang pribadi	0,00	0,00	0,00	69.142.500,00
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Pemberian Izin Trayek	7.625.000,00	8.050.000,00	105,57	8.195.000,00



Pendapatan Retribusi-LRA :	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
kepada Badan				
JUMLAH RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	1.057.625.000,00	901.796.000,00	85,27	993.599.500,00
Jumlah	4.909.300.000,00	5.642.331.979,00	114,93	6.243.021.736,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2018 sebesar Rp5.642.331.979,00 melampaui anggarannya sebesar Rp733.031.979,00 atau 14,93% dari anggarannya. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp600.689.757,00 atau 9,62%. Penurunan ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Obyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kelurahan Potrobangsari terdapat beberapa RW pelayanan persampahannya dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat.
2. Obyek retribusi perizinan tertentu seperti retribusi ijin gangguan sudah tidak diperbolehkan untuk di pungut.
3. Obyek retribusi IMB tidak mencapai target dikarenakan kesadaran masyarakat untuk melaporkan pendirian bangunan masih rendah.

Berikut ini rincian Pendapatan Retribusi Tahun 2018 per OPD :

Tabel 5.5 Pendapatan Retribusi Tahun 2018 per OPD

NO	OPD	JENIS RETRIBUSI	REALISASI (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis Yang Dimiliki Dan/Atau Dikelola Oleh Pemda	543.570.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	878.746.000,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Dan/Atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	10.245.000,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman Atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	241.697.500,00
		Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus	31.350.000,00
5.	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	669.970.000,00
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	418.622.500,00
		Retribusi Ijin Trayek	8.050.000,00
6.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.660.854,00
7.	Dinas Pertanian dan Pangan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium Dan Klinik Kesehatan Hewan	25.845.000,00
		Retribusi Rumah Potong Hewan	110.290.000,00



NO	OPD	JENIS RETRIBUSI	REALISASI (Rp)
		Retribusi Tempat Rekreasi	292.896.000,00
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar	1.738.809.925,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	230.760.000,00
		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	65.986.600,00
		Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15.000.000,00
9.	Kecamatan Magelang Selatan		
	Kelurahan Jurangombo Selatan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.400.000,00
	Kelurahan Jurangombo Utara	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.000.000,00
	Kelurahan Magersari	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00
	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.500.000,00
	Kelurahan Tidar Utara	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.400.000,00
	Kelurahan Tidar Selatan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.800.000,00
10.	Kecamatan Magelang Tengah		
	Kelurahan Cacaban	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.184.000,00
	Kelurahan Gelangan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.000.000,00
	Kelurahan Kemirirejo	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	38.400.000,00
	Kelurahan Magelang	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.681.600,00
	Kelurahan Panjang	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	28.542.000,00
	Kelurahan Rejowinangun Utara	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.000.000,00
11.	Kecamatan Magelang Utara		
	Kelurahan kedungsari	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.000.000,00
	Kelurahan Kramat Selatan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.550.000,00
	Kelurahan Kramat Utara	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.305.000,00
	Kelurahan Potrobangsari	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.070.000,00
	Kelurahan wates	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.000.000,00
	JUMLAH		5.642.331.979,00



5.1.a. 1) c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan-LRA :	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Perusahaan Milik Daerah	3.269.404.000,00	3.269.405.931,00	100,00	2.624.618.850,00
Lembaga Keuangan Bank	5.424.407.000,00	5.424.407.584,00	100,00	5.086.285.271,00
Penyertaan Modal/Investasi Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00		500.000,00
Jumlah	8.693.811.000,00	8.693.813.515,00	100,00	7.711.404.121,00

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2018 mencapai hasil sebesar Rp8.693.813.515,00 atau 100,00% dari anggaran tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp982.409.394,00 atau 12,74%.

Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

- a) Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah atau BUMD sebesar Rp3.269.405.931,00 terdiri dari :
 - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar 1.805.182.100,00;
 - Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kiai Langgeng sebesar Rp1.385.255.500,00;
 - Perusahaan Daerah Percetakan sebesar Rp21.725.331,00;
 - Perusahaan Daerah Perbengkelan sebesar Rp57.243.000,00.
- b) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp5.424.407.584,00 terdiri dari :
 - Bagian laba dari Bank Jateng sebesar Rp3.247.413.017,00;
 - Bagian laba BPR Bank Magelang sebesar Rp2.005.786.372,00; dan
 - Laba BKK Kota Magelang sebesar Rp171.208.195,00.

5.1.a. 1) d) Lain-lain PAD Yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.7 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA

Lain-lain PAD yang Sah-LRA :	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	348.240.000,00	410.160.198,00	117,78	120.335.000,00
Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	8.635.687.880,00	193,71	8.610.446.017,00
Penerimaan Bunga	3.250.000.000,00	613.424.655,00	18,87	1.760.068.693,00



Deposito				
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak	0,00	159.789.242,00	0,00	225.991.584,00
Pendapatan Denda Retribusi	4.550.000,00	11.043.810,00	242,72	10.339.600,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.073.034.000,00	1.173.239.285,00	109,34	421.509.035,00
Pendapatan BLUD	172.319.597.000,00	186.559.675.976,00	108,26	175.474.291.221,00
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	170.000.000,00	123.988.385,00	72,93	236.299.740,00
Pendapatan denda pemanfaatan aset daerah	0,00	0,00	0,00	479.235,00
Penerimaan Lain – Lain	43.000.000,00	3.571.229.431,00	8.305,18	1.533.567.889,00
Jumlah	181.666.421.000,00	201.258.238.862,00	110,78	188.396.328.014,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2018 tercapai sebesar Rp201.258.238.862,00 atau 110,78%, lebih tinggi sebesar Rp19.591.817.862,00 dari anggaran Tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp12.861.910.848,00 atau sebesar 6,83%.

5.1.a.2) Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi dengan realisasi dalam TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.8 Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer-LRA :	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-LRA	583.609.549.000,00	570.455.641.253,00	97,75	553.115.007.612,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	18.250.000.000,00	18.250.000.000,00	100,00	47.039.466.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Bagi Hasil Pajak lainnya)-LRA	52.555.256.000,00	46.788.343.659,00	89,03	41.855.667.000,00
Bantuan Keuangan-LRA	4.076.600.000,00	3.916.290.000,00	96,07	9.701.162.500,00
Jumlah	658.491.405.000,00	639.410.274.912,00	97,10	651.711.303.112,00

5.1.a.2) a) Transfer Pemerintah Pusat- LRA

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.9 Transfer Pemerintah Pusat- LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LRA	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak-LRA	28.944.144.000,00	23.082.924.075,00	79,75	25.341.079.039,00
Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA	1.377.798.000,00	1.340.170.369,00	97,27	1.344.690.250,00



Dana Alokasi Umum-LRA	440.041.244.000,00	440.041.244.000,00	100,00	440.041.244.000,00
Dana Alokasi Khusus-LRA	113.246.363.000,00	105.991.302.809,00	93,59	86.387.994.323,00
Jumlah Dana Perimbangan	583.609.549.000,00	570.455.641.253,00	97,75	553.115.007.612,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pusat-LRA TA 2018 turun sebesar 13.153.907.747,00 atau 2,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp583.609.549.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp17.340.633.641,00 atau naik sebesar 3,14%.

Berikut penjelasan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2018:

5.1.a.2) a) 1. Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp23.082.924.075,00 terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan sebesar Rp919.198.885,00
- Bagi Hasil dari PPh Orang Pribadi Dalam Negeri sebesar Rp12.863.814.220,00
- Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp6.064.653.000,00
- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pusat Bagi Rata Tahun 2018 Rp3.235.257.970,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2018, Penjelasan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018

Uraian	PBB Migas (Rp)	BP PBB Migas (Rp)	Jumlah (Rp)
Tahun 2018	887.825.818,00	31.373.067,00	919.198.885,00
Migas	516.733.500,00	17.224.450,00	533.957.950,00
Non Migas	371.092.318,00	14.148.617,00	385.240.935,00
Jumlah Tahun 2018	887.825.818,00	31.373.067,00	919.198.885,00

Tabel 5.11 Penerimaan Dana Bagi PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Tahun 2018

Uraian	PPh Ps 21 (Rp)	PPh Ps 25/29 (Rp)	Jumlah (Rp)
Tahun 2018	10.957.068.079,00	1.906.746.141,00	12.863.814.220,00
Jumlah Tahun 2018	10.957.068.079,00	1.906.746.141,00	12.863.814.220,00

Tabel 5.12 Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018

Uraian	DBHCHT (Rp)	Jumlah (Rp)
Tahun 2018	6.064.653.000,00	6.064.653.000,00
Jumlah Tahun 2018	6.064.653.000,00	6.064.653.000,00



Berdasarkan PMK 153/PMK.07/2018 tanggal 10 Desember 2018 Kota Magelang mendapatkan Alokasi sebesar Rp6.064.653.000,00 jumlah tersebut telah masuk ke RKUD Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp6.064.653.000 atau 100%.

Tabel 5.13 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pusat Bagi Rata Tahun 2018

Uraian	PBB Pusat Bagi Rata (Rp)	Jumlah (Rp)
Tahun 2018	3.235.257.970,00	3.235.257.970,00
Jumlah Tahun 2018	3.235.257.970,00	3.235.257.970,00

5.1.a.2) a) 2. Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA dianggarkan sebesar Rp1.377.798.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.340.170.369,00 yang terdiri dari:

- Bagi Hasil Propinsi Sumber Daya Hutan sebesar Rp282.138.205,00
- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp701.234.591,00
- Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp36.346.929,00
- Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp291.237.025,00
- Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi (Iuran Tetap) sebesar Rp26.570.761,00
- Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum Mineral dan Batu Bara (Royalty) sebesar Rp2.642.858,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.07/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2018, Penjelasan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2018

Jenis Transfer	Tahun 2018 (Rp)	Kurang salur (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	2	3	4= 2+3
Kehutanan (PSDH)	282.138.205,00	0,00	282.138.205,00
Perikanan	701.234.591,00	0,00	701.234.591,00
SDA Minyak Bumi	36.346.929,00	0,00	36.346.929,00
SDA Gas Bumi	291.237.025,00	0,00	291.237.025,00
Panas Bumi	26.570.761,00	0,00	26.570.761,00
Mineral dan Batu Bara	2.511.600,00	131.258,00	2.642.858,00
Jumlah	1.340.039.111,00	131.258,00	1.340.170.369,00

5.1.a.2) a) 3. Dana Alokasi Umum sebesar Rp440.041.244.000,00

Berdasarkan Lampiran XIV Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2018, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi sebesar Rp440.041.244.000,00 dan Realisasi Penerimaan DAU ke Rekening Kas Umum Daerah diterima sebesar 100% atau Rp440.041.244.000,00.



5.1.a.2) a) 4. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp105.991.302.809,00

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp105.991.302.809,00 terdiri dari atas DAK Fisik sebesar Rp61.667.899.074,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp44.323.403.735,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. DAK Fisik Reguler Tahun 2018 sebesar Rp12.069.965.674,00
2. DAK Fisik Penugasan 2018 sebesar Rp49.597.933.400,00
3. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp44.323.403.735,00

Penjelasan atas Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Berdasarkan Lampiran XV Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2018 Pemerintah Kota Magelang Mendapatkan Alokasi DAK Fisik Tahun 2018 sebesar Rp13.262.409.000,00. Adapun Realisasi Penerimaan DAK Fisik sebesar Rp12.069.965.674,00 atau sebesar 91,00% dan DAK Fisik Penugasan dari Alokasi sebesar Rp51.754.891.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp49.597.933.400,00 atau sebesar 95,83%

Adapun Penjelasan atas Realisasi Penerimaan DAK Fisik Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.15 Realisasi Penerimaan DAK Fisik Tahun 2018

Jenis DAK	Alokasi 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (%)
DAK FISIK	65.017.300.000,00	61.667.899.074,00	94,84
DAK REGULER	13.262.409.000,00	12.069.965.674,00	91,00
-Pendidikan	2.496.554.000,00	2.294.240.200,00	91,89
Pendidikan SD	1.330.000.000,00	1.295.279.000,00	97,39
Pendidikan SMP	1.166.554.000,00	998.961.200,00	85,63
-Kesehatan	6.169.366.000,00	5.792.414.474,00	93,89
Pelayanan Dasar	4.167.577.000,00	4.167.577.000,00	100
Pelayanan Kefarmasian	1.487.756.000,00	1.124.005.406,00	75,55
Pengad. Peralt.Pendukung Iminisasi	428.898.000,00	428.409.168,00	99,89
Keluarga Berencana	85.135.000,00	72.422.900,00	85,07
-Bidang Air Minum	751.555.000,00	731.362.000,00	97,31
Air Minum	751.555.000,00	731.362.000,00	97,31
-Bidang Sanitasi	900.000.000,00	825.526.000,00	91,73
Sanitasi	900.000.000,00	825.526.000,00	91,73
-Perumahan dan Permukiman	1.425.420.000,00	1.074.476.000,00	75,38
Perumahan & Permukiman	1.425.420.000,00	1.074.476.000,00	75,38
-Pariwisata	1.519.514.000,00	1.351.947.000,00	88,97
Peariwisata	1.519.514.000,00	1.351.947.000,00	88,97
DAK PENUGASAN	51.754.891.000,00	49.597.933.400,00	95,83
Kesehatan	34.179.973.000,00	33.488.654.900,00	97,98
Air Minum	900.000.000,00	882.985.500,00	98,11
Sanitasi	2.675.000.000,00	2.638.101.000,00	98,62
Jalan	13.381.876.000,00	11.979.687.000,00	89,52
Lingkungan Hidup	618.042.000,00	608.505.000,00	98,46
Jumlah	65.017.300.000,00	61.667.899.074,00	94,84



Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa bahwa penyaluran DAK Fisik berdasarkan Nilai Kontrak (Rencana Kebutuhan Penyelesaian Kegiatan Selama Satu Tahun Anggaran). Alokasi anggaran DAK Fisik Tahun 2018 sebesar Rp65.017.300.000,00 realisasi transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp61.667.899.074,00 atau sebesar 94,84%.

Penjelasan atas Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

Berdasarkan Lampiran XVI Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik menurut Provinsi, Kabupaten /Kota Tahun 2018 Pemerintah Kota Magelang Mendapatkan Alokasi DAK Non Fisik Tahun 2018 sebesar Rp48.229.063.000,00 dan Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp44.323.403.735,00 atau sebesar 91,90%. Adapun perincian penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

Jenis DAK	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (%)
DAK NON FISIK			
BOP PAUD			
BOP PAUD	3.526.800.000,00	2.887.200.000,00	81,86
Tunjangan Profesi Guru			
Tunjangan Profesi Guru	38.455.190.000,00	36.414.376.830,00	94,69
Tambahan Penghasilan Guru			
Tambahan Penghasilan Guru	375.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB			
BO Kesehatan	4.637.498.000,00	4.122.699.451,00	88,90
Bantuan Operasional KB	575.650.000,00	575.645.054,00	100,00
Dana Adminduk	658.925.000,00	323.482.400,00	49,09
JUMLAH	48.229.063.000,00	44.323.403.735,00	91,90

Beberapa hal yang menyebabkan transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik tidak dapat mencapai 100% adalah:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 disebutkan bahwa apabila terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya, maka akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana di Tahun Anggaran berikutnya sehingga Penyaluran Tahun 2018 akan berkurang sebesar Silpa Tahun 2017.
2. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10210/A.A1.1/PR/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penghentian Transfer Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) melalui DAK Non Fisik Tahun



2018, Pemerintah Kota Magelang mendapat Rekomendasi Penghentian Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA. 2018 karena masih terdapat sisa di RKUD Tahun 2017 yang cukup dipergunakan untuk pembayaran tunjangan selama 1 Tahun. Sisa Tambahan Penghasilan Tahun 2017 sebesar Rp2.985.350.000,00 sehingga dari alokasi Tahun 2018 sebesar Rp375.000.000,00 tidak ditransfer oleh Pemerintah Pusat karena Silpa Tahun 2017 masih mencukupi untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru selama Tahun 2018.

3. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73566/A.A1.1/PR/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penghentian Transfer Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) Tahun 2018, Pemerintah Kota Magelang mendapat Rekomendasi Penyaluran disesuaikan dengan Kebutuhan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tahun 2018 dikarenakan masih terdapat Silpa Dana Tunjangan Profesi Guru Tahun 2017 sebesar Rp2.069.280.325,00 dan pengembalian sebesar Rp12.185.405,00. Total pengurangan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Tahun 2018 sebesar Rp2.040.813.170,00 sehingga dari Alokasi sebesar Rp38.455.190.000,00 transfer masuk Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp36.414.376.830,00 atau 94,69%.

Perincian Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.17 Perincian Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2018

Jenis DAK	Alokasi APBNP 2018 (Rp)	Sisa di RKUD Tahun 2017	Realisasi 2018	%
DAK NON FISIK				
BOP PAUD				
BOP PAUD	3.526.800.000,00	639.600.000,00	2.887.200.000,00	81,88
Tunjangan Profesi Guru				
Tunjangan Profesi Guru	38.455.190.000,00	2.040.813.170,00	36.414.376.830,00	94,89
Tambahan Penghasilan Guru				
Tambahan Penghasilan Guru	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB				
BO Kesehatan	4.637.498.000,00	514.798.549,00	4.122.699.451,00	88,90
BO Keluarga Berencana	575.650.000,00	4.946,00	575.645.054,00	100,00
Dana Admuduk	658.925.000,00	335.442.600,00	323.482.400,00	49,09
JUMLAH	48.229.063.000,00	3.905.659.265,00	44.323.403.735,00	91,90

**5.1.a.2) b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Dana Penyesuaian, Dana Otonomi Khusus dan Dana Insentif Daerah, dengan realisasi dalam TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.18 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA

Pendapatan Transfer PP- Lainnya-LRA :	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Penyesuaian-LRA	0,00	0,00	0	0,00
Dana Otonomi Khusus-LRA	0,00	0,00	0	0,00
Dana Insentif Daerah-LRA	18.250.000.000,00	18.250.000.000,00	100,00	47.039.466.000,00
Jumlah Lainnya	18.250.000.000,00	18.250.000.000,00	100,00	47.039.466.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2018 sebesar Rp18.250.000.000,00 atau 100% berdasarkan Lampiran XVII Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2018, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp18.250.000.000,00 berdasarkan Kriteria Kinerja. Dana tersebut masuk 100% karena Pemerintah Kota Magelang dapat memenuhi Persyaratan Penyaluran DID Tahap ke II yaitu Laporan Realisasi Penyerapan DID Tahap I dapat mencapai 70% dari Transfer DID Tahap I yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5.1.a.2) c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi berasal dari Pemerintah Propinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan realisasi dalam TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.19 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Pendapatan Transfer Penda Lainnya-LRA :	2018		%	2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak-LRA	52.555.256.000,00	46.788.343.659,00	89,03	41.855.667.000,00
Bagi Hasil Lainnya-LRA	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah	52.555.256.000,00	46.788.343.659,00	89,03	41.855.667.000,00

Realisasi penerimaan bagi hasil pajak propinsi yang telah diterima Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018 sebesar Rp46.788.343.659,00 dari anggaran sebesar Rp52.555.256.000,00 atau sebesar 89,03% dengan rincian:

Tabel 5.20 Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Propinsi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018

No	Uraian	2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	PKB	16.924.915.000,00	16.772.718.853,00	99,10
2.	BBNKB	6.167.680.000,00	6.801.620.221,00	110,288
3.	PBBKB	13.918.670.000,00	6.463.787.009,00	46,44
4.	PAP	14.625.000,00	23.512.688,00	160,77
5.	Pajak Rokok	15.529.366.000,00	16.726.704.888,00	107,71
	Jumlah	52.555.256.000,00	46.788.343.659,00	89,03



Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/184/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang Mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2018 sebesar Rp53.211.211.848,00 sedangkan untuk Kurang Salur Dana bagi Hasil Pajak Tahun 2017 yang diterima di Tahun 2018 sebesar Rp3.885.664.087 sehingga Total Alokasi Tahun 2018 sesuai Alokasi APBD Perubahan Provinsi Tahun 2018 adalah sebesar Rp57.096.875.935,00 sehingga apabila dihadapkan dengan Alokasi maka realisasi penerimaannya adalah sebesar 81,94% sedangkan apabila dihadapkan dengan pagu alokasi APBD sebesar 89,03%.

Perincian Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018, jumlah yang dibagi hasilkan berdasarkan prosentase penerimaan riil pajak propinsi sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 dan untuk dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditransfer ke Kabupaten/Kota adalah dana bagi hasil berdasarkan penerimaan riil sampai dengan bulan November 2018 dan selisih dana bagi hasil pajak yang belum ditransfer belum dapat dipergunakan sebagai dasar pencatatan piutang pajak sebelum ada ketetapan kurang salur, adapun perincian sebagai berikut:

Tabel 5.21 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Kota Magelang Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Alokasi/Transfer	2018	Kurang Salur 2017	Jumlah
	1	2	3	4	5=3+4
1.	PKB	Alokasi	13.678.459.999,00	1.967.500.625,00	15.645.960.624,00
		Transfer	14.805.217.928,00	1.967.500.625,00	16.772.718.553,00
		Belum Transfer	(1.126.757.929,00)		(1.126.757.929,00)
2.	BBNKB	Alokasi	9.273.117.386,00	929.655.737,00	10.202.773.123,00
		Transfer	5.871.964.484,00	929.655.737,00	6.801.620.221,00
		Belum Transfer	3.401.152.902,00		3.401.152.902,00
3.	PBBKB	Alokasi	13.983.437.517,00	985.769.233,00	14.969.206.750,00
		Transfer	5.478.017.776,00	985.769.233,00	6.463.787.009,00
		Belum Transfer	8.505.419.741,00		8.505.419.741,00
4.	PAP	Alokasi	17.074.619,00	2.738.490,00	19.813.109,00
		Transfer	20.774.198,00	2.738.490,00	23.512.688,00
		Belum Transfer	(3.699.579,00)		(3.699.579,00)
5.	Pajak Rokok	Alokasi	16.259.122.327,00	0,55	16.259.122.327,55
		Transfer	16.726.704.888,00	0,00	16.726.704.888,00
		Belum Transfer	(467.582.561,00)	0,55	(467.582.560,45)
	Jumlah	Alokasi	53.211.211.848,00	3.885.664.085,55	57.096.875.933,55
		Transfer	42.902.679.274,00	3.885.664.085,00	46.788.343.359,00
		Belum Transfer	10.308.532.574,00	0,55	10.308.532.574,55

**5.1.a.2) d) Bantuan Keuangan-LRA**

Bantuan Keuangan berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Bantuan Khusus dan Bantuan Umum dari Provinsi, dengan realisasi dalam TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.22 Bantuan Keuangan-LRA

Bantuan Keuangan-LRA :	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan dari Provinsi-LRA	4.076.600.000,00	3.916.290.000,00	96,07	9.701.162.500,00
Jumlah	4.076.600.000,00	3.916.290.000,00	96,07	9.701.162.500,00

Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan TA 2018 tidak tercapai sebesar Rp160.310.000,00 atau 3,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.076.600.000,00. Alokasi dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi pada Tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya pelimpahan pendanaan bagi satuan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sehingga alokasi Bantuan Keuangan mengalami penurunan. Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi tidak dapat mencapai 100% dikarenakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah pada pasal 12 disebutkan bahwa besaran anggaran yang dicairkan sesuai nilai kontrak yang ada, apabila nilai kontrak melebihi pagu alokasi maka transfer sebesar pagu alokasi dan apabila nilai kontrak dibawah pagu alokasi bantuan keuangan maka transfer sebesar nilai kontrak kegiatan.

Berdasarkan DPA PPKD Provinsi Jawa Tengah TA 2017 Nomor 01111/DPA/2018 tanggal 27 Desember 2017 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa TA 2018, Pemerintah Kota Magelang mendapat Alokasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp4.076.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.916.290.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.23 Bantuan Keuangan Kota Magelang Tahun 2018

No	Uraian	2018		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
A	BANTUAN	791.600.000,00	791.600.000,00	100,00
1.	FEDEP	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
2.	TMMD	501.600.000,00	501.600.000,00	100,00
3.	SIPPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
4.	Pendidikan Untuk Semua	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.	NANGKIS	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
6.	GAKY	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
B	SARANA DAN PRASARANA	3.250.000.000,00	3.089.690.000,00	95,07
1.	Pembangunan IPAL Komunal	500.000.000,00	484.233.000,00	96,85



No	Uraian	2018		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Kec. Magelang Selatan			
2.	Pembangunan IPAL Komunal Kec. Magelang Tengah	500.000.000,00	490.028.000,00	98,01
3.	Pengadaan Sound dan lighting untuk Panggung Terbuka	250.000.000,00	248.256.000,00	99.30
4.	Pembangunan Gardu pandang Gunung Tidar	2.000.000.000,00	1.867.173.000,00	93.36
C	Bantuan Pendidikan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	Pendataan Pendidikan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	Jumlah	4.076.600.000,00	3.916.290.000,00	96,07

Jika realisasi sebesar Rp3.916.290.000,00 dibandingkan dengan anggaran alokasi Bantuan Keuangan Kota Magelang yaitu sebesar Rp4.076.600.000,00 terdapat selisih Rp160.310.000,00 dikarenakan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana dari alokasi bantuan sebesar Rp3.250.000.000,00 untuk pencairannya berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp3.089.960.000,00 sudah sesuai dengan ketentuan yaitu apabila nilai kontrak dibawah pagu alokasi maka pencairan sesuai nilai kontraknya sedangkan apabila nilai kontrak diatas pagu alokasi maka pencairan sesuai pagu alokasi.

5.1.a.3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.24 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah-LRA:	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah-LRA	18.268.200.000,00	18.087.872.725,00	24.050.844.059,00
- Hibah Air Minum	1.500.000.000,00	1.491.000.000,00	2.000.000.000,00
- Hibah Dana BOS	16.768.200.000,00	16.596.872.725,00	22.050.844.059,00
Pendapatan Dana Darurat-LRA	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya-LRA	0,00	713.913.925,00	206.001.393,00
Jumlah	18.268.200.000,00	18.801.786.650,00	24.256.845.452,00

5.1.a 3) a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah sebesar Rp.18.087.872.725,00 terdiri atas Pendapatan Hibah Air Minum sebesar Rp1.491.000.000,00 dan Hibah Dana BOS sebesar Rp. 16.596.872.725,00. Pendapataan Hibah Air Minum dialokasikan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-34/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2018. Pemerintah Kota Magelang mendapatkan alokasi sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk 500 Sambungan Rumah (SR) masing-masing @ Rp3.000.000,00 akan tetapi hasil Audit BPKP dari rencana 500 SR hanya bisa dilaksanakan 497 SR sehingga transfer dana hibah air minum yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Magelang hanya sejumlah 497 SR @



Rp3.000.000,00 atau sebesar Rp1.491.000.000,00 atau 99,40% dari pagu alokasi.

Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp16.596.872.725,00 dengan Pendapatan murni tahun 2018 sebesar Rp16.588.920.000,00

5.1.a 3) b. Pendapatan Lainnya-LRA

Pendapatan Lainnya-LRA tahun 2018 sebesar Rp713.913.925,00 merupakan pendapatan dari kompensasi pajak PPh 21 gaji PNS yang disebabkan karena adanya peraturan baru tahun 2015 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada Tahun 2016 terdapat kelebihan pajak yang sudah terlanjur disetor ke Kas Negara. Kelebihan setor tersebut dikompensasikan ke dalam PPh 21 atas Gaji mulai 2017.

5.1.b. BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa.

Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2018 serta realisasi Tahun Anggaran 2017, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018

Belanja Daerah	Anggaran 2018(Rp)	Realisasi 2018(Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Operasi	777.881.458.000,00	699.262.129.977,00	645.645.777.975,00
Belanja Modal	281.978.826.000,00	237.422.914.193,00	233.070.956.632,00
Belanja Tidak Terduga (BTT)	5.862.940.000,00	0,00	130.744.540,00
Jumlah Belanja	1.065.723.224.000,00	936.685.044.170,00	878.847.479.147,00
Transfer Bantuan Keuangan	660.703.000,00	660.702.300,00	560.702.300,00
Jumlah Belanja +Transfer	1.066.383.927.000,00	937.345.746.470,00	879.408.181.447,00

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018 adalah sebesar Rp937.345.746.470,00 atau sebesar 87,90% dari anggaran yang ditetapkan. Hal tersebut tercapai karena adanya pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya peningkatan pengendalian dilakukan dengan penghematan biaya (efisiensi anggaran) dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran. Sebagai akibat dari kebijaksanaan pengendalian anggaran tersebut terdapat penghematan dan/atau sisa belanja yang disetor ke kas daerah. Pada dasarnya dalam APBD Penetapan ataupun Perubahan telah mengakomodir kebijakan dan regulasi strategis dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta penyesuaian terhadap target kinerja SKPD.

5.1.b.1) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Magelang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2018 sebagai berikut:



Tabel 5.26 Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Magelang TA 2018

Belanja Operasi :	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	369.547.967.000,00	317.860.101.090,00	86,01	321.762.777.524,00
Belanja Barang & Jasa	389.616.770.000,00	364.256.470.509,00	93,49	310.534.234.831,00
Belanja Hibah	10.886.043.000,00	10.447.285.378,00	95,97	8.385.895.620,00
Belanja Bantuan Sosial	7.830.678.000,00	6.698.273.000,00	85,54	4.962.870.000,00
Jumlah	777.881.458.000,00	699.262.129.977,00	89,89	645.645.777.975,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2018 sebesar Rp699.262.129.977,00 atau 89,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp777.881.458.000,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp53.616.352.002,00 atau 8,30%.

5.1.b.1) a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2018 terealisasi sebesar Rp317.860.101.090,00 atau 86,01% dari anggarannya sebesar Rp369.547.967.000,00, dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp321.762.777.524,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.902.676.434,00 atau turun 1,21%. Berikut ini perinciannya :

Tabel 5.27 Belanja Pegawai TA 2018

URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	169.110.149.574,00	144.037.151.093,00	85,17	152.356.466.877,00
Belanja Tunjangan Keluarga	14.838.340.514,00	12.744.185.811,00	85,88	12.466.957.997,00
Belanja Tunjangan Jabatan	6.415.978.204,00	5.987.534.000,00	93,32	5.715.716.967,00
Belanja Tunjangan Fungsional	9.176.307.225,00	8.569.767.000,00	93,39	8.109.190.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	2.835.393.250,00	2.492.250.000,00	87,90	2.577.522.134,00
Belanja Tunjangan Beras	8.716.376.573,00	6.934.140.760,00	79,55	7.366.249.940,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	862.198.162,00	728.682.949,00	84,51	257.353.851,00
Belanja Pembulatan Gaji	2.607.017,00	1.927.543,00	73,94	1.992.770,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	5.042.622.699,00	4.025.299.560,00	79,83	4.260.780.469,00
Belanja Uang Paket	61.586.900,00	48.132.000,00	72,15	47.344.500,00
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	22.675.900,00	17.721.900,00	78,15	17.036.775,00
Belanja Tunjangan Komisi	41.377.700,00	32.337.900,00	78,15	32.155.200,00
Belanja Tunjangan Badan Anggaran	22.675.900,00	17.721.900,00	78,15	17.036.775,00
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	7.246.900,00	5.663.700,00	78,15	5.663.700,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.950.800,00	73.993.500,00	69,18	68.740.875,00
Belanja Tunjangan Perumahan	2.544.000.000,00	2.206.400.000,00	86,73	2.493.300.000,00



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
Belanja Uang Jasa Pengabdian	18.900.000,00	0,00	0,00	11.025.000,00
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	221.760.000,00
Belanja Tunjangan Badan Legislati	17.532.900,00	13.702.500,00	78,15	13.519.800,00
Tunjangan Transportasi	2.250.000.000,00	1.688.940.000,00	75,06	667.500.000,00
Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	40.524.470.000,00	35.098.114.268,00	86,61	36.617.891.665,00
Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	3.360.350.000,00	302.625.000,00	9,01	365.750.000,00
Belanja Tunjangan Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	703.929.914,00
Iuran JKK	406.882.557,00	295.352.347,00	72,59	0,00
Iuran JKM	1.263.070.225,00	1.155.212.492,00	91,46	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	166.800.000,00	163.300.000,00	97,90	149.800.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	34.237.800.000,00	29.493.770.000,00	86,14	31.159.220.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	49.200.000,00	34.100.000,00	69,31	45.000.000,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	2.175.600.000,00
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Tunjangan Reses	787.500.000,00	777.000.000,00	98,67	151.200.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.905.112.000,00	1.360.992.978,00	71,44	1.394.699.275,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	308.060.000,00	185.185.716,00	60,11	191.540.347,00
Belanja Uang Lembur PNS	3.106.877.000,00	2.568.139.300,00	82,66	2.335.300.900,00
Belanja Uang Lembur Non PNS	512.268.000,00	454.069.000,00	88,64	371.090.750,00
Belanja Pegawai BOS – LRA	1.883.052.000,00	1.419.764.028,00	75,40	1.542.564.700,00
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	32.826.541.000,00	30.230.530.300,00	92,09	27.661.530.300,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan non PNS	2.352.310.000,00	2.264.634.319,00	96,27	2.059.127.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	815.640.000,00	679.195.000,00	92,09	581.675.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah PNS	5.566.250.000,00	5.231.640.000,00	93,99	5.082.450.000,00



URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Non PNS	42.600.000,00	42.600.000,00	100,00	49.950.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	871.320.000,00	868.500.000,00	99,68	868.500.000,00
Honorarium Pelayanan Kesehatan PNS	106.580.000,00	92.039.226,00	86,36	120.980.543,00
Honorarium Pelayanan Kesehatan Non PNS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	12.410.764.000,00	11.566.185.000,00	93,19	10.820.263.500,00
Jumlah	369.547.967.000,00	317.860.101.090,00	86,01	321.762.777.524,00

Pada komponen Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan, telah mengakomodir penyesuaian terhadap PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku mulai bulan Januari 2016. Untuk penyesuaian tersebut Pemerintah Kota Magelang baru dapat merealisasikan dan mulai dapat diterapkan pada pembuatan daftar gaji Bulan Oktober 2016, sehingga terhadap perhitungan setor Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut akan dikompensasikan dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 berikutnya.

5.1.b.1) b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2018 terealisasi sebesar Rp364.256.470.509,00 atau 93,49% dari anggaran sebesar Rp389.616.770.000,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp310.534.234.831,00 mengalami kenaikan sebesar Rp53.722.235.678,00 atau turun 17,30%.

Tabel 5.28 Belanja Barang dan Jasa TA 2018

No.	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	10.312.705.000,00	9.391.327.447,00	91,07	8.920.277.052,00
2	Belanja Bahan/Material	15.190.450.000,00	14.313.901.138,00	94,23	10.693.337.913,00
3	Belanja Jasa Kantor	69.814.600.000,00	63.261.135.070,00	90,61	46.635.711.555,00
4	Belanja Premi Asuransi	8.426.371.000,00	6.035.901.868,00	71,63	7.687.460.216,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.244.692.000,00	8.061.065.129,00	78,69	6.490.676.685,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.475.594.000,00	7.663.130.131,00	90,41	6.941.569.455,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.519.695.000,00	1.187.148.150,00	78,12	997.058.000,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	970.381.000,00	803.761.000,00	82,83	704.745.000,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.054.444.000,00	2.588.682.840,00	84,75	2.140.010.720,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	22.311.167.000,00	19.401.358.686,00	86,96	15.809.874.499,00
11	Belanja Pakaian Dinas	1.712.214.000,00	1.432.079.400,00	83,64	656.503.050,00



No.	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
	dan Atributnya				
12	Belanja Pakaian Kerja	591.613.000,00	574.787.250,00	97,16	501.530.550,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.632.029.000,00	1.548.796.900,00	94,90	1.109.188.500,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	35.488.751.000,00	31.500.479.417,00	88,76	28.022.811.460,00
15	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan	15.260.143.000,00	14.226.033.305,00	93,22	16.529.109.689,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	7.681.268.000,00	7.054.795.600,00	91,84	6.143.251.205,00
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.872.387.000,00	1.649.093.694,00	88,07	947.322.339,00
20	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.945.000,00	2.241.870.000,00	93,37	1.668.245.000,00
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	144.269.865.000,00	146.485.462.150,00	101,54	125.579.304.211,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.311.326.000,00	6.573.120.052,00	79,09	4.714.859.076,00
23	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	6.563.221,00	65,63	6.209.997,00
24	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	1.222.910.000,00	1.191.590.000,00	97,44	1.425.200.000,00
25	Belanja Pengembangan Sekolah	2.611.724.000,00	2.057.201.980,00	78,77	2.010.974.400,00
26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.041.762.000,00	931.068.450,00	89,37	800.431.600,00
27	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.189.734.000,00	14.076.117.631,00	92,67	13.338.572.659,00
	JUMLAH	389.616.770.000,00	364.256.470.509,00	93,49	310.534.234.831,00

Berikut ini adalah rincian Belanja Barang dan Jasa per rincian obyek TA 2018:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Tabel 5.29 Belanja Bahan Pakai Habis

No	Belanja Bahan Pakai Habis	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor	6.342.451.000,00	6.013.624.169,00	94,82	5.959.527.745,00
2	Belanja alat listrik dan elektronik	1.004.673.000,00	917.329.700,00	91,31	786.446.850,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos	222.746.000,00	198.426.700,00	89,08	169.234.810,00



No	Belanja Bahan Pakai Habis	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	lainnya				
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	999.425.000,00	981.025.732,00	98,16	799.684.624,00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.407.462.000,00	974.900.666,00	69,27	1.010.049.348,00
6	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	67.684.000,00	64.487.500,00	95,28	64.245.000,00
7	Belanja pengisian tabung gas	119.625.000,00	97.309.000,00	81,35	82.446.000,00
8	Belanja Bahan untuk Sanitasi	1.914.000,00	1.914.000,00	100,00	3.828.000,00
9	Belanja peralatan rumah tangga	146.725.000,00	142.309.980,00	97,00	44.814.675,00
	Jumlah	10.312.705.000,00	9.391.327.447,00	91,07	8.920.277.052,00

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2018 sebesar Rp9.391.327.447,00 atau 91,07% dari anggarannya sebesar Rp10.312.705.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp471.050.394,00 atau naik 5,28%.

2. Belanja Bahan/ Material

Tabel 5.30 Belanja Bahan/ Material

No	Belanja Bahan/ Material	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja bahan baku bangunan	7.465.673.000,00	7.114.844.270,00	95,30	4.913.151.786,00
2	Belanja bahan/bibit tanaman	1.939.180.000,00	1.859.949.850,00	95,91	871.999.850,00
3	Belanja bibit temak	10.250.000,00	8.160.000,00	79,61	4.340.000,00
4	Belanja bahan obat-obatan	1.644.320.000,00	1.460.647.010,00	88,83	1.506.052.766,00
5	Belanja bahan kimia	1.267.432.000,00	1.225.883.100,00	96,72	1.019.870.450,00
6	Belanja persediaan makanan pokok	14.530.000,00	8.879.250,00	61,11	0,00
7	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.153.244.000,00	1.968.703.463,00	91,43	1.763.672.100,00
8	Bahan Percontohan	625.350.000,00	604.215.895,00	96,62	566.563.961,00
9	Belanja bahan pakan ternak	70.471.000,00	62.618.300,00	88,86	47.687.000,00
	Jumlah	15.190.450.000,00	14.313.901.138,00	94,23	10.693.337.913,00

Realisasi Belanja Bahan/Material TA 2018 sebesar Rp14.313.901.138,00 atau 94,23% dari anggarannya sebesar Rp15.190.450.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp3.620.563.225,00 atau naik 33,85%.



3. Belanja Jasa Kantor

Tabel 5.31 Belanja Jasa Kantor

No	Belanja Jasa Kantor	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja telepon	459.458.000,00	237.159.802,00	51,62	309.867.752,00
2	Belanja air	1.317.848.000,00	1.048.272.062,00	79,54	944.647.335,00
3	Belanja listrik	9.862.198.000,00	9.105.426.290,00	92,33	8.734.571.016,00
4	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	10.000.000,00	4.680.000,00	46,80	0,00
5	Belanja surat kabar/majalah	360.569.000,00	292.497.700,00	81,12	274.218.910,00
6	Belanja kawat/faksimili/ internet	3.138.780.000,00	2.915.705.453,00	92,89	1.460.306.280,00
7	Belanja paket/pengiriman	30.269.000,00	18.017.440,00	59,52	21.075.750,00
8	Belanja Sertifikasi	572.357.000,00	483.358.150,00	84,45	381.700.850,00
9	Belanja Jasa Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa Pengemudi	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.852.512.000,00	17.839.371.825,00	94,63	10.101.031.315,00
12	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	8.400.030.000,00	7.848.838.333,00	93,44	6.480.703.424,00
13	Belanja Jasa Pembuat Minum	97.920.000,00	93.640.634,00	95,63	83.900.000,00
14	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.008.185.000,00	2.502.570.000,00	83,19	1.416.826.200,00
15	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	9.830.180.000,00	9.377.128.901,00	95,39	7.438.228.200,00
16	Belanja jasa Kotak Pos	540.000,00	480.000,00	88,89	480.000,00
17	Belanja Papan nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	179.125.000,00	173.475.500,00	96,85	219.027.700,00
18	Belanja vandal/Plakat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.096.370.000,00	1.018.466.830,00	92,89	692.072.350,00
19	Belanja Pensertifikatan Tanah	123.357.000,00	13.640.700,00	11,06	14.141.840,00
20	Belanja Jasa Layanan Internet	290.767.000,00	257.137.370,00	88,43	324.318.733,00
21	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	4.500.000,00	4.500.000,00	100,0	4.385.100,00
22	Belanja Transportasi dan Akomodasi	928.260.000,00	565.632.454,00	60,93	484.709.141,00
23	Belanja Dokumentasi	864.621.000,00	764.482.380,00	88,42	656.579.340,00
24	Belanja Dekorasi	2.455.262.000,00	2.178.622.550,00	88,73	1.442.585.226,00



No	Belanja Jasa Kantor	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
25	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.184.910.000,00	1.063.894.400,00	89,79	937.413.330,00
26	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	295.918.000,00	262.697.194,00	88,77	268.307.645,00
27	Belanja Jasa Bongkar Bangunan	303.175.000,00	255.340.000,00	84,22	0,00
28	Belanja Rujukan Pelayanan Kesehatan	7.000.000,00	0,00	0,00	3.351.500,00
29	Belanja pengganti Uang Transport / uang saku	4.661.495.000,00	4.079.490.000,00	87,51	3.329.754.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	77.500.000,00	15.076.500,00	19,43	32.842.500,00
31	Belanja Kontribusi APEKSI / FORSESDASI	74.000.000,00	50.000.000,00	67,57	50.000.000,00
32	Belanja Pendaftaran Perkara	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah	229.200.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	120.000.000,00	81.040.000,00	67,53	0,00
35	Belanja Penyediaan Beasiswa	179.000.000,00	18.500.000,00	10,34	47.600.000,00
36	Belanja Jasa Pengemudi	784.894.000,00	691.992.602,00	88,16	481.066.118,00
37	Belanja Jasa Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	69.814.600.000,00	63.261.135.070,00	90,61	46.635.711.555,00

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2018 sebesar Rp63.261.135.070,00 atau 90,61% dari anggarannya sebesar Rp69.814.600.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp16.625.423.515,00 atau naik 35,64%.

4. Belanja Premi Asuransi

Tabel 5.32 Belanja Premi Asuransi

No	Belanja Premi Asuransi	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	5.886.620.000,00	5.491.622.000,00	93,29	799.603.130,00
2	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	2.535.000.000,00	539.589.970,00	21,29	6.881.367.186,00
4	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	4.751.000,00	4.689.898,00	98,71	4.689.900,00
	Jumlah	8.426.371.000,00	6.035.901.868,00	71,63	7.687.460.216,00

Realisasi Belanja Premi Asuransi TA 2018 sebesar Rp6.035.901.868,00 atau 71,63% dari anggarannya sebesar Rp8.426.371.000,00. Apabila



dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1.651.558.348,00 atau turun 21,49%. Realisasi Belanja Premi asuransi Kesehatan digunakan untuk membayar iuran peserta BPJS PBI APBD 2 untuk masyarakat Kota Magelang dan belanja premi asuransi kesehatan untuk tenaga honorer/tenaga kontrak dilingkungan Pemerintah Kota Magelang. Belanja Premi asuransi Ketenagakerjaan digunakan untuk membayar premi asuransi ketenagakerjaan bagi tenaga honorer/tenaga kontrak dilingkungan Pemerintah Kota Magelang, sedangkan realisasi belanja Asuransi Kesehatan untuk masyarakat digunakan untuk membayar kekurangan tagihan biaya pelayanan pasien jamkesda di Rumah Sakit tahun 2017

5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Tabel 5.33 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

No.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Service	956.584.000,00	762.141.778,00	79,67	895.766.362,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.694.078.000,00	1.953.740.222,00	72,52	1.433.542.591,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.646.785.000,00	4.688.284.865,00	83,06	3.757.601.287,00
4	Belanja Jasa KIR	30.400.000,00	6.594.470,00	21,69	5.941.670,00
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	517.649.000,00	378.349.825,00	73,09	377.940.225,00
6	Belanja Jasa Bea Balik Nama kendaraan bermotor	12.950.000,00	1.886.500,00	14,57	600.000,00
7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	55.478.000,00	42.462.700,00	76,54	19.284.550,00
8	Belanja jasa perbaikan ringan dan berat	330.768.000,00	227.604.769,00	68,81	0,00
	Jumlah	10.244.692.000,00	8.061.065.129,00	78,69	6.490.676.685,00

Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2018 sebesar Rp8.061.065.129,00 atau 78,69% dari anggarannya sebesar Rp10.244.692.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 meningkat sebesar Rp1.570.388.444,00 atau naik 24,19%

6. Belanja Cetak dan Penggandaan

Tabel 5.34 Belanja Cetak dan Penggandaan

No	Belanja Cetak dan Penggandaan	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Cetak	4.448.618.000,00	4.086.483.446,00	91,86	3.657.683.770,00
2	Belanja Penggandaan	3.483.596.000,00	3.182.505.135,00	91,36	2.872.101.035,00
3	Belanja Penjilidan	540.290.000,00	393.054.050,00	72,75	409.109.650,00
4	Belanja Laminating	3.090.000,00	1.087.500,00	35,19	2.675.000,00
	Jumlah	8.475.594.000,00	7.663.130.131,00	90,41	6.941.569.455,00

Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan TA 2018 sebesar Rp7.663.130.131,00 atau 90,41% dari anggarannya sebesar



Rp8.475.594.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 meningkat sebesar Rp721.560.676,00 atau naik 10,39%.

7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Tabel 5.35 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

No	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.324.695.000,00	1.112.398.150,00	83,97	948.208.000,00
2	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	195.000.000,00	74.750.000,00	38,33	48.850.000,00
	Jumlah	1.519.695.000,00	1.187.148.150,00	78,12	997.058.000,00

Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir TA 2018 sebesar Rp1.187.148.150,00 atau 78,12% dari anggarannya sebesar Rp1.519.695.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 meningkat sebesar Rp190.090.150,00 atau naik 19,07%. Realisasi Belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar Rp1.112.398.150,00 diantaranya digunakan untuk membayar biaya sewa stand penyelenggaraan pameran yang dilaksanakan didalam daerah dan luar Kota Magelang, sedangkan realisasi belanja sewa ruang rapat/pertemuan diantaranya digunakan untuk membayar sewa ruang rapat kegiatan reses dll.

8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Tabel 5.36 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

No	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	970.381.000,00	803.761.000,00	82,83	704.745.000,00
2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	970.381.000,00	803.761.000,00	82,83	704.745.000,00

Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas TA 2018 sebesar Rp803.761.000,00 atau 82,83% dari anggarannya sebesar Rp970.381.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 meningkat sebesar Rp99.016.000,00 atau naik 14,05%. Realisasi belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp803.761.000,00 digunakan untuk membayar sewa kendaraan penyelenggaraan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.

9. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Tabel 5.37 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

No.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja sewa meja kursi	501.689.000,00	420.995.750,00	83,92	277.342.270,00



No.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja sewa komputer dan printer	14.700.000,00	13.100.000,00	89,12	0,00
3	Belanja sewa proyektor	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja sewa generator	161.510.000,00	154.232.090,00	95,49	110.351.600,00
5	Belanja sewa tenda	395.915.000,00	338.915.000,00	85,60	171.744.200,00
6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	566.719.000,00	430.671.150,00	75,99	436.102.250,00
7	Belanja sewa tenda/karpet/ tikar	467.143.000,00	403.542.000,00	86,39	480.649.600,00
8	Belanja sewa <i>sound system</i>	707.915.000,00	611.693.500,00	86,41	451.934.800,00
9	Belanja sewa alat praktek	64.150.000,00	60.950.000,00	95,01	37.330.000,00
10	Belanja sewa peralatan makan dan minum	31.513.000,00	17.442.500,00	55,35	35.282.000,00
11	Belanja sewa alat alat kesenian	143.190.000,00	137.140.850,00	95,78	139.274.000,00
	Jumlah	3.054.444.000,00	2.588.682.840,00	84,75	2.140.010.720,00

Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor TA 2018 sebesar Rp2.588.682.840,00 atau 84,75 % dari anggarannya sebesar Rp3.054.444.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 meningkat sebesar Rp448.672.120.000,00 atau naik 20,96%.

10. Belanja Makanan dan Minuman

Tabel 5.38 Belanja Makanan dan Minuman

No	Belanja Makanan dan Minuman	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.406.562.000,00	1.235.035.551,00	87,81	1.009.501.071,00
2	Belanja makanan dan minuman rapat	15.192.947.000,00	13.110.933.535,00	86,30	10.896.181.530,00
3	Belanja makanan dan minuman tamu	4.451.913.000,00	3.929.869.222,00	88,27	3.188.458.648,00
4	Belanja makanan dan minuman pelatihan	659.880.000,00	589.301.500,00	89,30	328.559.000,00
5	Belanja makanan dan minuman pasien	327.017.000,00	303.653.128,00	92,86	245.201.250,00
6	Belanja Makanan dan minuman petugas piket	272.848.000,00	232.565.750,00	85,24	141.973.000,00
	JUMLAH	22.311.167.000,00	19.401.358.686,00	86,96	15.809.874.499,00

Realisasi Belanja Makanan dan Minuman TA 2018 sebesar Rp19.401.358.686,00 atau 86,96% dari anggarannya sebesar Rp22.311.167.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 naik sebesar Rp3.591.484.187.000,00 atau naik 22,72%.

**11. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**

Tabel 5.39 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

No	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	100.000.000,00	83.000.000,00	83,00	93.230.000,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	93.960.000,00	92.547.400,00	98,50	103.982.600,00
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	71.500.000,00	70.875.000,00	99,13	12.375.000,00
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	132.836.000,00	123.957.000,00	93,32	44.575.000,00
5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	29.040.000,00	29.040.000,00	100,0	29.040.000,00
6	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.117.020.000,00	871.365.000,00	78,01	147.828.050,00
7	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	124.108.000,00	118.670.000,00	95,62	139.722.400,00
8	Belanja Pakaian Sipil Resmi	43.750.000,00	42.625.000,00	97,43	85.750.000,00
9	Belanja Pakaian Dinas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.712.214.000,00	1.432.079.400,00	83,64	656.503.050,00

Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya TA 2018 sebesar Rp1.432.079.400,00 atau 83,64% dari anggarannya sebesar Rp1.712.214.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 meningkat Rp775.576.350,00 atau naik 118,14%.

12. Belanja Pakaian Kerja

Tabel 5.40 Belanja Pakaian Kerja

No	Belanja Pakaian Kerja	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja pakaian kerja lapangan	537.600.000,00	523.216.500,00	97,32	475.694.300,00
2	Belanja pakaian kerja PMK	54.013.000,00	51.570.750,00	95,48	25.836.250,00
	Jumlah	591.613.000,00	574.787.250,00	97,16	501.530.550,00

Realisasi Belanja Pakaian Kerja TA 2018 sebesar Rp574.787.250,00 atau 97,16% dari anggarannya sebesar Rp591.613.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 meningkat sebesar Rp73.256.700,00 atau naik 14,61%.

13. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Tabel 5.41 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

No	Belanja Pakaian Khusus	Tahun 2017	Tahun 2017
----	------------------------	------------	------------



	dan Hari-hari Tertentu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja pakaian KORPRI	3.300.000,00	1.100.000,00	33,33	2.300.000,00
2	Belanja pakaian adat daerah	71.250.000,00	66.250.000,00	92,98	35.000.000,00
3	Belanja pakaian batik tradisional	114.750.000,00	109.525.000,00	95,45	168.725.000,00
4	Belanja pakaian olahraga	1.438.379.000,00	1.371.171.900,00	95,33	903.163.500,00
5	Belanja Pakaian Pramuka	4.350.000,00	750.000,00	17,24	0,00
	Jumlah	1.632.029.000,00	1.548.796.900,00	94,90	1.109.188.500,00

Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu TA 2018 sebesar Rp1.548.796.900,00 atau 94,90% dari anggarannya sebesar Rp1.632.029.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp439.608.400.000,00 atau naik 39,63%.

14. Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 5.42 Belanja Perjalanan Dinas

No	Belanja perjalanan dinas	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.488.751.000,00	31.500.479.417,00	88,76	27.794.549.631,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	228.261.829,00
	Jumlah	35.488.751.000,00	31.500.479.417,00	88,76	28.022.811.460,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2018 sebesar Rp31.500.479.417,00 atau 88,76% dari anggarannya sebesar Rp35.488.751.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 meningkat sebesar Rp3.477.667.957,00 atau naik 12,41%.

15. Belanja Pemeliharaan

Tabel 5.43 Belanja Pemeliharaan

No	Belanja Pemeliharaan	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.462.329.000,00	2.405.376.813,00	97,69	2.182.012.600,00
2	Belanja Pemeliharaan Jembatan	14.580.000,00	14.447.000,00	99,09	155.525.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah	97.132.000,00	96.444.000,00	99,29	270.656.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	2.165.280.000,00	1.747.703.368,00	80,71	1.616.140.705,00
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.554.004.000,00	5.251.822.610,00	94,56	6.066.379.447,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	157.515.000,00	143.352.000,00	91,01	182.275.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Belanja Pemeliharaan	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	949.543.000,00	869.378.136,00	91,56	2.253.465.400,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	3.449.010.000,00	3.333.410.478,00	96,65	3.068.588.287,00
10	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu	21.250.000,00	21.175.000,00	99,65	116.919.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Jaringan	389.500.000,00	342.923.900,00	88,04	617.148.250,00
	Jumlah	15.260.143.000,00	14.226.033.305,00	93,22	16.529.109.689,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2018 sebesar Rp14.226.033.305,00 atau 93,22% dari anggarannya sebesar Rp15.260.143.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 turun sebesar Rp2.303.076.384,00 atau turun 13,93%.

16. Belanja Jasa Konsultasi

Tabel 5.44 Belanja Jasa Konsultasi

No	Belanja Jasa Konsultasi	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	1.729.030.000,00	1.550.186.000,00	89,66	1.423.449.600,00
2	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	5.403.878.000,00	5.107.114.400,00	94,51	4.214.907.605,00
3	Belanja jasa Konsultasi Pengawasan	189.360.000,00	90.381.000,00	47,73	167.116.000,00
4	Belanja jasa Konsultasi Penilai	359.000.000,00	307.114.200,00	85,55	337.778.000,00
	Jumlah	7.681.268.000,00	7.054.795.600,00	91,84	6.143.251.205,00

Realisasi Belanja Jasa Konsultasi TA 2018 sebesar Rp7.054.795.600,00 atau 91,84% dari anggarannya sebesar Rp7.681.268.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 meningkat sebesar Rp911.544.395,00 atau naik 14,84%.

17. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Tabel 5.45 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

No	Belanja beasiswa Pendidikan PNS	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja beasiswa tugas belajar S1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja beasiswa tugas belajar S2	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
3	Belanja beasiswa tugas belajar, belanja bantuan ijin belajar, bantuan penelitian dan studi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00



Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2018 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dan tidak ada anggarannya. Realisasi tahun 2017 sebesar Rp60.000.000,00.

18. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Tabel 5.46 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

No	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1.751.387.000,00	1.559.033.050,00	89,02	748.844.389,00
2	Belanja sosialisasi	46.000.000,00	28.849.200,00	62,72	43.318.291,00
3	Belanja bimbingan teknis	75.000.000,00	61.211.444,00	81,62	155.159.659,00
	Jumlah	1.872.387.000,00	1.649.093.694,00	88,07	947.322.339,00

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2018 sebesar Rp1.649.093.694,00,00 atau 88,07% dari anggarannya sebesar Rp1.872.387.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp701.771.355,00 atau naik 74,08%.

19. Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat

Tabel 5.47 Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat

No	Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Uang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.400.945.000,00	2.241.870.000,00	93,37	1.668.245.000,00
	Jumlah	2.400.945.000,00	2.241.870.000,00	93,37	1.668.245.000,00

Realisasi Belanja Uang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2018 sebesar Rp2.241.870.000,00 atau 93,37% dari anggarannya sebesar Rp2.400.945.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp573.625.000,00 atau naik 34,38%. Realisasi Belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat digunakan untuk hadiah lomba pada perlombaan kegiatan Perangkat Daerah.

20. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Tabel 5.48 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit

No	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	136.556.261.000,00	141.293.538.202,00	103,47	120.503.029.047,00



	Rumah Sakit				
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMA S	7.713.604.000,00	5.191.923.948,00	67,31	5.076.275.164,00
	Jumlah	144.269.865.000,00	146.485.462.150,00	101,53	125.579.304.211,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2018 sebesar Rp146.485.462.150,00 atau 101,53% dari anggarannya sebesar Rp144.269.865.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 meningkat sebesar Rp20.906.157.939,00 atau naik 16,65%.

21. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Tabel 5.49 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

No	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.311.326.000,00	6.573.120.052,00	79,09	4.714.859.076,00
	Jumlah	8.311.326.000,00	6.573.120.052,00	79,09	4.714.859.076,00

Realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber TA 2018 sebesar Rp6.573.120.052,00 atau 79,09% dari anggarannya sebesar Rp8.311.326.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 meningkat sebesar Rp1.858.260.976,00 atau naik 39,41%.

22. Belanja Ijin Operasional Radio

Tabel 5.50 Belanja Ijin Operasional

No	Belanja Ijin Operasional	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	6.563.221,00	65,63	6.209.997,00
	Jumlah	10.000.000,00	6.563.221,00	65,63	6.209.997,00

Realisasi Belanja Ijin Operasional TA 2018 sebesar Rp6.563.221,00 atau 65,63% dari anggarannya sebesar Rp10.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp353.224,00 atau naik 5,69%. Realisasi belanja digunakan untuk pembayaran ijin penyiaran radio.

23. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS

Tabel 5.51 Belanja Ijin Operasional

No	Belanja Ijin Operasional	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	1.222.910.000,00	1.191.590.000,00	97,44	1.425.200.000,00
	Jumlah	1.222.910.000,00	1.191.590.000,00	97,44	1.425.200.000,00



Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS TA 2018 sebesar Rp1.191.590.000,00 atau 97,44% dari anggarannya sebesar Rp1.222.910.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp233.610.000,00 atau turun 16,39%.

24. Belanja Pengembangan Sekolah

Tabel 5.52 Belanja Pengembangan Sekolah

No	Belanja Pengembangan Sekolah	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Seragam Sekolah	2.003.680.000,00	1.657.644.450,00	82,73	1.700.572.000,00
2	Belanja Peralatan Sekolah	7.688.000,00	3.990.000,00	51,90	11.604.000,00
3	Belanja Pendaftaran/luran	600.356.000,00	395.567.530,00	65,89	298.798.400,00
	Jumlah	2.611.724.000,00	2.057.201.980,00	78,77	2.010.974.400,00

Realisasi Belanja Pengembangan Sekolah TA 2018 sebesar Rp2.057.201.980,00 atau 78,77% dari anggarannya sebesar Rp2.611.724.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp46.227.580,00 atau naik 2,30%.

25. Belanja Peralatan dan Perlengkapan

Tabel 5.53 Belanja Peralatan dan Perlengkapan

No	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Peralatan Kantor	4.723.000,00	4.723.000,00	100,00	12.000.000,00
2	Belanja Perlengkapan Kantor	16.840.000,00	14.765.250,00	87,68	148.794.000,00
3	Belanja Buku Bacaan	975.199.000,00	884.080.200,00	90,66	639.637.600,00
4	Belanja Peralatan Perhubungan	45.000.000,00	27.500.000,00	61,11	0,00
	Jumlah	1.041.762.000,00	931.068.450,00	89,37	800.431.600,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Perlengkapan TA 2018 sebesar Rp931.068.450,00 atau 89,37% dari anggarannya sebesar Rp1.041.762.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp130.636.850,00 atau naik 16,32%.

26. Belanja Barang dan Jasa BOS

Tabel 5.54 Belanja Barang dan Jasa BOS

No	Belanja Barang dan Jasa BOS	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.189.734.000,00	14.076.117.631,00	92,67	13.338.572.659,00
	Jumlah	15.189.734.000,00	14.076.117.631,00	92,67	13.338.572.659,00



Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2018 sebesar Rp14.076.117.631,00 atau 92,67% dari anggarannya sebesar Rp15.189.734.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp737.544.972,00 atau naik 5,52%.

5.1.b.1) c) Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2018 terealisasi sebesar Rp10.447.285.378,00 atau 95,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.886.043.000,00. Belanja Hibah TA 2018 diberikan kepada Badan/Lembaga/Orang Swasta, Hibah kepada Kelompok Masyarakat dan Hibah kepada Sekolah. Besaran Realisasi Belanja Hibah TA 2018 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5.55 Belanja Hibah TA 2018

No.	Uraian Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Orang Swasta	2.796.049.000,00	2.602.029.378,00	93,06	1.417.740.000,00
3	Belanja Hibah Kepada Sekolah	8.089.994.000,00	7.845.256.000,00	96,97	6.968.155.620,00
4	Hibah kepada kelompok masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hibah Pemilu KDH dan Wakil KDH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA HIBAH	10.886.043.000,00	10.447.285.378,00	95,97	8.385.895.620,00

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (PPKD) dengan realisasi sebesar Rp2.602.029.378,00 merupakan hibah berupa uang yang diberikan kepada :

- 1) Badan Zakat Amil Nasional Kota Magelang sebesar Rp179.895.659,00
- 2) KONI Kota Magelang sebesar Rp2.236.133.719,00
- 3) Pramuka Kwartir Cabang 11.30 Kota Magelang sebesar Rp136.000.000,00
- 4) ORARI Kota Magelang sebesar Rp50.000.000,00

Hibah kepada Sekolah dengan realisasi sebesar Rp7.845.256.00,00 atau 96,97% dari Anggaran Rp8.089.994.000,00 merupakan hibah berupa uang yang diberikan kepada sekolah swasta yang terdiri dari 9 SMP Swasta, 16 Sekolah dasar swasta dan 126 TK/KB/PAUD/POS PAUD di Kota Magelang.

Tabel 5.56 Realisasi Hibah Sekolah TA 2018

No.	Uraian Belanja	Jml Sekolah	Anggaran 2018 (Rp)	Jml Sekolah	Realisasi 2017 (Rp)	%
1	TK/KB/PAUD/Pos PAUD	116	3.198.400.000,00	116	3.459.039.000,00	93,00
2	SD Swasta	16	2.365.640.000,00	16	1.720.362.092,00	137,51
3	SMP Swasta	9	2.281.216.000,00	10	1.787.835.528,00	127,60
	JUMLAH BELANJA HIBAH		7.845.256.000,00		6.967.236.620,00	112,60

**5.1.b.1) d) Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 direalisasikan sebesar Rp6.698.273.000,00 atau sebesar 85,54% dari anggaran sebesar Rp7.830.678.000,00. Belanja bantuan sosial tersebut diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Anggota Masyarakat dan Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan. Besaran Belanja Bantuan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.57 Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018

Uraian Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat				
- Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00
Jumlah (A)	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00
Belanja Sosial kepada Anggota Masyarakat				
- Bantuan Sosial kepada masyarakat	6.901.778.000,00	6.080.398.000,00	88,10	4.386.411.000,00
Jumlah (B)	6.901.778.000,00	6.080.398.000,00	88,10	4.386.411.000,00
Belanja Sosial yang Tidak Direncanakan				
- Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	776.100.000,00	473.000.000,00	60,95	470.000.000,00
Jumlah (C)	776.100.000,00	473.000.000,00	60,95	470.000.000,00
Belanja Sosial Barang Yang Diserahkan Ke Masy				
- Bantuan Sosial Berupa Barang diserahkan ke masyarakat	82.800.000,00	74.875.000,00	90,43	36.459.000,00
Jumlah (D)	82.800.000,00	74.875.000,00	90,43	36.459.000,00
JUMLAH A+B+C+D	7.830.678.000,00	6.698.273.000,00	85,54	4.962.870.000,00

Belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah bantuan santunan kematian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia (almarhum/almarhumah) bagi warga miskin di Kota Magelang yang besarnya adalah Rp1.000.000,00 per pemohon.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa Barang yang diserahkan ke Masyarakat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp74.875.000,00 atau 90,43% dari anggaran sebesar Rp82.800.000,00 merupakan Bantuan Sosial berupa Kursi roda, Alat bantu dengar, Bris, Kaki Palsu (Protase), Gerobag Aluminium, Mesin Itik-itik, Mesin Jahit dan Mesin Obras Besar yang diberikan untuk Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Cacat

JENIS	Anggaran		Realisasi		Keterangan
Kursi roda	14	19.700.000,00	13	17.100.000,00	1 orang meninggal dunia
Alat bantu dengar	2	1.600.000,00	1	400.000,00	1 orang meninggal dunia
Kaki Palsu (Protase)	4	25.500.000,00	4	24.525.000,00	-
Bris	2	18.000.000,00	2	14.850.000,00	



Mesin Jahit	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	
Mesin Obras	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	
Mesin Itik-itik	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	
Gerobag Aluminium	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	
JUMLAH	26	82.800.000,00	24	74.875.000,00	

5.1.b.2) Belanja Modal

Belanja Modal Kota Magelang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya dan Belanja Aset Tak Berwujud dengan realisasi TA 2018 dan 2017, sebagai berikut:

Tabel 5.59 Belanja Aset Lainnya dan Belanja Aset Tak Berwujud dengan realisasi TA 2018 dan 2017

Belanja Modal:	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tanah	23.868.391.000,00	15.078.648.890,00	63,17	1.476.985.650,00
Peralatan & Mesin	56.133.385.000,00	50.034.279.487,00	89,13	83.664.119.327,00
Bangunan dan Gedung	120.743.116.000,00	99.301.309.579,00	82,24	91.270.842.710,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	77.758.715.000,00	70.172.294.944,00	90,24	53.058.480.055,00
Aset Tetap Lainnya	1.926.383.000,00	1.391.667.188,00	72,24	2.683.803.267,00
Aset Tak Berwujud	1.548.836.000,00	1.444.714.105,00	93,28	916.725.623,00
Jumlah Belanja Modal	281.978.826.000,00	237.422.914.193,00	84,20	233.070.956.632,00

Belanja Modal TA 2018 terealisasi sebesar Rp237.422.914.193,00 atau 84,20% dari anggaran sebesar Rp281.978.826.000,00. Dan jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp233.070.956.632,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.351.957.561,00 atau realisasi mengalami kenaikan sebesar 1,87%. Uraian selanjutnya untuk Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.b.2) a) Belanja Modal Tanah

Untuk Tahun 2018 Pemerintah Kota Magelang menganggarkan Belanja Modal Tanah sebesar Rp23.868.391.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.078.648.890,00 atau sebesar 63,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.476.985.650,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.601.663.240,00 atau 920,91%.

Tabel 5.60 Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
BM TANAH				
- Tanah untuk bangunan perumahan/ tempat tinggal	14.638.391.000,00	13.216.163.200,00	90,84	0,00
- Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	3.230.000.000,00	32.430.080,00	1,00	379.578.000,00
- Tanah Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.030.897.000,00



Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
jalan dan jembatan				
- Tanah Untuk Bangunan jalan	6.000.000.000,00	1.830.055.610,00	30,50	66.510.650,00
JUMLAH BM TANAH	23.868.391.000,00	15.078.648.890,00	63,17	1.476.985.650,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp13,216,163,200,00 terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan rincian sebesar Rp8.607.128.000,00 untuk pengadaan tanah di Kelurahan Wates dan sebesar Rp4.609.035.200,00 untuk pematangan lahan.

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.830.055.610,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengadaan tanah untuk bangunan jalan akses masuk menuju Tempat Penampungan Sampah (TPS) Bojong .

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp32.430.080,00 terdapat pada Dinas Perhubungan.

5.1.b.2) b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 direalisasikan sebesar Rp50.034.279.487,00 atau 89,13% dari anggarannya sebesar Rp56.133.385.000,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp83.695.014.076,00 mengalami penurunan sebesar Rp33.660.734.589,00 atau mengalami penurunan sebesar 40,22%. Adapun Rincian belanja Modal peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.61 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
BM PERALATAN DAN MESIN				
- Alat Besar Darat	456.265.000,00	452.283.000,00	99,12	2.413.046.850,00
- Alat-Alat Besar/ Alat Bantu	1.333.795.000,00	1.145.245.623,00	85,86	1.829.253.755,00
- Alat-Alat Angkutan	6.482.709.000,00	6.020.663.700,00	92,87	4.938.620.918,00
- Alat Bengkel	11.750.000,00	10.989.416,00	93,53	66.609.380,00
- Alat Ukur	624.217.000,00	518.633.400,00	83,08	567.565.800,00
- Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	587.164.000,00	509.131.200,00	86,71	76.481.204,00
- Alat-Alat Kantor	2.540.599.000,00	2.220.497.040,00	87,40	3.356.825.524,00
- Alat Rumah Tangga	7.509.894.000,00	7.071.215.703,00	94,16	8.310.564.899,00
- Komputer	7.589.043.000,00	7.005.504.470,00	92,31	10.963.056.608,00
- Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	356.004.000,00	330.599.050,00	92,86	541.390.590,00
- Alat Studio	756.562.000,00	740.140.650,00	97,83	687.852.209,00
- Alat Komunikasi	375.905.000,00	339.835.200,00	90,40	731.425.769,00
- Peralatan Pemancar	64.434.000,00	60.267.700,00	93,53	0,00
- Alat Kedokteran	16.032.219.000,00	14.756.981.091,00	92,05	37.071.961.487,00
- Alat Kesehatan	662.950.000,00	612.340.194,00	92,37	6.161.370.646,00
- Alat Laboratorium	4.035.573.000,00	3.355.495.273,00	83,15	2.511.833.700,00
- Alat Peraga/ Praktek Sekolah	879.500.000,00	734.789.500,00	83,55	197.997.000,00



Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
- Alat Radiasi	0,00	0,00		57.169.600,00
- Alat laboratorium Lingkn Hidup	142.006.000,00	110.101.000,00	77,53	0,00
- Alat Keamanan	373.654.000,00	357.760.100,00	95,74	687.751.780,00
- Peralatan dan Mesin BLUD	2.439.958.000,00	1.763.420.769,00	72,27	980.862.089,00
- Peralatan dan Mesin BOS	2.879.184.000,00	1.918.385.408,00	66,63	1.512.479.519,00
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	56.133.385.000,00	50.034.279.487,00	89,13	83.664.119.327,00

5.1.b.2) c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 direalisasikan sebesar Rp99.301.309.579,00 atau 82,24% dari anggarannya sebesar Rp120.743.116.000,00, dan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp91.263.642.710,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.037.666.869,00 atau naik sebesar 8,81%.

Tabel 5.62 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018

No	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.118.369.000,00	4.005.769.900,00	97,27	16.516.647.280,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	125.000.000,00	124.336.000,00	99,47	258.317.250,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	1.167.183.300,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	224.128.000,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	76.409.945.000,00	57.977.517.793,00	75,88	5.605.811.150,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	83.670.000,00	81.030.000,00	96,84	0,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	29.929.000,00	99,76	0,00
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.774.797.000,00	3.723.389.000,00	98,64	1.516.385.000,00
9	Belanja Modal Gedung	17.630.792.000,00	16.825.056.250,00	95,43	16.573.395.500,00



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
	dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga				
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pas ar	1.625.357.000,00	1.400.001.000,00	86,13	2.712.676.950,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	481.323.000,00	478.232.000,00	99,39	49.680.000,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	479.985.000,00	475.500.000,00	99,07	542.067.400,00
13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	18.000.000,00	13.458.500,00	74,77	281.006.173,00
14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	91.530.000,00	89.266.000,00	97,53	195.888.000,00
15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Museum	14.500.000,00	14.316.000,00	98,73	190.597.000,00
16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Ban dar	172.150.000,00	141.201.000,00	82,02	2.483.481.950,00
17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.697.459.000,00	2.630.082.775,00	97,50	2.523.031.262,00
18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	5.377.157.000,00	5.183.004.000,00	96,39	7.120.937.250,00
20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Menara Perambuan Penerang Pantai	640.131.000,00	530.793.323,00	82,92	0,00
21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	205.765.000,00	186.419.000,00	90,60	392.378.600,00
22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	3.334.517.000,00	3.077.501.250,00	92,29	39.699.000,00



No	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	736.120.250,00
24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	3.330.460.700,00
25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	561.294.000,00	511.672.447,00	91,16	1.438.656.305,00
26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	1.977.366.000,00	989.803.391,00	50,06	20.972.869.100,00
27	Konstruksi Taman	894.009.000,00	813.030.950,00	90,94	6.392.225.290,00
28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BOS	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
	JUMLAH TOTAL	120.743.116.000,00	99.301.309.579,00	82,24	91.270.842.710,00

5.1.b.2) d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 sebesar Rp70.172.294.944,00 atau 90,24% dari anggaran sebesar Rp77.758.715.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp53.058.480.055,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.113.814.889,00 atau naik sebesar 32,25%.

Tabel 5.63 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018

No	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	37.537.446.000,00	34.050.880.318,00	90,71	25.974.074.779,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	7.686.297.000,00	6.818.284.100,00	88,71	5.551.744.360,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	4.267.741.000,00	4.154.017.700,00	97,34	626.840.300,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	530.442.750,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	0,00	0,00	0,00	420.447.350,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	37.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	0,00	0,00	95,69	16.047.900,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan	0,00	0,00	0,00	24.190.650,00



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air				
9	Bangunan Pengambilan pelengkap air bersih / air baku	1.652.000.000,00	1.613.489.000,00	97,67	0,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.438.097.000,00	1.995.937.226,00	81,86	1.831.928.020,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100	0,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	22.572.619.000,00	20.234.683.300,00	89,64	16.247.077.796,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	276.937.000,00	269.692.900,00	97,38	135.536.000,00
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	0,00	0,00	0,00	196.966.000,00
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	123.353.000,00	118.956.000,00	96,44	0,00
16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	401.075.000,00	375.057.000,00	93,51	0,00
17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	0,00	0,00	158.341.750,00
18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan air Minum Sambungan ke rumah	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00	0,00
19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	0,00	236.531.250,00
20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00	62.423.350,00
22	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	483.400.000,00	440.047.400,00	91,03	965.834.800,00
23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	0,00	0,00	67,37	37.403.000,00
24	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di Bawah Tanah	0,00	0,00	67,72	3.386.000,00
25	Belanja Modal Jalan, Irigasi	180.000.000,00	0,00	0,00	37.264.000,00



No	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
	dan Jaringan - BLUD				
	JUMLAH TOTAL	77.758.715.000,00	70.172.294.944,00	90,24	53.058.480.055,00

5.1.b.2) e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar Rp1.391.667.000,00 atau 91,37% dari anggarannya sebesar Rp724.594.188,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.926.383.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.233.785.830,00 atau turun 46,99%.

Tabel 5.64 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018

No.	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	16.936.000,00	16.827.720,00	99,36	674.555.500,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	7.936.000,00	7.897.760,00	99,52	4.635.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	13.436.000,00	13.273.040,00	98,79	14.085.500,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	31.256.000,00	30.796.500,00	98,53	25.517.900,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	30.722.000,00	30.654.628,00	99,78	21.809.500,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	33.660.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	14.234.000,00	13.135.120,00	92,28	10.550.300,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	7.336.000,00	7.096.480,00	96,74	4636.000,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	15.836.000,00	15.753.440,00	99,48	14.597.500,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artefacts and Realita	69.500.000,00	68.150.000,00	98,06	0,00
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara	0,00	0,00	0,00	0,00



No.	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	0,00	0,00	0,00	20.548.000,00
13	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	202.925.000,00	187.281.550,00	92,29	0,00
16	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	0,00	0,00	0,00	74.950.000,00
18	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olahraga Senam	0,00	0,00	0,00	24.196.000,00
19	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
20	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	314.477.000,00	271.166.750,00	86,23	465.571.200,00
21	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BO	1.201.789.000,00	729.634.200,00	60,71	1.291.190.867,00
	JUMLAH TOTAL	1.926.383.000,00	1.391.667.188,00	72,24	2.683.803.267,00

5.1.b.2) f) Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud TA 2018 sebesar Rp1.444.714.105,00 atau 93,28% dari anggarannya sebesar Rp1.548.836.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp916.725.623,00 mengalami kenaikan belanja sebesar Rp527.988.482,00 atau 57,60%.

Tabel 5.65 Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud TA 2018

No.	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	%	REALISASI 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	1.548.836.000,00	1.444.714.105,00	93,28	916.725.623,00
2	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/ Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TOTAL	1.548.836.000,00	1.444.714.105,00	93,28	916.725.623,00

5.1.b.3) Belanja Tak Terduga



Tabel 5.66 Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	5.862.940.000,00	0,00	0,00	130.744.540,00

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan penanggulangan tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Belanja Tak Terduga TA 2018 dianggarkan sebesar Rp5.862.940.000,00 dan realisasinya Rp0,00, sedangkan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2017 sebesar Rp130.744.540,00. Dana Tak Terduga TA 2017 untuk mengembalikan Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 ke Rekening Kas Umum Negara berdasarkan PMK 187/PMK 07/2016.

5.1.c. TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain. termasuk dana perimbangan dan bagi hasil. Transfer terbagi dalam dua jenis yaitu transfer masuk dan transfer keluar. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. misal penerimaan perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil. Sedangkan transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Sesuai dengan Mapping Kode Rekening Akrual Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 untuk rekening Belanja Bantuan Keuangan berganti menjadi akun Tranfer, sub akun Transfer Bantuan Keuangan. Untuk realisasi transfer Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.67 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

TRANSFER :	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan	660.703.000,00	660.702.300,00	100,00	560.702.300,00
Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Tranfer Bantuan Keuangan Lainnya	560.703.000,00	560.702.300,00	100,00	560.702.300,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Bantuan Keuangan untuk Propinsi Sulawesi Tengah.

Realiasi transfer bantuan keuangan lainnya untuk tahun 2018 terealisasi sebesar Rp560.702.300,00 atau sebesar 100,00% dari anggarannya. Adapun pengeluaran transfer tersebut adalah merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada 8 (delapan partai politik) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68 Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik

No	Partai Politik	Nilai (Rp)
----	----------------	------------



No	Partai Politik	Nilai (Rp)
1.	Partai Golongan Karya	81.126.200,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00
4.	Partai Amanat Nasional	43.595.600,00
5.	Partai Hati Nurani Rakyat	52.861.300,00
6.	Partai Keadilan Sejahtera	50.079.100,00
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.300,00
8.	Partai Demokrat	60.108.100,00
9.	Partai Nasional Demokrat	26.631.700,00
	Jumlah	560.702.300,00

5.1.d. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 dan 2017, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.69 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan:	2018		%	2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	184.770.764.000,00	184.727.834.875,00	99,98	165.042.740.403,00
Pengeluaran Pembiayaan	21.062.774.000,00	21.062.774.000,00	100,00	14.167.657.000,00
Pembiayaan Netto	163.707.990.000,00	163.665.060.875,00	99,97	150.875.083.403,00

Penerimaan Pembiayaan TA 2018 terealisasi sebesar Rp184.727.834.875,00 atau 99,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp184.770.764.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp19.685.094.472,00 atau naik 11,93%.

Pengeluaran pembiayaan TA 2018 direalisasikan sebesar Rp21.062.774.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp21.062.774.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 naik sebesar Rp6.895.117.000,00 atau 48,67%.

5.1.d.1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.70 Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2017 dan 2018

Penerimaan Pembiayaan	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penggunaan SILPA	180.992.764.000,00	180.992.764.876,00	100,00	162.344.899.952,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00



Penerimaan Pembiayaan	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	3.778.000.000,00	3.735.069.999,00	98,86	2.697.840.451,00
Penerimaan Hasil Penarikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	184.770.764.000,00	184.727.834.875,00	99,98	165.042.740.403,00

Penggunaan SILPA sebesar Rp180.992.764.876,00 adalah penggunaan SILPA tahun 2017

Penerimaan kembali investasi non permanen tahun 2018 adalah penerimaan yang berasal dari :

-Penerimaan dari AMU Bank Jateng	Rp3.728.000.000,00
-Penerimaan dana bergulir IKM dan UKM Koperasi	Rp 360.000,00
-Penerimaan dana bergulir IKM dan UKM LPT	Rp 6.709.999,00
	Rp3.735.069.999,00

5.1.d.2) Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran Pembiayaan TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.71 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 dan 2017

Pengeluaran Pembiayaan	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi)	21.062.774.000,00	21.062.774.000,00	100,00	14.167.657.000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	21.062.774.000,00	21.062.774.000,00	82,52	14.167.657.000,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp21.062.774.000,00 terdiri dari:

- PT Bank Pembangunan Pembangunan Daerah Kota Magelang (Bank Jateng) sebesar Rp8.500.000.000,00
- BPR Bank Magelang sebesar Rp3.000.000.000,00
- PDOW Taman Kyai Langgeng sebesar Rp2.500.000.000,00
- BKK Kota Magelang sebesar Rp500.000.000,00
- Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang sebesar Rp6.562.774.000,00.

5.1.e. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam TA 2018 sebesar Rp134.408.800.314,00 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto. SiLPA ini terdiri dari:

Total Pendapatan	Rp	908.089.485.909,00
------------------	----	--------------------



Total Belanja	Rp	936.685.044.170,00
Total Transfer	Rp	660.702.300,00 (-)
Surplus/Defisit	Rp	(29.256.260.561,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	184.727.834.875,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	21.062.774.000,00 (-)
Pembiayaan Neto	Rp	163.665.060.875,00
SiLPA (Surplus/Defisit+Pembiayaan Netto)	Rp	134.408.800.314,00

SiLPA sebesar Rp134.408.800.314,00 tersebut terdiri dari SiLPA terikat sebesar Rp45.302.157.841,00 dan SiLPA tidak terikat sebesar Rp89.106.642.473,00 termasuk didalamnya SiLPA RSUD Tahun 2018 sebesar Rp12.228.792.156,00.

SiLPA terikat terdiri dari:

- Sisa Dana Alokasi Khusus sebesar Rp14.010,755,991,00
Sisa Dana Alokasi Khusus sebesar Rp14.010,755,991,00 terdiri dari :
 - Sisa DAK s/d Tahun 2016 Rp 10.860.569.766,00
 - Sisa DAK Reguler dan Penugasan 2017 Rp 710.325.124,00
 - Sisa DAK Reguler dan Penugasan 2018 Rp 449.982.621,00
 - Sisa DAK Non Fisik (BOP PAUD, BOK, BOKB dan Adminduk Rp 1.989.878.480,00

Sisa DAK Fisik Tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Sisa DAK Reguler Tahun 2018

Jenis DAK	Alokasi 2018 (Rp)	Penyaluran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Silpa (Rp)
DAK FISIK	65.017.300.000,00	61.667.899.074,00	61.217.916.453,00	449.982.621,00
DAK REGULER	13.262.409.000,00	12.069.965.674,00	11.771.346.443,00	298.619.231,00
-Pendidikan	2.496.554.000,00	2.294.240.200,00	2.274.652.200,00	19.588.000,00
Pendidikan SD	1.330.000.000,00	1.295.279.000,00	1.275.691.000,00	19.588.000,00
Pendidikan SMP	1.166.554.000,00	998.961.200,00	998.961.200,00	0,00
-Kesehatan	6.169.366.000,00	5.792.414.474,00	5.737.947.340,00	54.467.134,00
Pelayanan Dasar	4.167.577.000,00	4.083.763.167,00	4.080.418.167,00	3.345.000,00
Pelayanan Farmasi	1.487.756.000,00	1.207.819.239,00	1.156.697.105,00	51.122.134,00
Peralt. Pendukung Imunisasi	428.898.000,00	428.409.168,00	428.409.168,00	0,00
Keluarga Berencana	85.135.000,00	72.422.900,00	72.422.900,00	0,00
-Air Minum	751.555.000,00	731.362.000,00	593.306.904,00	138.055.096,00
Air Minum	751.555.000,00	731.362.000,00	593.306.904,00	138.055.096,00
-Sanitasi	900.000.000,00	825.526.000,00	822.366.000,00	3.160.000,00
Sanitasi	900.000.000,00	825.526.000,00	822.366.000,00	3.160.000,00
-Perumahan dan Permukiman	1.425.420.000,00	1.074.476.000,00	1.067.024.000,00	7.452.000,00



Jenis DAK	Alokasi 2018 (Rp)	Penyaluran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Silpa (Rp)
Perumahan & Pemukiman	1.425.420.000,00	1.074.476.000,00	1.067.024.000,00	7.452.000,00
-Pariwisata	1.519.514.000,00	1.351.947.000,00	1.276.049.999,00	75.897.001,00
Pariwisata	1.519.514.000,00	1.351.947.000,00	1.276.049.999,00	75.897.001,00
DAK PENUGASAN	51.754.891.000,00	49.597.933.400,00	49.446.570.010,00	151.363.390,00
Rumah Sakit Rujukan	34.179.973.000,00	33.488.654.900,00	33.488.654.900,00	0,00
Air Minum	900.000.000,00	882.985.500,00	746.603.110,00	136.382.390,00
Sanitasi	2.675.000.000,00	2.638.101.000,00	2.631.120.000,00	6.981.000,00
Konektifitas Jalan	13.381.876.000,00	11.979.687.000,00	11.971.687.000,00	8.000.000,00
Lingkungan Hidup	618.042.000,00	608.505.000,00	608.505.000,00	0,00
Jumlah	65.017.300.000,00	61.667.899.074,00	61.217.916.453,00	449.982.621,00

Sisa DAK Non Fisik Tahun 2018

Tabel 5.73 Sisa DAK Non Fisik Tahun 2018

Jenis DAK	Anggaran 2018 (Rp)	Penyaluran 2018/Sisa 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Silpa (Rp)
DAK NON FISIK				
BOP PAUD				
BOP PAUD	3.526.800.000,00	2.887.200.000,00	3.066.000.000,00	460.800.000,00
Sisa 2017		639.600.000,00		
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB				
BO Kesehatan	4.637.498.000,00	4.122.699.451,00	3.343.149.600,00	1.294.348.400,00
Sisa s/d 2017		514.798.549,00		
Bantuan Operasional KB	575.650.000,00	575.645.054,00	539.144.416,00	36.505.584,00
Sisa s/d 2017		4.946,00		
Dana Adminduk	658.925.000,00	323.482.400,00	460.700.504,00	198.224.496,00
Sisa s/d 2017		335.442.600,00		
JUMLAH	9.398.873.000,00	9.398.873.000,00	7.408.994.520,00	1.989.878.480,00

b. Sisa Tambahan Profesi Guru sebesar Rp3.388.916.687,00

Tabel 5.74 Sisa Tambahan Profesi Guru

Jenis DAK	Anggaran 2018 (Rp)	Penyaluran 2018/Sisa 2017/Pengembalian (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Silpa (Rp)
DAK NON FISIK				
Tunjangan Profesi Guru				
Tunjangan Profesi Guru	38.455.190.000,00	36.414.376.830,00	35.117.707.900,00	3.388.916.687,00
Sisa s/d 2017		2.069.280.325,00		
Pengembalian		22.967.432,00		
	38.455.190.000,00	38.506.624.587,00	35.117.707.900,00	3.388.916.687,00



c. Sisa Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp2.682.725.000,00

Tabel 5.75 Sisa Tambahan Penghasilan Guru

Jenis DAK	Anggaran 2018 (Rp)	Penyaluran 2018/Sisa 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Silpa (Rp)
DAK NON FISIK				
Tambahan Penghasilan Guru				
Tambahan Penghasilan Guru	375.000.000,00	0,00	305.250.000,00	2.682.725.000,00
Sisa s/d 2017		2.985.350.000,00		
Pengembalian		2.625.000,00		
JUMLAH	375.000.000,00	2.987.975.000,00	305.250.000,00	2.682.725.000,00

d. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp465.123.613,00

Tabel 5.76 Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

Jenis	Penyaluran 2018/Sisa 2017 (Rp)	REALISASI 2018		Silpa (Rp)
		Keterangan	Rp	
DBH CHT				
Reguler TA 2018	6.064.653.000,00	Spesific Grant/	8.653.732.483,00	465.123.613,00
Sisa DBH CHT 2017	3.054.203.096,00	Block Grant		
JUMLAH	9.118.856.096,00		8.653.732.483,00	465.123.613,00

e. Sisa Dana Kegiatan Pembangunan rumah sakit sebesar Rp18.666.679.807,00

f. Sisa Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp3.249.388.971,00 dengan rincian :

1. Puskesmas Magelang Selatan sebesar Rp. 274.153.630,00
2. Puskesmas Jurangombo sebesar Rp. 129.148.735,00
3. Puskesmas Magelang Tengah sebesar Rp.1.505.073.539,00
4. Puskesmas Kerkopan sebesar Rp. 322.234.925,00
5. Puskesmas Magelang Utara sebesar Rp.1.018.778.142,00

g. Sisa Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.838.567.772,00



5.2. PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2018 merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp180.992.764.876,00 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2017, atau mengalami kenaikan 11,49% dari tahun 2017 sebesar Rp162.344.899.952,00.

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2017 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp180.992.764.876,00.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp134.408.800.314,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran	(Rp 29.256.260.561,00)
- Pembiayaan Netto	Rp163.665.060.875,00
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp134.408.800.314,00

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atau sebesar Rp0,00.

5.2.5. Lain-lain

Untuk Tahun 2018 tidak terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL atau sebesar Rp0,00.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar **Rp134.408.800.314,00** sesuai dengan SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018.



5.3. PENJELASAN POS-POS AKUN NERACA

Penjelasan pos akun neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos akun-pos akun neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1. ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2018 sebesar **Rp3.865.401.096.564,41** meningkat sebesar Rp286.191.186.434,44 atau 8,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.579.209.910.129,97 sebagaimana disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Aset Pemerintah Kota Magelang per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Aset Lancar	175.098.679.790,26	212.425.650.919,94	(37.326.971.129,68)
Investasi Jangka Panjang	124.443.174.602,53	109.334.517.241,24	15.108.657.361,29
Aset Tetap	3.489.931.876.612,97	3.204.873.913.120,14	285.057.963.492,83
Aset Lainnya	75.927.365.558,65	52.575.828.848,65	23.351.536.710,00
Jumlah	3.865.401.096.564,41	3.579.209.910.129,97	286.191.186.434,44

Aset terdiri dari Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

5.3.1.a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp175.098.679.790,26** turun sebesar Rp37.326.971.129,68 atau turun 17,57% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp212.425.650.919,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Kas di Kas Daerah	116.091.824.866,00	149.893.319.461,00	(33.801.494.595,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	89.926.584,00	(89.926.584,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.534.064,00	107.649.002,00	(97.114.938,00)
Kas di BLUD	15.482.867.627,00	26.618.810.578,00	(11.135.942.951,00)
Kas di Bendahara BOS	2.838.567.772,00	4.385.596.314,00	(1.547.028.542,00)
Kas Lainnya	0,00	10.712.500,00	(10.712.500,00)
Piutang Pendapatan	36.687.710.807,96	31.826.561.038,46	4.861.149.769,50



Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(15.490.416.799,01)	(14.749.049.567,66)	(741.367.231,35)
Piutang Lainnya	3.866.835.409,00	3.873.905.408,00	(7.069.999,00)
Penyisihan Piutang Lainnya	(3.527.960.409,00)	(3.234.651.241,25)	(293.309.167,75)
Persediaan	19.138.716.452,31	13.602.870.843,39	5.535.845.608,92
Jumlah	175.098.679.790,26	212.425.650.919,94	(37.326.971.129,68)

5.3.1.a.1) Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2018 sebesar **Rp134.423.794.329,00** menurun sebesar Rp46.682.220,110,00 atau turun 25,78% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp181.106.014.439,00. Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.79 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Kas di Kas Daerah	116.091.824.866,00	149.893.319.461,00	(33.801.494.595,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	89.926.584,00	(89.926.584,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.534.064,00	107.649.002,00	(97.114.938,00)
Kas di BLUD	15.482.867.627,00	26.618.810.578,00	(11.135.942.951,00)
Kas di Bendahara BOS	2.838.567.772,00	4.385.596.314,00	(1.547.028.542,00)
Kas Lainnya	0,00	10.712.500,00	(10.712.500,00)
Jumlah	134.423.794.329,00	181.106.014.439,00	(46.682.220.110,00)

5.3.1.a.1) a) Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar **Rp116.091.824.866,00** turun sebesar Rp33.801.494.595,00 atau turun 22,55% dibandingkan kondisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp149.893.319.461,00. Pada Kas di RKUD Jateng per 31 Desember 2018 tersebut, berdasar rekonsiliasi terdapat kas BLUD Puskesmas Magelang Utara sebesar Rp1.780.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan transfer oleh BPJS Cabang Kota Magelang berdasarkan surat pemberitahuan BPJS Cabang Kota Magelang Nomor 447/VI-04/0419 tertanggal 26 April 2019 yang seharusnya di transfer ke Puskesmas Magelang Utara, akan tetapi ditransfer ke Dinas Kesehatan Kota Magelang, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah pada tanggal 6 Desember 2018.

Pada tanggal 4 Juni 2018 Pemerintah Kota Magelang mencairkan Deposito Bank BTN sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan nomor 00081-01-40-000611-3 yang ditempatkan pada tanggal 3 November 2017 dengan jangka waktu 1 bulan ARO.



Adapun rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rekening Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo RKUD Bank Jateng	116.091.824.866,00	129.893.959.461,00
2	Penerimaan sisa Dana BOS Propinsi yang salah masuk ke RKUD oleh SMP Muhammadiyah dan sudah dipindahbukukan tanggal 17 Januari 2018	0,00	(640.000,00)
3	Deposito Bank BTN Nomor 00081-01-40-000611-3	0,00	20.000.000.000,00
	Jumlah	116.091.824.866,00	149.893.319.461,00

5.3.1.a.1) b) Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018, turun sebesar Rp89.926.584,00 atau turun 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017.

5.3.1.a.1) c) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.534.064,00 turun Rp97.114.938,00 atau turun 90,21% dari Kas di bendahara Pengeluaran Tahun 2017 sebesar Rp107.649.002,00, yang merupakan utang pajak pada Dinas Pekerjaan Umum yang belum diyakini telah dibayarkan oleh pihak ketiga atas kegiatan pada tahun 2007 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Rincian Utang Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2018

No	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Nilai (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PPN (DPU)	7.457.082,00	Utang pajak dari PB. Gotong Royong dari pihak ketiga yang belum dibayar sejak tahun 2015
2	PPN (DPU)	1.081.818,00	Utang pajak dari CV. Trihita Karana dari pihak ketiga yang belum dibayar sejak tahun 2015
3	PPH 23 (DPU)	1.562.437,00	Utang pajak dari PB. Gotong Royong dari pihak ketiga yang belum dibayar sejak tahun 2015
4	PPH 23 (DPU)	432.727,00	Utang pajak dari CV. Trihita Karana dari pihak ketiga yang belum dibayar sejak tahun 2015
	Jumlah	10.534.064,00	

Untuk menindaklanjuti utang pajak tersebut telah dilakukan penyetoran pajak sebesar Rp10.534.064,00 pada tanggal 10 Mei 2019.

**5.3.1.a.1) d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah**

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2018 sebesar **Rp15.482.867.627,00** turun Rp11.135.942.951,00 atau turun 41,83% dari Kas BLUD Tahun 2017 sebesar Rp26.618.810.578,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rekening Kas di BLUD per 31 Desember 2018

No	BLUD	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	12.228.792.156,00
2	Puskesmas Magelang Selatan	274.153.630,00
3	Puskesmas Jurangombo	129.148.735,00
4	Puskesmas Magelang Tengah	1.505.073.539,00
5	Puskesmas Kerkopan	322.822.425,00
6	Puskesmas Magelang Utara	1.022.877.142,00
	Jumlah	15.482.867.627,00

Di RSUD Tidar Masih memiliki saldo pada rekening Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang berakhir Tahun 2014 pada Rekening BRI Cabang Magelang dengan Nomor Rekening 0048-01-00695-xx-x. Saldo rekening tersebut pada 31 Desember 2018 sebesar Rp406.683.370,00.

Berdasarkan Berita Acara Konsultasi (BAK) yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan RSUD Tidar Kota Magelang dan Kepala Subbag Verifikasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Isi dari BAK tersebut pada intinya meminta pihak RSUD Tidar Kota Magelang untuk segera menyetorkan saldo Dana Jamkesmas ke rekening kas negara.

5.3.1.a.1) e) Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di bendahara BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.838.567.772,00 turun sebesar Rp1.547.028.542,00 atau 35,28% dari tahun 2017 sebesar Rp4.385.596.314,00. Pada tahun 2017 terdapat sisa kas di bendahara BOS sebesar Rp4.385.596.314,00. Pada tahun 2018 terdapat realisasi pendapatan sebesar Rp16.596.872.725,00 dan Realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp18.143.901.267,00 sehingga saldo akhir tahun 2018 sebesar Rp2.838.567.772,00. Saldo Akhir BOS sebesar Rp2.838.567.772,00 tersebut merupakan saldo di Bank sebesar Rp1.972.219.318,00, Bunga yang masih di rekening Bank sebesar Rp118.313,00 dan Saldo tunai sebesar Rp866.230,141,00.

5.3.1.a.1) f) Kas Lainnya

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya pada 31 Desember 2018, turun sebesar Rp10.712.500,00 atau turun 100% dari saldo kas Lainnya Tahun 2017.

**5.3.1.a.2) Piutang Pendapatan**

Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp36.687.710.807,96 naik Rp4.861.149.769,50 atau naik 15,27% dibandingkan Piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp31.826.561.038,46.

Nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp21.197.294.008,95 berasal dari nilai bruto sebesar Rp36.687.710.807,96 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp15.490.416.799,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) 2018 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan) 2018 (Rp)	Saldo per 31 Des 2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)-(4)	(6)
1	Piutang Pajak Daerah	13.802.560.119,00	(11.704.074.153,50)	2.098.485.965,50	13.345.117.940,00
	Pajak Penerangan Jalan	763.282.396,00	(76.328.239,60)	686.954.156,40	724.346.023,00
	Pajak Reklame	52.599.350,00	(6.493.835,00)	46.105.515,00	16.373.000,00
	Pajak Hotel	59.212.589,00	(5.921.258,90)	53.291.330,10	0,00
	Pajak Restoran	37.527.847,00	(3.752.784,70)	33.775.062,30	0,00
	Pajak Hiburan	14.571.140,00	(1.457.114,00)	13.114.026,00	0,00
	Pajak Air Tanah	28.592.680,00	(2.947.268,00)	25.645.412,00	6.027.600,00
	Pajak Bumi dan Bangunan	12.846.774.117,00	(11.607.173.653,30)	1.239.600.463,70	12.598.371.317,00
2	Piutang Retribusi Daerah	264.988.630,00	(264.988.630,00)	0,00	264.988.630,00
	Retribusi pasar Rejowinangun dan PJKa	264.988.630,00	(264.988.630,00)	0,00	264.988.630,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.521.630.484,50	(552.163.048,45)	4.969.467.436,05	0,00
	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal	5.521.630.484,50	(552.163.048,45)	4.969.467.436,05	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang sah	15.092.445.756,46	(2.768.582.385,26)	12.323.863.371,20	18.216.454.468,46
	Piutang BLUD RSUD	13.710.924.262,00	(1.413.080.071,20)	12.297.844.191,80	16.762.770.484,00
	Piutang BLUD Puskesmas Magelang Selatan	5.620.000,00	(633.250,00)	4.986.750,00	2.375.000,00
	Piutang BLUD	2.110.000,00	(211.000,00)	1.899.000,00	175.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) 2018 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan) 2018 (Rp)	Saldo per 31 Des 2017 (Rp)
	Puskesmas Jurangombo				
	Piutang BLUD Puskesmas Magelang Tengah	4.145.000,00	(414.500,00)	3.730.500,00	0,00
	Piutang BLUD Puskesmas Kerkopan	825.000,00	(82.500,00)	742.500,00	1.210.000,00
	Piutang BLUD Puskesmas Magelang Utara	8.635.000,00	(1.073.500,00)	7.561.500,00	19.650.000,00
	Piutang RB Paten	0,00	0,00	0,00	65.800.000,00
	Piutang Dishub	130.127.025,00	(130.127.025,00)	0,00	130.127.025,00
	Piutang DPUPR	1.220.320.419,46	(1.220.320.419,46)	0,00	1.220.320.419,46
	Piutang Sewa Tanah, gedung dan bangunan -PPKD	9.739.050,00	(2.640.119,60)	7.098.930,40	9.141.150,00
	Piutang Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	4.885.390,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya	2.006.085.818,00	(200.608.581,80)	1.805.477.236,20	0,00
	Kurang Salur Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Tahun 2018	2.006.085.818,00	(200.608.581,80)	1.805.477.236,20	0,00
	Jumlah	36.687.710.807,96	(15.490.416.799,01)	21.197.294.008,95	31.826.561.038,46

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp36.687.710.807,96 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Piutang Pajak sebesar Rp13.802.560.119,00 terdiri dari :

- (1) Piutang pajak penerangan jalan umum yang merupakan hak Pemerintah Kota Magelang terhadap Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) bulan Desember 2018 sebesar Rp763.282.396,00.
- (2) Piutang Pajak Reklame Rp52.599.350,00.
- (3) Piutang Pajak Hotel Rp59.212.589,00
- (4) Piutang Pajak Restoran Rp37.527.847,00
- (5) Piutang Pajak Hiburan Rp14.571.140,00
- (6) Piutang Pajak Air Tanah Rp28.592.680,00
- (7) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp12.846.774.117,00 dengan rincian berikut ini :

Tabel 5.84 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2018

No	Keterangan	Pokok Piutang	Denda	Jumlah Piutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
1	Piutang s/d tahun 2012	6.126.552.871,00	2.940.745.108,00	9.067.297.979,00
2	Piutang tahun 2013	436.785.682,00	209.657.148,00	646.442.830,00



No	Keterangan	Pokok Piutang	Denda	Jumlah Piutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
3	Piutang tahun 2014	419.889.976,00	201.547.218,00	621.437.194,00
4	Piutang tahun 2015	386.885.361,00	185.704.996,00	572.590.357,00
5	Piutang tahun 2016	418.244.840,00	200.757.558,00	619.002.398,00
6	Piutang tahun 2017	495.968.502,00	148.790.894,00	644.759.396,00
7	Piutang tahun 2018	637.022.528,00	38.221.435,00	675.243.963,00
	JUMLAH PIUTANG PBB P2	8.921.349.760,00	3.925.424.357,00	12.846.774.117,00

PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Magelang, piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penghapusan tagihan piutang :

- merupakan kegiatan yang membutuhkan keputusan yang sensitive dan penuh dengan konsekuensi ekonomik.
- karena kemungkinan hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, dan piutang pajak dan/atau retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

Sebelum dilakukan penghapusan piutang PBB-P2 langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Magelang adalah sebagai berikut:

- Melakukan verifikasi dan validasi piutang PBB-P2
- Membuat Berita acara penetapan kadaluarsa Penagihan PBB-P2
- Menyusun SK Walikota tentang Penghapusan piutang PBB-P2 dari daftar inventaris piutang PBB-P2

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 jumlah piutang PBB-P2 yang di hapus secara bersyarat/hapus buku adalah sebesar Rp159.416.986,- sesuai dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 971.11/203/112 Tahun 2018 (SK Walikota dan daftar piutang PBB-P2 yang dihapusbukukan terlampir) Rincian Piutang PBB-P2 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.85 Rincian Piutang PBB-P2 Tahun 2008-2012

NO	TAHUN	PIUTANG PBB	DENDA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
1	2008	25.986.174,00	12.473.366,00	38.459.540,00



NO	TAHUN	PIUTANG PBB	DENDA	JUMLAH
2	2009	30.851.213,00	14.808.577,00	45.659.790,00
3	2010	31.862.234,00	15.293.869,00	47.156.103,00
4	2011	8.842.398,00	4.244.350,00	13.086.748,00
5	2012	10.172.164,00	4.882.641,00	15.054.805,00
	JUMLAH	107.714.183,00	51.702.803,00	159.416.986,00

b) Piutang Retribusi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp264.988.630,00**

Piutang retribusi pasar yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Pengelolaan Pasar) sebesar Rp264.988.630,00 merupakan akumulasi saldo tagihan retribusi Pasar Rejowinangun dan los pasar pada lahan PT KAI sampai dengan 31 Desember 2008.

Hal tersebut terjadi karena adanya peristiwa kebakaran pasar pada Bulan Juli Tahun 2008 yang menghancurkan seluruh kios/los Pasar Rejowinangun dan Pasar pada lahan PT KAI yang letaknya sangat berdekatan dengan pasar Rejowinangun. Sebagian besar barang dagangan ikut terbakar pada peristiwa tersebut. Agar perekonomian tetap berjalan, Pemerintah Kota Magelang membangun Pasar Penampungan/pasar sementara, untuk memindahkan sebagian besar pedagang sampai terbangunnya kembali pasar Rejowinangun pada tahun 2013. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan pedagang untuk membayar tunggakan retribusi pelayanan pasar. Terhadap kondisi tersebut Pemerintah Kota Magelang belum menetapkan kebijakan tentang perlakuan piutang retribusi pasar Rejowinangun dan los pasar pada lahan PT KAI.

Adapun rincian Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:

(a) Piutang Retribusi pedagang pasar Rejowinangun sebesar Rp255.985.230,00 dengan rincian tagihan sebagai berikut:

Piutang s.d tahun 2003	Rp	112.995.580,00
Piutang tahun 2004	Rp	15.012.675,00
Piutang tahun 2005	Rp	20.139.525,00
Piutang tahun 2006	Rp	28.712.150,00
Piutang tahun 2007	Rp	41.782.650,00
Piutang tahun 2008	Rp	37.342.650,00
Jumlah	Rp	255.985.230,00

(b) Piutang Retribusi pedagang yang menempati los pada lahan PT KAI sebesar Rp9.003.400,00 dengan rincian tagihan sebagai berikut :

Piutang s.d tahun 2003	Rp	8.789.000,00
Piutang tahun 2004	Rp	34.000,00
Piutang tahun 2005	Rp	123.000,00
Piutang tahun 2006	Rp	10.000,00
Piutang tahun 2007	Rp	32.400,00



Piutang Tahun 2008	Rp	15.000,00
Jumlah	Rp	9.003.400,00

c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.521.630.484,50 merupakan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan modal pada BUMD dengan rincian sebagai berikut :

- (1) PDOW Taman Kyai Langgeng Rp 1.528.439.113,20
- (2) PD Bank Magelang Rp 1.779.845.791,00
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum Rp 1.954.707.219,61
- (4) PD Perbengkelan Rp 71.037.461,69
- (5) BKK Magelang Utara Rp 187.600.899,00

d) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2018 sebesar Rp**15.092.445.756,46** terdiri dari :

- (1) Piutang RSUD Tidar senilai **Rp13.710.924.262,00**. Rincian piutang tersebut adalah :

Tabel 5.86 Rincian Piutang RSUD Tidar per 31 Desember 2018

No	Uraian	Tahun	Nilai (Rp)
1.	Pasien Umum	2005	6.620.600,00
2	Pasien Umum	2006	10.690.800,00
3	Pasien Umum	2007	28.348.600,00
4.	Pasien BPJS Kesehatan	2018	13.406.051.394,00
5	Pasien In Health	2016	4.184.600,00
6.	Pasien Jasa Raharja	2018	141.077.470,00
7.	RST dr. Soedjono	2018	12.675.000,00
8.	RS. Harapan	2018	56.697.000,00
9.	Yakes Telkom	2018	4.593.566,00
10.	LPSK	2018	2.268.400,00
11.	PT HM Sampoerna Tbk	2018	37.716.832,00
	Jumlah		13.710.924.262,00

- (2) Piutang Puskesmas Magelang Selatan senilai Rp5.620.000,00 yang merupakan piutang BPJS Kesehatan.
- (3) Piutang Puskesmas Jurangombo senilai Rp2.110.000,00 yang merupakan piutang BPJS Kesehatan.
- (4) Piutang Puskesmas Magelang Tengah (Botton) senilai Rp4.145.000,00 yang merupakan piutang BPJS Kesehatan
- (5) Piutang Puskesmas Kerkopan senilai Rp825.000,00 yang merupakan piutang BPJS Kesehatan.
- (6) Piutang Puskesmas Magelang Utara senilai Rp8.635.000,00.
- (7) Piutang Dinas Perhubungan senilai Rp130.127.025,00 merupakan piutang retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yaitu:



- a) Lokasi parkir Jl. Mataram (Sdr. BS) Tahun 2001 sebesar Rp30.850.000,00;
 - b) Lokasi parkir Jl. Mataram (Sdr. BW) Tahun 2002 sebesar Rp7.350.000,00;
 - c) Parkir tepi jalan umum (Sdr. H) Tahun 2002 sebesar Rp15.000.000,00;
 - d) Parkir tepi jalan umum (Sdr. DP) Tahun 2003 sebesar Rp76.927.025,00.
- (8) Piutang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar **Rp1.220.320.419,46** terdiri dari **Rp611.207.419,46** dan **Rp609.113.000,00** yang merupakan limpahan dari DKPTK karena perubahan SOTK baru berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari :
- (a) Tuntutan Ganti Rugi kepada pihak ketiga pada tahun 2016 sebesar **Rp565.708.000,00** merupakan piutang kepada pihak ketiga tahun 2008 pada DPU.
 - (b) Piutang kepada pihak ketiga sebesar **Rp45.499.419,46** merupakan piutang DPU kepada CV Toya Gesang atas belanja tahun 2003-2004. Sejak tahun 2014 tidak ada pembayaran atas piutang tersebut.
 - (c) Piutang IMB merupakan piutang IMB pasar Gotong Royong sebesar Rp609.113.000,00 (SKRD IMB + Denda Administrasi).
- (9) Piutang Retribusi Pemakaian Tanah yang dikelola oleh BPKAD-Pengelola sebesar Rp9.739.050,00
- e) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.006.085.818,00 adalah kurang salur penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kota Magelang berdasarkan surat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/03.901 tanggal 20 Februari 2019 dengan Rincian sebagai berikut :
- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.176.405.506,00
 - (2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp333.106.551,00
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp494.773.686,00
 - (4) Pajak Air Permukaan (PAP) Rp1.800.075,00

5.3.1.a.3) Penyisihan Piutang Pendapatan Tak Tertagih

Dengan adanya kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penyisihan piutang pada tahun 2017 dan 2018 telah dilaksanakan penyisihan piutang



atas piutang yang termasuk kategori piutang tidak tertagih atau macet.
Perhitungan Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.87 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018 dan 2017

Penyisihan Piutang		2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)		(2)	(3)
A	Piutang Pajak		
	BPKAD	11.704.074.153,50	11.413.248.514,90
B.	Piutang Retribusi		
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	264.988.630,00	264.988.630,00
C.	Piutang Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	Piutang bagian Laba atas penyertaan Modal	552.163.048,45	0,00
D.	Piutang Lain-lain PAD yang sah		
	Dinas Perhubungan	130.127.025,00	130.127.025,00
	PPKD	2.640.119,60	2.575.470,30
	DPUPR	1.220.320.419,46	1.220.320.419,46
	Piutang RSUD Tidar	1.413.080.071,20	1.717.789.508,00
	Piutang Puskesmas Magelang Selatan	633.250,00	0,00
	Piutang Puskesmas Jurangombo	211.000,00	0,00
	Piutang Puskesmas Magelang Tengah	414.500,00	0,00
	Piutang Puskesmas Kerkopan	82.500,00	0,00
	Piutang Puskesmas Magelang Utara	1.073.500,00	0,00
E.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
	Kurang Salur Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Tahun 2018	200.608.581,80	0,00
	Jumlah	15.490.416.799,01	14.749.049.567,66

Berikut ini penjelasan atas Penyisihan Piutang Pendapatan Tidak Tertagih di Pemerintah Kota Magelang adalah:

- a) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan **Rp12.849.774.117,00**. dengan nilai piutang tersebut terdapat penyisihan piutang sebesar **Rp11.607.173.653,30**. Perhitungannya dengan tabel berikut ini:

Tabel 5.88 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018

Tahun	Pokok Piutang	Denda	Jumlah Piutang	Umur	%	Penyisihan Piutang
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(4)*(6)
s/d 2012	6.126.552.871,00	2.940.745.108,00	9.067.297.979,00	> 36 bln	100%	9.067.297.979,00
2013	436.785.682,00	209.657.148,00	646.442.830,00	> 36 bln	100%	646.442.830,00
2014	419.889.976,00	201.547.218,00	621.437.194,00	> 36 bln	100%	621.437.194,00
2015	386.885.361,00	185.704.996,00	572.590.357,00	36 bln	100%	572.590.357,00
2016	418.244.840,00	200.757.558,00	619.002.398,00	24 bln	50%	309.501.199,00



Pemerintah Kota Magelang
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tahun	Pokok Piutang	Denda	Jumlah Piutang	Umur	%	Penyisihan Piutang
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(4)*(6)
2017	495.968.502,00	148.790.894,00	644.759.396,00	24 bln	50%	322.379.698,00
2018	637.022.528,00	38.221.435,00	675.243.963,00	12 bln	10%	67.524.396,30
JMLH	8.921.349.760,00	3.925.424.357,00	12.846.774.117,00			11.607.173.653,30

- b) Piutang Retribusi Pasar terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebesar Rp264.988.630,00. Piutang ini merupakan piutang retribusi pasar Rejowinangun sebelum terjadi musibah kebakaran. Piutang tersebut dikategorikan tidak tertagih atau macet karena bertahun-tahun tidak ada pembayaran atau pengurangan atas piutang tersebut sehingga dilakukan penyisihan piutang 100% sebesar Rp264.988.630,00. Berikut ini masing-masing perhitungannya:

Tabel 5.89 Rincian Piutang Retribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2018

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Nilai Piutang > 36 Bulan	Penyisihan	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
1	Pasar Rejowinangun	s/d 2003	112.995.580,00	100%	112.995.580,00
2	Pasar Rejowinangun	2004	15.012.675,00	100%	15.012.675,00
3	Pasar Rejowinangun	2005	20.139.525,00	100%	20.139.525,00
4	Pasar Rejowinangun	2006	28.712.150,00	100%	28.712.150,00
5	Pasar Rejowinangun	2007	41.782.650,00	100%	41.782.650,00
6	Pasar Rejowinangun	2003 s/d 26 Juli 2008	37.342.650,00	100%	37.342.650,00
7	PJKA	2004	8.789.000,00	100%	8.789.000,00
8	PJKA	2005	34.000,00	100%	34.000,00
9	PJKA	2006	123.000,00	100%	123.000,00
10	PJKA	2007	10.000,00	100%	10.000,00
11	PJKA	s/d 26 Juli 2008	32.400,00	100%	32.400,00
12	PJKA		15.000,00	100%	15.000,00
	JUMLAH		264.988.630,00		264.988.630,00

- c) Piutang Retribusi parkir pada Dinas Perhubungan sebesar **Rp130.127.025,00**. Piutang tersebut merupakan retribusi piutang yang dikelola oleh pihak ketiga. Atas piutang tersebut bertahun-tahun tidak ada itikad baik dari pihak yang mempunyai piutang sehingga dilakukan penyisihan piutang 100% sebesar **Rp130.127.025,00**.

Tabel 5.90 Rincian Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2018

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Umur Piutang > 36 bulan	Penyisihan	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
1	Parkir Jl. Mataram	2001	30.850.000,00	100%	30.850.000,00
2	Parkir Jl. Mataram	2002	7.350.000,00	100%	7.350.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

3	Parkir Tepi Jl. Umum	2002	15.000.000,00	100%	15.000.000,00
4	Parkir Tepi Jl. Umum	2003	76.927.025,00	100%	76.927.025,00
	JUMLAH		130.127.025,00		130.127.025,00

- d) Piutang Retribusi IMB yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebesar **Rp609.113.000,00**. Piutang ini dikategorikan tidak tertagih atau macet sehingga dilakukan penyisihan piutang 100% sehingga penyisihan piutang juga sebesar **Rp609.113.000,00**. Berikut ini perhitungannya :

Tabel 5.91 Rincian Piutang Retribusi IMB pada DPUPR per 31 Desember 2018

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Umur Piutang > 36 Bulan	Penyisihan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
1	Piutang retribusi IMB (SKRD IMB + denda administrasi)	2009	609.113.000,00	100%	609.113.000,00
	JUMLAH		609.113.000,00		609.113.000,00

- e) Piutang Lain-Lain yang terdapat di DPUPR sebesar **Rp611.207.419,46** terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi kepada pihak ketiga pada sebesar Rp565.708.000,00 merupakan piutang kepada pihak ketiga pada tahun 2008 dan piutang kepada pihak ketiga sebesar Rp45.499.419,46 merupakan piutang DPU kepada CV Toya Gesang atas belanja tahun 2003-2004. Karena piutang sebesar Rp611.207.419,46 dikategorikan tidak tertagih atau macet maka disisihkan 100% atau sebesar Rp611.207.419,46. Berikut ini perhitungan penyisihan piutang lain-lain di Dinas Pekerjaan Umum :

Tabel 5.92 Rincian Piutang Lain-lain pada DPUPR per 31 Desember 2018

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Nilai Piutang > 60 bulan	Penyisihan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
1	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Jaya Manunggal	2008	39.860.000,00	100%	39.860.000,00
2	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Sumber Agung	2008	37.764.000,00	100%	37.764.000,00
3	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Cahaya Mega Sejati	2008	110.612.000,00	100%	110.612.000,00
4	Kekurangan volume pekerjaan	2008	49.441.000,00	100%	49.441.000,00



No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Nilai Piutang > 60 bulan	Penyisihan	Jumlah
	keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Baja Persada				
5	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Muhandas Struktur	2008	109.231.000,00	100%	109.231.000,00
6	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Dot Com	2008	138.661.000,00	100%	138.661.000,00
7	Kekurangan volume pekerjaan keg pasar penampungan Rejowinangun a.n CV. Prima Kumia Sejahtera	2008	80.139.000,00	100%	80.139.000,00
8	Kekurangan volume pekerjaan keg peningkatan jalan Kalimas a.n CV. Toya Gesang	2003	45.499.419,46	100%	45.499.419,46
	JUMLAH		611.207.419,46		611.207.419,46

- f) RSUD Tidar melakukan penyisihan piutang atas piutang yang dikategorikan tidak tertagih atau macet sebesar **Rp1.413.080.071,50**. Piutang tersebut terdiri dari piutang dari pasien umum, pasien klaim dan pasien in health.

Tabel 5.93 Rincian Penyisihan Piutang pada RSUD Tidar per 31 Desember 2018

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
1	Pasien Umum	2005	6.620.600,00	100%	6.620.600,00
2	Pasien Umum	2006	10.690.800,00	100%	10.690.800,00
3	Pasien Umum	2007	28.348.600,00	100%	28.348.600,00
4	Pasien BPJS Kesehatan	2017	13.406.051.394,00	10%	1.340.605.139,00
5	Pasien In Health	2015	2.659.550,00	35%	930.843,00
6	Pasien In Health	2016	1.525.050,00	25%	381.262,50
7	Pasien Jasa Raha Raja	2018	141.077.470,00	10%	14.107.747,00
8	RST dr. Soedjono	2018	12.675.000,00	10%	1.267.500,00
9	RS Harapan	2018	56.697.000,00	10%	5.669.700,00
10	Yakes Telkom	2018	4.593.566,00	10%	459.357,00
11	LPSK	2018	2.268.400,00	10%	226.840,00
12	PT HM Sampoerna Tbk	2018	37.716.832,00	10%	3.771.683,00
	JUMLAH		13.710.924.262,00		1.413.080.071,50

5.3.1.a.4) Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar **Rp3.866.835.409,00** dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 5.94 Piutang Lainnya per 31 Desember 2018

No	Jenis Piutang Lainnya	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) 2018	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan) 2018	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)-(4)	(6)
a.	Piutang Disperindag	1.602.290.423,00	(1.263.415.423,00)	338.875.000,00	1.609.360.422,00
b.	Piutang TPTGR	2.264.544.986,00	(2.264.544.986,00)	0,00	2.264.544.986,00
	Jumlah	3.866.835.409,00	(3.527.960.409,00)	338.875.000,00	3.873.905.408,00

Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Magelang sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar **Rp3.866.835.409,00** dengan rincian sebagai berikut:

- a) Piutang tuntutan ganti rugi kepada pegawai, pimpinan dan anggota DPRD yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 02/TP-TGR/123 Tahun 2008 tanggal 6 Februari 2008. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 besarnya piutang tuntutan ganti rugi kepada pegawai, pimpinan, dan anggota DPRD tersebut sebagai berikut :
 - 1) Piutang Tuntutan ganti rugi 31 Desember 2018 sebesar **Rp19.175.386,00** adalah piutang pada pegawai atas penghapusan kendaraan dinas.
 - 2) Piutang Tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp2.245.369.600,00** adalah piutang Tuntutan ganti rugi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Magelang Tahun 2004, 2005, dan 2006.
- b) Piutang dana bergulir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp1.602.290.423,00** merupakan investasi non permanen dana bergulir yang sudah jatuh tempo dan tidak digulirkan lagi dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.95 Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2018

No	Jenis Piutang Lain - Lain	Tahun Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=((4)-(6))
1	Koperasi					
	Dana Bergulir PK/Koperasi	2003 s/d 2011	90.616.500,00	-	360.000,00	90.256.500,00
	Modal penyertaan Koperasi	2007 s/d 2013	130.000.000,00	-	0,00	130.000.000,00
	Dana Bergulir Kelompok	2012 s/d 2015	1.274.000.000,00	-	0,00	1.274.000.000,00
2	LPT					
	LPT – Indag	2005 s/d 2012	114.743.922,00	-	6.709.999,00	108.033.923,00
			1.609.360.422,00	-	7.069.999,00	1.602.290.423,00

5.3.1.a.5) Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih

Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:



Tabel 5.96 Penyisihan Piutang lainnya Tak Tertagih per 31 Desember 2018

Penyisihan Piutang		2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)		(2)	(3)
1	Disperindag	1.263.415.423,00	970.106.255,25
2	BPKAD (PPKD)	2.264.544.986,00	2.264.544.986,00
Jumlah		3.527.960.409,00	3.234.651.241,25

Berikut ini penjelasan atas Penyisihan Piutang Lainnya di Pemerintah Kota Magelang adalah:

- a) Piutang dana bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebesar **Rp1.602.290.423,00** dilakukan penyisihan atas piutang yang tidak tertagih sebesar **Rp1.263.415.423,00**. Berikut ini perhitungannya :

Tabel 5.97 Rincian Piutang Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2018

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Umur Piutang						Jumlah
			≤ 1 Tahun	>1 s/d 2 Thn	>2 s/d 3 Thn	>3 s/d 4 Thn	>4 s/d 5 Thn	>5 Thn	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)+(5)+ +(6)+(7)+(8)+(9)
1	UMKM Perorangan	2003	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
		2004	-	-	-	-	-	7.849.000,00	7.849.000,00
		2006	-	-	-	-	-	1.437.500,00	1.437.500,00
		2007	-	-	-	-	-	435.000,00	435.000,00
		2008	-	-	-	-	-	4.450.000,00	4.450.000,00
		2009	-	-	-	-	-	9.940.000,00	9.940.000,00
		2010	-	-	-	-	-	32.200.000,00	32.200.000,00
		2011	-	-	-	-	-	31.945.000,00	31.945.000,00
								90.256.500,00	90.256.500,00
	% Penyisihan		10%	25%	35%	50%	75%	100%	
	Jml Penyisihan Tidak Tertagih		-	-	-	-	-	90.256.500,00	90.256.500,00
2	Koperasi	2007	-	-	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00
		2008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		2010	-	-	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
		2011	-	-	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
		2012	-	-	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
		2013	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-
							15.000.000,00	115.000.000,00	130.000.000,00
	% Penyisihan		10%	25%	35%	50%	75%	100%	
	Jml Penyisihan Tidak Tertagih		-	-	-	0,00	11.250.000,00	115.000.000,00	126.250.000,00
3	Pra Koperasi/ Kelompok	2012	-	-	-	-	-	247.000.000,00	247.000.000,00
		2013	-	-	-	-	713.500.000,00	-	713.500.000,00
		2014	-	-	-	313.500.000,00	-	-	313.500.000,00



Pemerintah Kota Magelang
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Umur Piutang					Jumlah	
			≤ 1 Tahun	>1 s/d 2 Thn	>2 s/d 3 Thn	>3 s/d 4 Thn	>4 s/d 5 Thn		>5 Thn
						313.500.000,00	713.500.000,00	247.000.000,00	1.274.000.000,00
	% Penyisihan		10%	25%	35%	50%	75%	100%	
	Jml Penyisihan Tidak Tertagih		-	-	-	156.750.000,00	535.125.000,00	247.000.000,00	938.875.000,00
4	LPT- Indag	2005	-	-	-	-	-	3.083.001,00	3.083.001,00
		2006	-	-	-	-	-	4.616.666,00	4.616.666,00
		2007	-	-	-	-	-	17.833.998,00	17.833.998,00
		2008	-	-	-	-	-	15.717.766,00	15.717.766,00
		2009	-	-	-	-	-	17.238.332,00	17.238.332,00
		2010	-	-	-	-	-	17.514.999,00	17.514.999,00
		2011	-	-	-	-	-	24.112.494,00	24.112.494,00
		2012	-	-	-	-	-	7.916.667,00	7.916.667,00
							108.033.923,00	108.033.923,00	
	% Penyisihan		10%	25%	35%	50%	75%	100%	108.033.923,00
	Jml Penyisihan Tidak Tertagih		-				0,00	108.033.923,00	108.033.923,00
Total Penyisihan Piutang					0,00	156.750.000,00	546.375.000,00	560.290.423,00	1.263.415.423,00

b) Piutang Tuntutan Ganti Rugi pada BPKAD senilai **Rp2.264.544.986,00** dilakukan penyisihan piutang 100% sebesar **Rp2.264.544.986,00**. Berikut ini perhitungannya :

Tabel 5.98 Rincian Piutang Tuntutan Ganti rugi pada BPKAD per 31 Desember 2018

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Nilai Piutang yang umurnya > 3 s/d 4 Tahun	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang Tdk Tertagih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
1	Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	2010	19.175.386,00	100%	19.175.386,00
2	Pengembalian Kesejahteraan	2010	2.245.369.600,00	100%	2.245.369.600,00
	JUMLAH		2.264.544.986,00		2.264.544.986,00

5.3.1.a.6) Beban di Bayar Dimuka

Saldo Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun bersangkutan atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2018 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Magelang.



5.3.1.a.7) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Penilaian persediaan pada Pemerintah Kota Magelang dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) dan pencatatannya dengan metode periodik dengan rincian saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.99 Rincian Saldo Persediaan Tahun 2018 dan 2017

Persediaan		2018	2017
No	Persediaan	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ATK/ Pakai Habis	511.920.982,00	581.388.850,00
2	Cetakan	535.278.003,55	554.651.520,50
3	Alat Listrik	19.379.600,00	100.422.175,00
4	Alat Kebersihan	63.534.350,00	88.161.850,00
5	Obat	15.433.069.773,35	9.427.912.023,99
6	Bahan Kimia	91.339.065,00	73.477.510,00
7	Bahan dan alat Radiologi	359.606.673,50	0,00
8	Materai dan Perangko	1.306.500,00	2.077.000,00
9	Bahan Makanan	47.263.121,00	171.704.170,00
10	Peralatan Rumah Tangga	-	
11	Bibit tanaman dan Bibit ternak	174.556.950,00	344.200.750,00
12	Pakan Ikan Ternak	648.000,00	9.048.000,00
13	Alat Lab	527.752.483,70	700.612.731,27
14	Bahan dan alat CSSD	373.512.055,56	186.939.628,51
15	Alat Kesehatan	908.691.894,65	1.042.718.713,12
16	Bahan/Bibit Ternak Ikan	201.500,00	0,00
17	Lain-lain	90.655.500,00	319.555.921,00
	Jumlah Persediaan	19.138.716.452,31	13.602.870.843,39

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp19.138.716.452,31 tersebut terdapat pada OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.100 Saldo Persediaan per OPD Tahun 2018

No.	OPD	2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76.302.080,00
3	Dinas Kesehatan	2.192.920.956,70
4	Puskesmas Magelang Selatan	155.324.245,00
5	Puskesmas Jurangombo	91.238.615,93
6	Puskesmas Magelang Tengah	105.785.200,81
7	Puskesmas Kerkopan	128.381.072,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)
8	Puskesmas Magelang Utara	97.109.846,83
9	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	14.896.800.110,04
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91.088.500,00
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	110.500,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	379.200,00
13	Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat	104.500,00
14	Dinas Sosial	1.882.400,00
15	Dinas Tenaga Kerja	9.258.350,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	119.418.200,00
17	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	401.415.307,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	429.647.417,00
19	Dinas Perhubungan	46.249.000,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.798.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.581.500,00
22	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	257.500,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.653.500,00
24	Dinas Pertanian dan Pangan	108.226.583,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	67.044.218,00
26	Sekretariat Daerah	20.418.200,00
27	DPRD & Sekretariat DPRD	7.439.100,00
28	Kecamatan Magelang Selatan	322.500,00
29	Kelurahan Jurangombo Selatan	54.500,00
30	Kelurahan Jurangombo Utara	135.000,00
31	Kelurahan Magersari	508.500,00
32	Kelurahan Rejowinangun Selatan	212.250,00
33	Kelurahan Tidar Selatan	210.000,00
34	Kelurahan Tidar Utara	1.075.750,00
35	Kecamatan Magelang Tengah	1.864.000,00
36	Kelurahan Cacaban	280.000,00
37	Kelurahan Gelangan	786.500,00
38	Kelurahan Kemirirejo	182.000,00
39	Kelurahan Magelang	1.316.500,00
40	Kelurahan Panjang	553.000,00
41	Kelurahan Rejowinangun Utara	398.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)
42	Kecamatan Magelang Utara	1.722.000,00
43	Kelurahan Kedungsari	729.750,00
44	Kelurahan Kramat Selatan	150.000,00
45	Kelurahan Kramat Utara	2.061.000,00
46	Kelurahan Potrobangsari	1.810.500,00
47	Kelurahan Wates	345.200,00
48	Inspektorat	22.126.300,00
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	780.000,00
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36.170.600,00
51	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.821.000,00
52	Badan Penelitian dan Pengembangan	267.500,00
	Jumlah Persediaan	19.138.716.452,31

- a) Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya yang belum terpakai di OPD per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp511.920.982,00 dan Rp581.388.850,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.101 Rincian Saldo Persediaan ATK dan Barang Pakai Habis
per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64.183.680,00	97.545.241,00
2	Dinas Kesehatan	12.170.350,00	13.237.800,00
3	Puskesmas Magelang Selatan	45.123.800,00	16.334.150,00
4	Puskesmas Jurangombo	8.043.100,00	7.183.875,00
5	Puskesmas Magelang Tengah	1.841.850,00	558.000,00
6	Puskesmas Kerkopan	9.731.800,00	9.958.650,00
7	Puskesmas Magelang Utara	9.960.110,00	5.804.810,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	132.529.055,00	121.487.500,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	805.000,00	239.500,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	110.500,00	179.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	780.000,00	10.938.500,00
12	Dinas Perhubungan	3.149.000,00	1.090.500,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.768.000,00	1.192.250,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	1.475.000,00	715.500,00
15	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	146.281.167,00	230.450.184,00
16	Dinas Tenaga Kerja	3.955.850,00	3.235.000,00
17	Dinas Sosial	1.180.500,00	684.500,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	998.500,00	1.377.750,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.783.500,00	5.412.200,00
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	257.500,00	122.250,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja	379.200,00	383.500,00
22	Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat	50.500,00	760.000,00
23	DPRD & Sekretariat DPRD	4.791.100,00	2.944.250,00
24	Sekretariat Daerah	12.834.400,00	10.793.710,00
25	Badan Penelitian dan Pengembangan	206.000,00	166.500,00
26	Kecamatan Magelang Utara	1.372.000,00	1.856.250,00
27	Kecamatan Magelang Selatan	229.000,00	923.750,00
28	Kecamatan Magelang Tengah	1.567.000,00	2.775.810,00
29	Kelurahan Rejowinangun Selatan	212.250,00	110.000,00
30	Kelurahan Magersari	381.000,00	617.500,00
31	Kelurahan Jurangombo Utara	135.000,00	320.500,00
32	Kelurahan Jurangombo Selatan	54.500,00	11.250,00
33	Kelurahan Tidar Utara	1.075.750,00	779.250,00
34	Kelurahan Tidar Selatan	210.000,00	182.250,00
35	Kelurahan Wates	288.600,00	621.000,00
36	Kelurahan Potrobangsari	1.460.500,00	1.408.600,00
37	Kelurahan Kedungsari	729.750,00	529.750,00
38	Kelurahan Kramat Utara	1.799.000,00	1.080.500,00
39	Kelurahan Kramat Selatan	150.000,00	160.000,00
40	Kelurahan Kemirirejo	182.000,00	556.950,00
41	Kelurahan Cacaban	280.000,00	681.000,00
42	Kelurahan Rejowinangun Utara	398.000,00	516.000,00
43	Kelurahan Magelang	1.316.500,00	2.692.900,00
44	Kelurahan Panjang	553.000,00	521.000,00
45	Kelurahan Gelangan	786.500,00	377.000,00
46	Inspektorat	8.278.800,00	967.000,00
47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	618.000,00	787.000,00
48	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	21.052.700,00	15.768.650,00
49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	762.600,00	1.398.500,00
50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.294.000,00	907.250,00
51	Dinas Pertanian dan Pangan	2.345.070,00	2.044.070,00
	Jumlah ATK	511.920.982,00	581.388.850,00

- b) Saldo persediaan cetakan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp535.278.003,55 dan Rp554.651.520,50 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.102 Rincian Saldo Persediaan Cetak per 31 Desember 2018 dan 2017

Persediaan Cetakan pada:		2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)		(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.329.700,00	3.175.900,00
2	Dinas Kesehatan	17.247.010,00	18.190.140,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	89.931.750,00	59.378.125,00
4	Badan Perencanaan dan Pembangunan	0,00	11.197.700,00
5	Dinas Perhubungan	43.100.000,00	103.930.486,00
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	252.065.440,00	202.184.940,00
7	Dinas Tenaga Kerja	4.610.000,00	1.352.500,00
8	Dinas Sosial	112.500,00	425.000,00
9	Sekretariat Daerah	5.685.800,00	41.225.100,00
10	Kelurahan Potrobangsari	350.000,00	218.000,00
11	Inspektorat	12.847.900,00	0,00
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	710.000,00	895.000,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	63.708.818,00	36.482.356,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.359.500,00	39.100.500,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.391.000,00	4.817.200,00
16	Dinas Pertanian dan Pangan	19.698,00	16.072,00
17	Puskesmas Magelang Selatan	2.377.590,00	1.648.310,00
18	Puskesmas Magelang Utara	3.231.385,00	7.296.915,00
19	Puskesmas Magelang Tengah	3.451.200,00	3.250.960,00
20	Puskesmas Jurangombo	7.823.781,55	10.151.296,50
21	Puskesmas Kerkopan	5.924.931,00	9.715.020,00
Jumlah		535.278.003,55	554.651.520,50

c) Saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp19.379.600,00 dan Rp100.422.175,00.

Tabel 5.103 Rincian Saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2018 dan 2017

Persediaan Alat Listrik pada :		2018	2017
(1)		(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.056.500,00	2.002.900,00
2	Dinas Kesehatan	3.885.200,00	2.648.300,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	87.474.275,00
4	Dinas Kependudukan dan Catatan	2.598.700,00	2.128.500,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Persediaan Alat Listrik pada :		2018	2017
(1)		(2)	(3)
	Sipil		
5	Kecamatan Magelang Utara	0,00	162.000,00
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	250.000,00	673.500,00
7	Dinas Pertanian dan Pangan	859.800,00	918.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.138.000,00	208.500,00
9	Sekretariat Daerah	693.000,00	0,00
10	Sekretarian DPRD	1.530.000,00	180.000,00
11	Dinas Sosial	410.500,00	1.473.000,00
12	Puskesmas Magelang Selatan	1.027.000,00	0,00
13	Puskesmas Magelang Utara	598.500,00	401.150,00
14	Puskesmas Magelang Tengah	177.000,00	296.000,00
15	Puskesmas Jurangombo	319.000,00	774.250,00
16	Puskemas Kerkopan	1.580.400,00	1.081.800,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.256.000,00	0,00
	Jumlah Alat Listrik	19.379.600,00	100.422.175,00

d) Saldo Persediaan Alat Kebersihan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp63.534.350,00 dan Rp88.161.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104 Rincian Saldo Persediaan Alat Kebersihan per 31 Desember 2018 dan 2017

Persediaan Alat Kebersihan		2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)		(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.140.400,00	15.124.300,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	8.830.000,00	43.615.400,00
3	Dinas Kesehatan	8.879.100,00	2.929.600,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	957.000,00	681.500,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	2.819.250,00	3.879.000,00
6	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	470.000,00	2.796.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja	692.500,00	765.000,00
8	Dinas Sosial	178.900,00	673.100,00
9	DPRD & Sekretariat DPRD	1.118.000,00	1.195.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	54.000,00	81.600,00
11	Sekretariat Daerah	1.205.000,00	2.707.500,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Persediaan Alat Kebersihan		2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)		(2)	(3)
12	Kecamatan Magelang Selatan	93.500,00	388.000,00
13	Kelurahan Wates	56.600,00	68.900,00
14	Kecamatan Magelang Utara	350.000,00	257.600,00
15	Kelurahan Kramat Utara	262.000,00	0,00
16	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	30.000,00	0,00
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	243.000,00	129.500,00
18	Kelurahan Kramat Utara	0,00	518.500,00
19	Kelurahan Magersari	127.500,00	153.000,00
20	Inspektorat	999.600,00	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	798.000,00	0,00
22	Kecamatan Magelang Tengah	297.000,00	0,00
23	Dinas Pertanian dan Pangan	3.004.050,00	1.532.900,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	164.400,00	171.500,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	272.900,00
26	Puskesmas Magelang Selatan	12.046.600,00	481.100,00
27	Puskesmas Magelang Utara	3.484.100,00	5.484.000,00
28	Puskesmas Magelang Tengah	356.250,00	59.500,00
29	Puskesmas Jurangombo	3.930.550,00	1.628.550,00
30	Puskemas Kerkopan	2.414.650,00	1.861.400,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	61.500,00	303.500,00
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.470.900,00	403.000,00
Jumlah Alat Kebersihan		63.534.350,00	88.161.850,00

e) Saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp15.433.069.773,35 dan Rp9.427.912.023,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2018 dan 2017

OPD		2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)		(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	293.800,00	925.200,00
2	Dinas Kesehatan	1.799.319.449,72	1.497.828.269,28
3	Puskesmas Magelang Selatan	61.115.579,00	79.796.725,00
4	Puskesmas Magelang Utara	58.337.950,42	96.384.109,95
5	Puskesmas Magelang Tengah	47.010.622,32	57.165.697,35
6	Puskesmas Jurangombo	44.549.190,61	57.100.036,32
7	Puskesmas Kerkopan	53.312.392,00	50.704.959,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

OPD		2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)		(2)	(3)
8	Rumah Sakit Umum Daerah	13.357.374.971,28	7.573.834.527,09
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.330.818,00	14.087.500,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	425.000,00	85.000,00
Jumlah Persediaan Obat		15.433.069.773,35	9.427.912.023,99

Persediaan obat pada RSUD Tidar yang termasuk obat kadaluarsa/ rusak yang belum dimusnahkan per 31 Desember 2017 di gudang Farmasi RSUD Tidar sebesar Rp32.710.583,00 sedangkan per 31 Desember 2018 di gudang Farmasi RSUD Tidar sebesar Rp22.359.269,00.

Persediaan obat pada UPTD Farmasi yang termasuk obat kadaluarsa/ rusak yang belum dimusnahkan per 31 Desember 2018 di gudang Farmasi Dinas Kesehatan yang merupakan gabungan dari obat kadaluarsa yang ada di instalasi Farmasi DKK, BP, dan Puskesmas sebesar Rp227.923.635,18. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.106 Saldo Persediaan Obat Kadaluarsa pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang Belum Dimusnahkan per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Persediaan Obat Kadaluarsa/Rusak	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	176.589.548,40	128.839.267,30
3	Puskesmas Magelang Selatan	4.065.356,00	0,00
4	Puskesmas Jurangombo	7.689.165,00	0,00
5	Puskesmas Magelang Tengah	11.681.169,78	0,00
6	Puskesmas Kerkopan	7.454.645,00	0,00
7	Puskesmas Magelang Utara	20.443.751,00	0,00
	Jumlah	227.923.635,18	128.839.267,30

- f) Saldo Persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp72.524.365,00 dan Rp73.477.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.107 Saldo Persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2018 dan 2017

No	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	50.282.600,00	65.534.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	3.690.000,00	3.690.000,00
3	Dinas Pertanian dan Pangan	37.366.465,00	4.253.510,00
	Jumlah Bahan Kimia / Bahan Radiologi	91.339.065,00	73.477.510,00



- g) Persediaan Bahan/Alat Radiologi terdapat di RSUD Tidar dengan saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp359.606.673,50 dan Rp0,0.
- h) Saldo persediaan Persediaan Meterai dan Perangko per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.306.500,00 dan Rp2.077.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.108 Saldo Persediaan Meterai dan Perangko per 31 Desember 2018 dan 2017

No	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.003.500,00	1.069.000,00
2	Dinas Kesehatan	69.000,00	150.000,00
3	Puskesmas Jurangombo	0,00	90.000,00
4	Dinas Pertanian dan Pangan	234.000,00	768.000,00
	Jumlah Meterai dan Perangko	1.306.500,00	2.077.000,00

- i) Persediaan Bahan Makanan terdapat di RSUD Tidar per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp47.263.121,00 dan Rp171.704.170,00.
- j) Saldo Persediaan Bibit Tanaman dan Bibit Ternak per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp174.556.950,00 dan Rp344.200.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.109 Saldo Persediaan Bibit Tanaman
per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pertanian dan Pangan	63.123.000,00	318.955.500,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	111.433.950,00	25.245.250,00
	Jumlah Bibit Ternak	174.556.950,00	344.200.750,00

- k) Persediaan Pakan Ikan Ternak terdapat di Dinas Pertanian dan Pangan dengan saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp648.000,00 dan Rp9.048.000,00.
- l) Persediaan Alat Laboratorium terdapat di Rumah Sakit Tidar dengan saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp527.752.483,70 dan Rp700.612.731,27 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.110 Saldo Persediaan Alat Laboratorium per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	527.752.483,70	700.612.731,27
	Jumlah Alat Laboratorium	527.752.483,70	700.612.731,27



- m) Persediaan Bahan/Alat CSSD terdapat di RSUD Tidar dengan saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp373.512.055,56 dan Rp186.939.628,51.
- n) Saldo Persediaan Alat Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp908.691.894,65 dan Rp1.042.718.713,12 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.111 Saldo Persediaan Alat Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	301.068.246,98	238.314.265,72
2	Puskesmas Magelang Selatan	33.633.676,00	33.917.451,00
3	Puskesmas Magelang Utara	21.497.801,41	34.597.742,40
4	Puskesmas Magelang Tengah	52.948.278,49	47.290.617,00
5	Puskesmas Jurangombo	26.572.993,77	48.344.093,00
6	Puskesmas Kerkopan	55.416.899,00	39.504.548,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	417.553.999,00	600.749.996,00
	Jumlah Alat Kesehatan	908.691.894,65	1.042.718.713,12

- o) Persediaan Bahan/Bibit ternak/Ikan terdapat di Dinas Pertanian dan Pangan dengan saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp201.500,00 dan Rp186.939.628,51.
- p) Saldo Persediaan Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp91.659.000,00 dan Rp319.555.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112 Saldo Persediaan Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	294.500,00	1.180.000,00
2)	Puskesmas Magelang Utara	0,00	128.700,00
3)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89.326.500,00	316.069.221,00
4)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.034.500,00	2.178.000,00
	Jumlah Persediaan	90.655.500,00	319.555.921

Berikut ini penjelasan persediaan lain-lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp294.500,00 merupakan persediaan bola pingpong.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp89.326.500,00 terdiri dari persediaan aspal.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.034.500,00 terdiri dari persediaan timah justir dan timah plombir



5.3.1.b. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo Investasi Jangka Panjang yang berupa Investasi Permanen per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp124.443.174.602,53 dan Rp109.334.517.241,24.

1) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen adalah nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Magelang pada BUMD berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2018 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik independen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113 Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2018 dan 2017

KETERANGAN	Laporan Auditor		2018	2017
	No dan Tanggal	Opini	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. PDOW Taman Kiai Langgeng	00050/2.1065/AU.2/05/0438-2/1/II/2019, 13 Februari 2019	Wajar	20.063.069.650,02	20.445.485.756,60
b. PD Bank Magelang	00038/2.1065/AU.2/07/0438-3/1/II/19, 18 Februari 2019	Wajar	34.753.464.369,00	36.413.029.180,28
c. PDAM	00010/3.0217/AU.2/10/0425-1/1/II/2019, 15 Februari 2019	Wajar	35.848.424.628,08	24.463.410.142,98
d. PD Percetakan	00003/3.0370/AU.2/05/1498-2/1/II/2019, 26 Februari 2019	Wajar	3.522.284.005,51	3.825.469.219,00
e. PD Perbengkelan	00004/3.0370/AU.2/05/1498-2/1/II/2019, 26 Februari 2019	Wajar	1.844.211.183,25	1.940.168.461,20
f. BKK Kota Magelang	00001/3.0370/AU.2/07/1498-1/III/2019, 6 Februari 2019	Wajar	3.861.720.766,67	6.196.954.481,18
g. Bank Jateng			24.400.000.000,00	15.900.000.000,00
h. PRPP			150.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang			124.443.174.602,53	109.334.517.241,24

Investasi permanen pada 6 (enam) Perusahaan Daerah telah dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sesuai karena kepemilikannya lebih dari 20%. Sedangkan pada Bank Jateng dan PT PRPP masih menggunakan metode *cost* karena kepemilikannya dibawah 20 %.



Saat ini keberadaan tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya anjungan kabupaten-kota se Provinsi Jawa Tengah yang tengah digugat oleh PT Indo Permata Usahatama telah sampai pada tingkat kasasi dan berkekuatan hukum tetap serta telah dimohonkan eksekusi oleh penggugat.

Bahwa berdasarkan Diktum ke-16 putusan tingkat kasasi tersebut, intinya memerintahkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan PT PRPP untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada penggugat, tanah seluas 34 hektar dari bagian tanah seluas 45,6 hektar yang saat ini dikuasai oleh PT PRPP Jawa Tengah.

Sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut atas gugatan tanah dimaksud, saat ini Pemerintah Kota Magelang masih mengakui nilai penyertaan modal dimaksud.

Tabel 5.114 Investasi Permanen pada BUMD Tahun 2018

No	Nama BUMD	Neraca Per 31 Desember 2018			Neraca per 31 Desember 2018
		Investasi Pemkot dgn Metode Cost	Kepemilikan	Investasi Pemkot dgn Metode Ekuitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDOW Taman Kyai Langgeng		100,00%	20.063.069.650,02	20.063.069.650,02
2	BPR Bank Magelang		100,00%	34.753.464.369,00	34.753.464.369,00
3	PDAM Kota Magelang		100,00%	35.848.424.628,08	35.848.424.628,08
4	Perusda Percetakan		100,00%	3.522.284.005,51	3.522.284.005,51
5	Perusda Perbengkelan		100,00%	1.844.211.183,25	1.844.211.183,25
6	BKK Kota Magelang		45,86%	3.861.720.766,67	3.861.720.766,67
7	Bank Jateng	24.400.000.000,00			24.400.000.000,00
8	PT PRPP Jawa Tengah	150.000.000,00	0,72%		150.000.000,00
	Jumlah	24.550.000.000,00		99.893.174.602,53	124.443.174.602,53

5.3.1.c. Aset tetap

a. Aset Tetap Kota Magelang per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp3.489.931.876.612,97**. Berikut ini adalah rinciannya:

Aset Tetap	2018	2017
	(Rp)	(Rp)
Tanah	2.346.271.101.655,67	2.177.804.254.186,15
Peralatan dan Mesin	536.735.763.075,39	489.719.252.800,70
Gedung dan Bangunan	703.774.035.589,64	653.837.525.062,17
Jalan, Irigasi dan Jaringan	944.832.338.718,89	844.320.054.861,76



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Aset Tetap Lainnya	26.398.360.505,91	27.793.539.650,19
Konstruksi dalam Pengerjaan	67.361.492.107,00	25.912.529.715,00
Akumulasi Penyusutan	(1.135.441.215.039,53)	(1.014.513.243.155,83)
Total Aset	3.489.931.876.612,97	3.204.873.913.120,14

- b. Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.c.1) Tanah	<u>2018 (Rp)</u>	<u>2017 (Rp)</u>
	2.346.271.101.655,67	2.177.804.254.186,15

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2018 sebesar **Rp2.346.271.101.655,67**. Penambahan dan pengurangan asset tetap Tanah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

TANAH		
SALDO Awal	Rp	2.177.804.254.186,15
Penambahan :		
Belanja Modal	Rp	15.078.648.890,00
Mutasi antar OPD		124.482.037.494,52
Belanja non Modal APBD		3.896.000,00
Koreksi Berita Acara		69.023.859.780,00
Reklasifikasi		745.478.650,00
Jumlah Penambahan	Rp	209.333.920.814,52
Pengurangan :		
Mutasi antar OPD	Rp	21.063.643.265,00
Reklasifikasi		32.430.080,00
Ke Aset Lainnya (aset lain-lain)		19.771.000.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	40.867.073.345,00
Saldo Akhir		2.346.271.101.655,67

Penambahan terdapat di OPD :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	2.203.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar		50.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		28.321.314.363,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		88.444.963.066,52
Dinas Tenaga Kerja		50.000,00
Dinas Lingkungan Hidup		1.896.566.260,00
Dinas Perhubungan		32.430.080,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik		607.000,00
Dinas Pertanian dan Pangan		60.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		580.000,00
Sekretariat Daerah bagian Kesra		306.000.000,00
Kelurahan Kemirejo		69.850.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Kelurahan Rejowinangun Utara		65.600.000,00
Kelurahan Potrobangsari		416.100.000,00
PPKD		89.717.607.045,00
Jumlah Penambahan	Rp	209.333.920.814,52

Pengurangan terdapat di OPD :

Dinas Perhubungan	Rp	19.803.430.080,00
Kelurahan Jurangombo Selatan		722.523.805,00
Kelurahan Jurangombo Utara		282.930.000,00
Kelurahan Tidar Selatan		659.240.000,00
Kelurahan Tidar Utara		2.675.517.000,00
Kelurahan Cacaban		1.410.525.050,00
Kelurahan Gelangan		1.172.982.660,00
Kelurahan Kemiriorejo		589.891.250,00
Kelurahan Magelang		330.480.000,00
Kelurahan Panjang		378.826.000,00
Kelurahan Rejo Utara		3.439.074.000,00
Kelurahan Kedungsari		2.654.690.000,00
Kelurahan Kramat Selaatn		1.824.125.000,00
Kelurahan Potrobangsari		2.573.517.500,00
Kelurahan Wates		2.039.425.000,00
PPKD		309.896.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	40.867.073.345,00

Penambahan aset tanah tahun 2018 sebesar Rp209.333.920.814,52 tersebut, berasal dari :

- 1. Belanja Modal tanah Tahun 2018** sebesar Rp15.078.648.890,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp13.216.163.200,00
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.830.055.610,00
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp32.430.080,00. yang merupakan biaya appraisal pengadaan tanah, sehingga pencatatan selanjutnya direklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 2. Reklasifikasi** sebesar Rp 745.478.650,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanah hasil reklas KDP Tanah yang menambah harga perolehan tanah sebesar Rp193.928.650,00.
 - Reklas tanah yang berasal dari aset lain-lain tanah sebanyak 6 bidang tanah sejumlah Rp551.550.000,00 yang ada di OPD berikut :



- a. Kelurahan Kemirirejo yang merupakan tanah 1 tahun ditanami sejumlah 1 bidang tanah senilai Rp.69.850.000,00
 - b. Kelurahan Rejowinangun Utara yang merupakan tanah rusak sejumlah 1 bidang tanah senilai Rp. 65.600.000,00
 - c. Kelurahan Potrobangsari yang merupakan tanah pertanian untuk sawah sejumlah 3 bidang tanah senilai Rp. 356.100.000,00 dan tanah untuk kolam ikan air tawar sejumlah 1 bidang senilai Rp.60.000.000,00
3. Penambahan nilai aset tanah pada neraca PPKD atau dalam Daftar Barang Pengelola sebesar Rp69.023.859.780,00 yang terdiri dari:
 - Pencatatan 35 (tiga puluh lima) bidang tanah yang sebelumnya tidak tercatat dalam KIB maupun neraca senilai Rp55.611.265.000,00. Tanah tersebut diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dari permohonan hak atas Tanah Negara. Selama ini tanah-tanah tersebut baru dicatat dalam daftar tanah Pemerintah Kota Magelang (yang merupakan daftar bantu sebagai hasil inventarisasi). Tanah tersebut diinventarisasi karena secara fungsi tanah tersebut sebagai fasilitas umum dan/ atau karena riwayat penguasaannya oleh Pemerintah Kota Magelang. Setelah dimohonkan dengan suatu hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku ke Kantor Pertanahan Kota Magelang dan diberikan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak atas tanah (Hak Pakai) maka selanjutnya secara keandalan pencatatannya memenuhi untuk dicatat ke dalam neraca dan maupun Daftar Barang Milik Daerah Kota Magelang (pada Daftar Barang Pengelola).
 - Pencatatan 13 (tiga belas) bidang tanah fasilitas umum/fasilitas lingkungan Perumahan Departemen Kesehatan dan Armada Estate yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Magelang senilai Rp13.412.594.780,00
4. Mutasi aset tanah antar OPD sebesar Rp124.482.037.494,52, yang terdiri dari:
 - a. Mutasi dari PPKD ke Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) senilai Rp306.000.000,00 merupakan tanah yang dioperasikan oleh pihak lain, yang dimutasikan karena secara tugas fungsi ada pada Sekretariat Daerah (Bagian Kesra).



- b. Mutasi tanah dari 3 (tiga) OPD Kecamatan ke PPKD senilai Rp20.693.747.265,00 merupakan tanah yang tercatat pada kelurahan namun tidak menunjang tugas pokok dan fungsinya sehingga sesuai ketentuan pengelolaan barang kemudian diserahkan kepada Walikota cq. Pengelola Barang.
 - c. Mutasi aset tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp75.101.381.866,52 dengan adanya penetapan SK Walikota Magelang Nomor 030/141/112 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Barang Milik Daerah berupa Tanah untuk Jalan lingkungan sekunder.
 - d. Mutasi aset tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp28.320.908.363,00 dengan adanya penetapan SK Walikota Magelang Nomor 030/139/112 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Barang Milik Daerah berupa Tanah untuk Saluran Sekunder Kota/Kali Kota.
 - e. Mutasi aset tanah dari Kelurahan Potrobangsari ke Dinas Pertanian dan Pangan berupa tanah kolam ikan air tawar senilai Rp.60.000.000,00.
5. Penambahan aset tanah yang berasal dari biaya pendamping sebesar Rp.3.896.000,00 yang terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan senilai Rp. 2.203.000,00
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar senilai Rp.50.000,00
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp. 406.000,00
 - d. Dinas Tenaga Kerja Rp.50.000,00
 - e. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Rp.607.000,00
 - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp.580.000,00

Berikut ini data Tanah pada OPD tahun 2018 dan 2017.

Tabel 5.115 Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017

OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84.504.973.757,48	84.502.770.757,48
Dinas Kesehatan	1.455.300.000,00	1.455.300.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	18.745.850.000,00	18.745.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.406.870.114.566,75	1.378.548.800.203,75
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	90.516.860.066,52	2.071.897.000,00
Dinas Perhubungan	5.480.000.000,00	25.251.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	265.162.674,52	264.555.674,52
Dinas Lingkungan Hidup	20.222.311.743,00	18.325.745.483,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Dinas Kependudukan & Capil	4.327.499.000,00	4.327.499.000,00
Dinas Tenaga Kerja	823.000.000,00	823.000.000,00
Dinas Perindustrian & Perdagangan	27.027.480.000,00	27.026.900.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata	4.859.840.000,00	4.859.840.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat	588.900.000,00	588.900.000,00
DPRD & Sekretariat DPRD	538.850.000,00	538.850.000,00
Sekretariat Daerah	4.293.150.000,00	3.987.150.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00
Kecamatan Magelang Utara	479.194.500,00	479.194.500,00
Kecamatan Magelang Selatan	776.618.000,00	776.618.000,00
Kecamatan Magelang Tengah	636.027.000,00	636.027.000,00
Kelurahan Rejowinangun Selatan	151.656.000,00	151.656.000,00
Kelurahan Magersari	435.750.000,00	435.750.000,00
Kelurahan Jurangombo Utara	1.096.556.962,00	1.379.486.962,00
Kelurahan Jurangombo Selatan	387.420.000,00	1.109.943.805,00
Kelurahan Tidar Utara	4.741.625.000,00	7.417.142.000,00
Kelurahan Tidar Selatan	614.029.300,00	1.273.269.300,00
Kelurahan Wates	206.250.000,00	2.245.675.000,00
Kelurahan Potrobangsari	408.600.000,00	2.566.017.500,00
Kelurahan Kedungsari	711.580.000,00	3.366.270.000,00
Kelurahan Kramat Utara	252.635.475,00	252.635.475,00
Kelurahan Kramat Selatan	763.100.000,00	2.587.225.000,00
Kelurahan Kemirirejo	1.605.850.000,00	2.125.891.250,00
Kelurahan Cacaban	533.225.000,00	1.943.750.050,00
Kelurahan Rejowinangun Utara	150.640.000,00	3.524.114.000,00
Kelurahan Magelang	9.000.000,00	339.480.000,00
Kelurahan Panjang	655.995.000,00	1.034.821.000,00
Kelurahan Gelangan	450.039.600,00	1.623.022.260,00
PPKD	329.425.998.010,40	240.018.286.965,40
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.387.400.000,00	2.387.400.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.723.500.000,00	1.723.500.000,00
Dinas Pertanian dan Pangan	326.024.070.000,00	325.964.070.000,00
JUMLAH TANAH	2.346.271.101.655,67	2.177.804.254.186,15



5.3.1.c.2) Peralatan dan Mesin	<u>2018 (Rp)</u>	<u>2017(Rp)</u>
	536.735.763.075,39	489.719.252.800,70

Peralatan dan mesin Pemerintah Kota Magelang sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp536.735.763.075,39 yang meliputi alat-alat berat, alat angkutan, alat-alat bengkel/ukur, alat-alat pertanian, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium dan alat keamanan.

Penambahan dan pengurangan asset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp70.649.834.434,20 dapat dirinci sebagai berikut :

PERALATAN DAN MESIN

Saldo Awal 2018	Rp	489.719.252.800,70
Penambahan :		
-Belanja Modal	Rp	48.115.894.079,00
-Mutasi antar OPD		10.227.373.458,91
-Belanja non Modal APBD		41.299.300,00
-Hibah pemerintah pusat		2.408.398.572,00
-Reklasifikasi Aset		7.875.476.904,30
-Belanja modal dari BOS pusat		1.918.385.408,00
-Penambahan Aset dari Komite Sekolah		25.302.000,00
-Koreksi Aset ekstra kea set intrakomptabel		1.254.000,00
-Koreksi Berita Acara		36.450.711,99
Jumlah Penambahan	Rp	70.649.834.434,20
Pengurangan :		
Mutasi antar OPD	Rp	10.227.373.458,91
Dobel catat		7.535.000,00
Reklasifikasi Aset		8.848.693.477,50
Reklas ke Aset lainnya Aset Lainnya		3.966.633.216,11
Koreksi Karena Kebijakan Akuntansi (dibawah kapitalisasi)		515.080.795,00
Koreksi Berita Acara		36.450.711,99
Koreksi kesalahan pencatatan		31.557.500,00
Jumlah Pengurangan	Rp	23.633.324.159,51
Saldo Akhir	Rp	536.735.763.075,39

**Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar
Rp70.649.834.434,20 terdapat di OPD sebagai
berikut :**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	10.848.711.558,30
Dinas Kesehatan		11.263.106.262,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar		16.642.741.669,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		831.636.580,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		246.193.230,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Satuan Polisi Pamong Praja	1.112.184.330,00
Badan Kesbangpolinmas	67.686.080,00
Dinas Sosial	197.853.000,00
Dinas Tenaga Kerja	224.425.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.886.677.730,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	448.242.100,00
DPMP4KB	341.574.160,00
Dinas Perhubungan	452.679.280,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	3.102.746.316,00
DPMP4KB	738.102.580,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	1.002.227.703,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.284.707.200,00
Dinas Pertanian dan Pangan	549.529.940,00
Dinas Perindustrian dan perdagangan	1.263.147.475,00
Sekretariat Daerah	5.232.166.934,98
DPRD & Sekretariat DPRD	845.982.130,00
Kec. Magelang Selatan	316.632.800,00
Kel. Jurangombo Selatan	6.089.000,00
Kel. Jurangombo Utara	6.089.000,00
Kel. Magersari	34.473.800,00
Kel. Rejo Selatan	36.221.000,00
Kel. Tidar Selatan	154.945.000,00
Kel. Tidar Utara	42.561.000,00
Kec. Magelang Tengah	585.886.048,59
Kel .Cacaban	47.658.491,37
Kel .Gelangan	60.612.321,83
Kel. Kemirirejo	34.063.860,91
Kel. Magelang	13.225.491,37
Kel .Panjang	31.944.000,00
Kel .Rejo Utara	196.299.474,11
Kec. Magelang Utara	504.021.200,87
Kel .Kedungsari	54.310.500,00
Kel .Kramat Selatan	90.431.635,02
Kel. Kramat Utara	91.557.643,65
Kel. Potrobangsari	65.407.313,20
Kel .Wates	51.527.500,00
Inspektorat	761.902.080,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan	303.283.080,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.075.344.880,00
PPKD	4.701.979.250,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	480.148.905,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	320.897.900,00
Jumlah Penambahan	Rp 70.649.834.434,20



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pengurangan Peralatan dan mesin sebesar Rp23.633.324.159,51 terdapat di OPD sebagai berikut :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	6.662.558.540,00
Dinas Kesehatan		2.405.146.198,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar		258.838.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		588.607.458,11
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00
Satuan Polisi Pamong Praja		112.744.531,46
Badan Kesbangpolinmas		12.293.000,00
Dinas Sosial		76.583.840,00
Dinas Lingkungan Hidup		1.583.810.600,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		1.275.000,00
DPMP4KB		117.091.000,00
Dinas Perhubungan		94.117.975,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik		1.753.734.980,00
DPMP4KB		161.137.718,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata		31.504.600,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1.468.000,00
Dinas Pertanian dan Pangan		78.490.100,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		35.666.071,00
Sekretariat Daerah		792.060.624,98
DPRD & Sekretariat DPRD		2.760.382.700,00
Kec. Magelang Selatan		312.562.300,00
Kel. Jurangombo Selatan		42.279.000,00
Kel. Jurangombo Utara		8.078.800,00
Kel. Magersari		300.000,00
Kel. Rejowinangun Selatan		8.110.000,00
Kel. Tidar selatan		1.395.000,00
Kel. Tidar Utara		13.117.000,00
Kec. Magelang Tengah		459.987.589,59
Kel. Cacaban		16.208.955,00
Kel. Gelangan		11.190.000,00
Kel. Kemirirejo		8.449.580,00
Kel. Magelang		12.072.575,00
Kel. Panjang		16.702.500,00
Kel. Rejo Utara		16.383.770,00
Kec. Magelang Utara		393.387.891,87
Kel. Kedungsari		39.221.700,00
Kel. Kramat Selatan		450.000,00
Kel. Kramat Utara		12.412.100,00
Kel. Potrobangsari		20.913.700,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan		321.395.452,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		632.021.072,00
PPKD		3.078.263.650,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		440.167.687,50
Badan Penelitian dan Pengembangan		240.742.900,00
Jumlah Pengurangan	Rp	23.633.324.159,51



Berikut ini rincian Peralatan dan Mesin per OPD :

Tabel 5.116 Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58.041.224.158,30	53.855.071.140,00
2	Dinas Kesehatan	45.236.792.557,00	36.378.832.493,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	224.634.302.062,53	208.250.398.393,53
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	11.167.079.907,30	10.924.050.785,41
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.378.676.457,66	3.396.788.829,66
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.453.106.784,25	2.206.913.554,25
7	Dinas Perhubungan	8.316.688.658,00	7.958.127.353,00
8	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	13.985.701.687,33	12.636.690.351,33
9	Dinas Lingkungan Hidup	27.792.019.090,00	25.489.151.960,00
10	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	4.280.919.137,00	3.833.952.037,00
11	Dinas Tenaga Kerja	3.464.652.295,00	3.240.227.295,00
12	Dinas Sosial	1.259.264.257,00	1.137.995.097,00
13	Dinas Perindustrian & Perdagangan	12.849.877.819,00	11.622.396.415,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.488.783.226,00	2.911.818.364,00
15	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.291.758.676,00	2.321.035.573,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	10.771.760.791,06	9.772.320.992,52
17	Badan Kesatuan Bangsa Politik & Linmas	1.576.661.901,00	1.521.268.821,00
18	DPRD & Sekretariat DPRD	11.243.412.427,00	13.157.812.997,00
19	Sekretariat Daerah	29.667.230.910,50	25.227.124.600,50
20	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.736.930.151,00	1.656.775.151,00
21	Kec. Magelang Utara	1.052.967.273,00	942.333.964,00
22	Kec. Magelang Selatan	1.325.179.215,00	1.321.108.715,00
23	Kec. Magelang Tengah	1.178.198.561,00	1.052.300.102,00
24	Kelurahan Rejowinangun Selatan	601.217.368,00	573.106.368,00
25	Kelurahan Magersari	811.570.713,00	777.396.913,00
26	Kelurahan Jurangombo Utara	698.117.103,00	700.106.903,00
37	Kelurahan Jurangombo Selatan	723.533.784,00	759.723.784,00
28	Kelurahan Tidar Utara	633.642.994,00	604.198.994,00
29	Kelurahan Tidar Selatan	887.155.465,00	733.605.465,00
30	Kelurahan Wates	503.303.513,00	451.776.013,00
31	Kelurahan Potrobangsari	760.452.341,20	715.958.728,00
32	Kelurahan Kedungsari	642.834.238,00	627.745.438,00
33	Kelurahan Kramat Utara	836.694.571,65	757.549.028,00
34	Kelurahan Kramat Selatan	620.422.488,02	530.440.853,00
35	Kelurahan Kemirirejo	662.705.225,91	637.090.945,00
36	Kelurahan Cacaban	647.420.267,37	615.970.731,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
37	Kelurahan Rejowinangun Utara	901.116.787,11	721.201.083,00
38	Kelurahan Magelang	701.537.724,37	700.384.808,00
39	Kelurahan Panjang	681.138.321,00	665.896.821,00
40	Kelurahan Gelangan	621.852.984,83	572.430.663,00
41	Inspektorat	2.526.977.538,00	1.765.075.458,00
42	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	2.668.043.739,00	2.628.062.521,50
43	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.617.962.190,00	7.174.638.382,00
44	PPKD	10.448.753.046,00	8.825.037.446,00
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.974.821.375,33	4.750.338.215,33
46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.027.067.920,00	4.743.828.720,00
47	Dinas Pertanian dan Pangan	8.344.233.375,67	7.873.193.535,67
	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	536.735.763.075,39	489.719.252.800,70

5.3.1.c.3) Gedung dan Bangunan 2018 (Rp) 2017 (Rp)
703.774.035.589,64 653.837.525.062,17

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Magelang sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar Rp703.774.035.589,64 yang berupa gedung dan bangunan.

Berikut ini penambahan dan pengurangan Bangunan dan Gedung

BANGUNAN GEDUNG

Saldo Awal	Rp	653.837.525.062,17
Penambahan :		
Mutasi		21.982.181.436,90
Belanja Modal		99.301.309.579,00
Donasi		1.536.681.000,00
Reklasifikasi		38.818.934.815,16
Komite		14.400.000,00
Jumlah Penambahan		161.653.506.831,06
Pengurangan :		
Mutasi		21.864.353.028,00
Reklasifikasi		83.221.416.952,29
Ke aset lain-lain		5.860.196.363,67
Reviu inspektorat		59.571.802,00
Kebijakan akuntansi		662.287.791,63
Koreksi		49.170.366,00
Jumlah Pengurangan		111.716.996.303,59
Saldo Akhir		703.774.035.589,64



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Penambahan Bangunan Gedung sebesar

Rp161.653.506.831,06 terdapat di OPD sebagai

berikut :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.098.445.656,00
Dinas Kesehatan	11.694.707.826,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	86.682.923.578,16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.305.094.902,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	305.407.600,00
Satuan Polisi Pamong Praja	199.476.000,00
Dinas Tenaga Kerja	201.565.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.251.265.550,00
Disdukcapil Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	232.936.500,00
Dinas Perhubungan	1.039.821.564,00
DPMPSTP	102.071.060,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	14.442.853.221,00
Dinas Pertanian dan Pangan	1.484.248.200,00
Disperindag Dinas Perindustrian & Perdagangan	1.417.073.675,00
Sekretariat Daerah	720.340.408,90
DPRD & Sekretariat DPRD	4.582.788.500,00
Kec. Magelang Selatan	995.743.700,00
Kel. Jurangombo Selatan	166.288.000,00
Kel. Jurangombo Utara	164.145.700,00
Kel. Magersari	238.952.000,00
Kel. Tidar Utara	187.517.000,00
Kel. Tidar Selatan	121.947.000,00
Kec. Magelang Tengah	451.735.000,00
Kel. Magelang	197.120.000,00
Kel. Panjang	77.849.000,00
Kel. Rejo Utara	122.400.000,00
Kec. Magelang Utara	425.141.000,00
Kel. Kramat Utara	95.144.000,00
Kel. Potrobangsari	81.030.000,00
Kel. Wates	191.617.000,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan	192.896.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.482.612.200,00
PPKD	3.585.959.000,00
Badan Pelatihan dan Pengembangan	114.391.000,00
Jumlah Penambahan	161.653.506.841,06

Pengurangan sebesar Rp111.716.996.303,59 terdapat

pada OPD sebagai berikut :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.213.330.396,00
Dinas Kesehatan	6.184.732.715,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	56.783.403.458,92
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.695.792.552,00
Dinas Tenaga Kerja	97.467.600,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Dinas Perhubungan	3.313.423.764,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	632.687.338,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	723.336.500,00
Dinas Pertanian dan Pangan	365.098.866,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	212.065.250,00
Sekretariat Daerah	335.265.393,67
DPRD & Sekretariat DPRD	2.237.518.900,00
Kec. Magelang Selatan	904.959.700,00
Kel. Jurangombo Utara	46.414.000,00
Kel. Tidar Utara	23.890.450,00
Kec. Magelang Tengah	408.834.000,00
Kel. Panjang	32.986.500,00
Kec. Magelang Utara	367.791.000,00
Kel. Kramat Utara	23.808.920,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	399.675.700,00
PPKD	2.714.513.300,00
Jumlah Pengurangan	111.716.996.303,59
JUMLAH BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2018	Rp 703.774.035.589,64

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp161.653.506.831,06 berasal dari:

Belanja Modal	Rp	99.301.309.579,00
Hibah asset dari Kementerian PUPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		1.536.681.000,00
Mutasi aset antar OPD		21.982.181.436,90
Reklasifikasi aset yang terjadi di OPD		38.818.934.815,16
Komite sekolah		14.400.000,00

Pengurangan aset gedung dan bangunan sebesar Rp111.716.996.303,59 berasal dari:

Reklas ke aset lain-lain	Rp	5.860.196.363,67
Nilainya dibawah batas kapitalisasi		662.287.791,63
Berkurang karena review inpektorat (setoran karena kekurangan volume)		59.571.802,00
Reklasifikasi aset yang terjadi di OPD		83.221.416.952,29
Koreksi Aset		49.170.366,00
Mutasi Aset		21.864.353.028,00

Berikut ini rincian Gedung dan Bangunan per OPD :

Tabel 5.117 Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 Audited (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	138.127.843.185,90	133.242.727.935,90
2	Dinas Kesehatan	37.599.638.389,14	32.089.663.278,14



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 Audited (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	83.401.561.750,54	53.502.041.631,30
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126.609.518.375,00	139.000.216.025,00
5	Badan Perencanaan pembangunan Daerah	2.437.299.900,00	2.244.403.900,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.870.814.640,00	3.565.407.040,00
7	Dinas Perhubungan	14.480.042.505,50	16.753.644.705,50
8	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	654.567.065,00	654.567.065,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	20.149.490.650,00	18.898.225.100,00
12	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	2.522.585.731,97	2.289.649.231,97
13	Dinas Tenaga Kerja	5.480.275.400,00	5.376.178.000,00
14	Dinas Sosial	252.402.330,00	252.402.330,00
15	Dinas Perindustrian & Perdagangan	94.186.716.941,31	92.981.708.516,31
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.263.614.373,00	1.161.543.313,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata	18.894.629.003,00	5.084.463.120,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	3.749.953.300,00	3.550.477.300,00
20	Badan Kesatuan Bangsa Politik & Perlindungan Masyarakat	725.804.682,86	725.804.682,86
21	DPRD & Sekretariat DPRD	9.996.114.455,00	7.650.844.855,00
22	Sekretariat Daerah	34.820.189.550,23	34.435.114.535,00
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.593.153.000,00	1.478.762.000,00
24	Kecamatan Magelang Utara	1.885.008.200,00	1.827.658.200,00
25	Kecamatan Magelang Selatan	2.658.551.850,00	2.567.767.850,00
26	Kecamatan Magelang Tengah	4.004.200.500,00	3.961.299.500,00
27	Kelurahan Rejowinangun Selatan	854.486.250,00	854.486.250,00
28	Kelurahan Magersari	1.536.377.150,00	1.297.425.150,00
29	Kelurahan Jurangombo Utara	1.912.404.605,00	1.794.672.905,00
30	Kelurahan Jurangombo Selatan	1.346.719.750,00	1.180.431.750,00
31	Kelurahan Tidar Utara	1.400.170.850,00	1.236.544.300,00
32	Kelurahan Tidar Selatan	2.495.910.550,00	2.373.963.550,00
33	Kelurahan Wates	1.435.321.275,00	1.243.704.275,00
34	Kelurahan Potrobangsari	1.295.774.200,00	1.214.744.200,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 Audited (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
35	Kelurahan Kedungsari	764.799.317,00	764.799.317,00
36	Kelurahan Kramat Utara	1.622.381.180,00	1.551.046.100,00
37	Kelurahan Kramat Selatan	2.453.554.607,00	2.453.554.607,00
38	Kelurahan Kemirirejo	788.351.912,00	788.351.912,00
39	Kelurahan Cacaban	872.607.500,00	872.607.500,00
40	Kelurahan Rejowinangun Utara	2.129.928.500,00	2.007.528.500,00
41	Kelurahan Magelang	1.379.461.750,00	1.182.341.750,00
42	Kelurahan Panjang	1.084.468.800,00	1.039.606.300,00
43	Kelurahan Gelangan	712.002.000,00	712.002.000,00
44	Inspektorat	0,00	0,00
45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.436.206.899,00	3.353.270.399,00
48	PPKD	19.941.825.032,00	19.070.379.332,00
49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.294.763.877,00	5.294.763.877,00
50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.296.736.170,00	19.020.072.670,00
51	Dinas Pertanian Pangan	22.355.807.637,19	21.236.658.303,19
	JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN	703.774.035.589,64	653.837.525.062,17

5.3.1.c.4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	944.832.338.718,89	844.320.054.861,76

Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Magelang sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar Rp944.832.338.718,89. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp844.320.054.861,76 terdapat penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal 2018 **844.320.054.861,76**

Penambahan sebesar Rp114.102.061.439,95 dengan rincian :

Mutasi	Rp	34.424.987.994,95
Belanja Modal		70.172.294.944,00
Hibah		4.457.227.484,00
Reklasifikasi		4.977.067.017,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Reviu Inspektorat		70.484.000,00
Pengurangan sebesar Rp13.589.777.582,82 dengan rincian :		
Mutasi :	Rp	10.612.639.924,00
Reklasifikasi		2.819.394.415,00
Ke aset lain-lain		14.830.900,00
Rivi Inspektorat		142.712.343,71
Koreksi		0,11
Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 sebesar Rp114.102.061.439,95 terdapat pada OPD berikut :		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	7.335.900,00
Dinas Kesehatan		1.545.152.476,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar		275.291.710,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		47.360.870.716,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		50.188.549.038,95
Dinas Sosial		24.842.000,00
Dinas Tenaga Kerja		34.750.000,00
Dinas Lingkungan Hidup		5.473.100.800,00
Dinas Perhubungan		2.423.247.567,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata		538.298.948,00
Dinas Pertanian dan Pangan		221.502.900,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		9.900.000,00
Badan Pengelola Keuagandan Aset Daerah		505.837.700,00
PPKD		5.493.381.684,00
Jumlah Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 sebesar 13.589.777.582,82 terdapat pada OPD berikut :	Rp	114.102.061.439,95
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2.360.900,00
Dinas Kesehatan		535.571.109,00
RSU Tidar		56.523.100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		5.261.652.738,71
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		4.266.712.720,11
DPMP4KB		3.000.000,00
Dinas Perhubungan		2.234.042.367,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		538.298.948,00
Keluraha Jurangombo Selatan		144.223.000,00
Kelurahan Kedungsari		41.555.000,00
Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah		505.837.700,00
Jumlah Pengurangan Tahun 2018		13.589.777.582,82
Saldo Akhir 2018	Rp	944.832.338.718,89



Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp114.102.061.439,95 antara lain berasal dari:

- Belanja modal sebesar Rp70.172.294.944,00.
- Mutasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp34.424.987.994,95.
- Hibah Rp4.457.227.484,00 dari Kementerian PUPR.
- Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp4.977.067.017,00.
- Reviu dari inspektorat sebesar Rp70.484.000,00 karena belanja pemeliharaan jalan yang dikapitalisasi menjadi aset jalan khusus.

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp13.589.777.582,82 diantaranya berasal dari:

- Mutasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp10.612.839.924,00.
- Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp2.819.394.415,00.
- Reklas ke aset lain-lain berdasarkan berita acara koreksi antara OPD dengan BPKAD sebesar Rp14.830.900,00.
- Review inspektorat sebesar Rp142.712.343,71 karena saat pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2017 terdapat kekurangan volume pada belanja modal jalan, sehingga pihak ketiga mengembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp142.712.343,71 sampai dengan saat reviu inspektorat nilai atas pengembalian tersebut belum mengurangi nilai aset.
- Koreksi 0,11 karena menyesuaikan SK jalan.

Berikut ini rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD :

Tabel 5.118 Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 Audited (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.390.625.558,00	1.385.650.558,00
2	Dinas Kesehatan	5.487.475.119,00	4.477.893.752,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	10.312.064.345,10	10.093.295.735,10
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	688.525.500.151,75	646.426.282.174,46
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.842.860,00	5.842.860,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	165.136.061.859,77	119.214.225.540,93
7	Dinas Perhubungan	812.831.240,00	623.626.040,00
8	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	31.100.000,00	31.100.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	36.870.974.835,00	31.397.874.035,00
12	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	358.271.624,00	358.271.624,00
13	Dinas Tenaga Kerja	65.258.170,00	30.508.170,00
14	Dinas Sosial	70.142.000,00	45.300.000,00
15	Dinas Perindustrian & Perdagangan	5.754.208.440,27	5.744.308.440,27
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.707.000,00	49.707.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 Audited (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	56.218.474,00	56.218.474,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	12.400.000,00	12.400.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa Politik & Linmas	21.063.255,00	21.063.255,00
21	DPRD & Sekretariat DPRD	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	1.816.084.105,00	1.816.084.105,00
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	54.838.127,00	54.838.127,00
24	Kecamatan Magelang Utara	16.051.290,00	16.051.290,00
25	Kecamatan Magelang Selatan	14.764.290,00	14.764.290,00
26	Kecamatan Magelang Tengah	599.149.000,00	599.149.000,00
27	Kelurahan Rejowinangun Selatan	668.407.400,00	668.407.400,00
28	Kelurahan Magersari	578.384.330,00	578.384.330,00
29	Kelurahan Jurangombo Utara	575.043.600,00	575.043.600,00
30	Kelurahan Jurangombo Selatan	734.974.090,00	879.197.090,00
31	Kelurahan Tidar Utara	1.324.826.580,00	1.324.826.580,00
32	Kelurahan Tidar Selatan	521.667.161,00	521.667.161,00
33	Kelurahan Wates	1.197.049.250,00	1.197.049.250,00
34	Kelurahan Potrobangsari	1.143.453.500,00	1.143.453.500,00
35	Kelurahan Kedungsari	1.586.390.722,00	1.627.945.722,00
36	Kelurahan Kramat Utara	574.685.100,00	574.685.100,00
37	Kelurahan Kramat Selatan	614.994.000,00	614.994.000,00
38	Kelurahan Kemirirejo	770.642.560,00	770.642.560,00
39	Kelurahan Cacaban	885.069.600,00	885.069.600,00
40	Kelurahan Rejowinangun Utara	1.553.079.350,00	1.553.079.350,00
41	Kelurahan Magelang	692.914.475,00	692.914.475,00
42	Kelurahan Panjang	830.480.230,00	830.480.230,00
43	Kelurahan Gelangan	518.236.360,00	518.236.360,00
44	Inspektorat	0,00	0,00
45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	352.049.775,00	352.049.775,00
49	PPKD	5.990.516.230,00	497.134.546,00
50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.728.600,00	15.728.600,00
51	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.359.066.816,00	1.359.066.816,00
52	Dinas Pertanian dan Pangan	4.887.047.246,00	4.665.544.346,00
	JUMLAH JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	944.832.338.718,89	844.320.054.861,76



	<u>2018 (Rp)</u>	<u>2017 (Rp)</u>
5.3.1.c.1) Aset Tetap Lainnya	26.398.360.505,91	27.793.539.650,19

Aset Tetap lainnya Pemerintah Kota Magelang sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp26.398.360.505,91 yang meliputi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan, ikan, tanaman. Apabila dibandingkan dengan Aset tetap lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp27.793.539.650,19 terdapat penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

ASET TETAP LAINNYA

Saldo Awal Tahun 2018 Rp **27.793.539.650,19**

Penambahan tahun 2018

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.860.125.926,72
Dinas Kesehatan		4.500.000,00
Rumah Sakit Umum Tidar		178.800.000,00
Dinas Sosial		150.100,00
Dinas Lingkungan Hidup		534.333.500,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata		191.180.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		68.150.000,00
Sekretarian Daerah Bagian Tata Pemerintahan		428.800,00
Sekretariat Daerah Bagian Hukum		4.910.000,00
Sekretariat DPRD		18.136.550,00
Kecamatan Magelang selatan		10.242.000,00
Kel. Jurangombo Selatan		3.000.000,00
Kel Magersari		4.800.000,00
Kel rejoinangun selatan		3.140.000,00
Kel Tidar Utara		2.442.000,00
Kec. Magelang Utara		1.100.000,00
Kel. Kramat Utara		1.100.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		15.195.000,00
BKPP		1.608.425,00
Balitbang		1.400.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		233.822.388,00

Jumlah Penambahan Tahun 2018 Rp **3.138.564.689,72**

Pengurangan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	3.714.823.980,00
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar		25.250.000,00
Dinas Sosial		150.100,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata		7.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup		345.552.580,00
Dinas Perhubungan		7.150.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		180.133.349,00
Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan		308.800,00
Sekretariat Daerah Bagian PKP		217.825.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Kecamatan Magelang selatan	10.242.000,00
Kel. Jurangombo Selatan	3.150.000,00
Kel. Jurangombo Utara	9.997.600,00
Kel Magersari	4.800.000,00
Kel Tidar Utara	2.442.000,00
Kec. Magelang Utara	1.350.000,00
BKPP	1.608.425,00
Balitbang	1.400.000,00
Kel. Kramat Utara	275.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	285.000,00
Jumlah Pengurangan Tahun 2018	Rp 4.533.743.834,00

Berikut ini rincian Aset Tetap Lainnya per OPD :

Tabel 5.119 Ssaldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.332.590.341,05	11.187.288.394,33
2	Dinas Kesehatan	18.191.500,00	13.691.500,00
3	RSUD Tidar	493.185.100,00	339.635.100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.842.315.203,82	2.842.315.203,82
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.124.550,00	8.124.550,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	78.689.688,00	78.689.688,00
7	Dinas Perhubungan	22.573.000,00	29.723.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	34.300.000,00	34.300.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	11.987.554.661,00	11.798.773.741,00
10	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	480.000,00	480.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja	2.748.000,00	2.748.000,00
12	Dinas Perindustrian & Perdagangan	118.725.294,00	50.575.294,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.449.200,00	8.449.200,00
14	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	246.763.500,00	62.583.500,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	1.375.000,00	1.375.000,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Politik & Perlindungan Masyarakat	2.296.000,00	2.296.000,00
17	DPRD & Sekretariat DPRD	107.523.150,00	89.386.600,00
18	Sekretariat Daerah	202.448.700,00	415.243.700,00
19	Badan Penelitian dan Pengembangan	6.261.400,00	6.261.400,00
20	Kecamatan Magelang Utara	2.800.000,00	3.050.000,00
21	Kecamatan Magelang Selatan	4.350.000,00	4.350.000,00
22	Kecamatan Magelang Tengah	3.300.000,00	3.300.000,00
23	Kelurahan Rejowinangun Selatan	4.685.000,00	1.545.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Kelurahan Magersari	7.363.850,00	7.363.850,00
25	Kelurahan Jurangombo Utara	3.799.200,00	13.796.800,00
26	Kelurahan Jurangombo Selatan	2.208.000,00	2.358.000,00
27	Kelurahan Tidar Utara	2.432.500,00	2.432.500,00
28	Kelurahan Tidar Selatan	3.423.000,00	3.423.000,00
29	Kelurahan Wates	136.521.324,88	136.521.324,88
30	Kelurahan Potrobangsari	10.178.791,00	10.178.791,00
31	Kelurahan Kedungsari	700.000,00	700.000,00
32	Kelurahan Kramat Utara	11.586.000,00	10.761.000,00
33	Kelurahan Kramat Selatan	2.310.212,00	2.310.212,00
34	Kelurahan Kemirejo	3.167.050,00	3.167.050,00
35	Kelurahan Cacaban	84.776.883,00	84.776.883,00
36	Kelurahan Rejowinangun Utara	740.000,00	740.000,00
37	Kelurahan Magelang	1.400.000,00	1.400.000,00
38	Kelurahan Panjang	111.325,00	111.325,00
39	Kelurahan Gelangan	3.126.207,16	3.126.207,16
40	Inspektorat	14.630.500,00	14.630.500,00
41	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	12.107.625,00	12.107.625,00
42	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	71.215.000,00	56.305.000,00
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.613.000,00	1.613.000,00
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	378.971.580,00	325.282.541,00
45	Dinas Pertanian dan Pangan	116.249.170,00	116.249.170,00
	JUMLAH ASET TETAP LAINNYA	26.398.360.505,91	27.793.539.650,19

Aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp3.138.564.689,72 berasal dari:

- Mutasi dari Organisasi Perangkat Daerah lain sebesar Rp11.342.000,00
- Belanja Modal APBD tahun 2018 sebesar Rp662.032.988,00
- Belanja modal BOS pusat sebesar Rp729.634.200,00
- Belanja non modal APBD sebesar Rp10.242.000,00
- Donasi dari Perpustakaan Nasional RI sebesar Rp140.916.600,00
- Reklasifikasi aset sebesar Rp1.584.396.901,72

Sedangkan berkurangnya aset tetap lainnya sebesar Rp4.533.743.834,00 karena:

- Mutasi ke Organisasi Perangkat Daerah lain sebesar Rp11.342.000,00
- Reklasifikasi aset sebesar Rp4.016.599.085,00



- Terdapat buku-buku yang nilainya dibawah kapitalisasi sebesar Rp252.330.149,00,
- Pengurangan berdasarkan Berita Acara Koreksi antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mengenai aset tetap lainnya karena barang rusak/rusak berat sehingga direklas ke aset lain-lain sebesar Rp253.472.600,00.

5.3.1.c.2)	Konstruksi Dalam	<u>2018 (Rp)</u>	<u>2017 (Rp)</u>
	Pengerjaan	67.361.492.107,00	25.912.529.715,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2018 sebesar

Rp67.361.492.107,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Magelang tahun 2018 terdiri dari:

KDP Tanah untuk bangunan gedung	231.316.080,00
KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.256.623.369,00
KDP Tugu Peringatan	3.097.639.250,00
KDP Jalan	1.146.269.972,00
KDP Jembatan	98.271.000,00
KDP Bangunan Air Bersih/Baku	206.060.026,00
KDP Bangunan air kotor	928.807.910,00
KDP Instalasi Air Kotor	108.458.000,00
KDP	<u>288.046.500,00</u>
Jumlah KDP Tahun 2018	67.361.492.107,00

Tambah kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal Tahun 2018	25.912.529.715,00
Penambahan :	
- Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	21.546.870.193,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.717.003.500,00
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	647.428.200,00
- Dinas Lingkungan Hidup	58.040.500,00
-Satuan Polisi Pamong Praja	10.611.400,00
-Dinas Perhubungan	32.430.080,00
-Dinas Perindustrian dan Perdagangan	515.601.000,00
-Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.220.600.286,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

-Inspektorat	239.924.000,00
-Badan Penelitian dan Pengembangan	4.135.750,00
Jumlah Penambahan Tahun 2018	44.992.644.909,00

Pengurangan :

- Rumah Sakit Umum daerah Tidar	522.662.300,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.539.057.052,00
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	393.080.140,00
- Dinas Lingkungan Hidup	66.810.350,00
- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.000.000,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.072.675,00
Jumlah Pengurangan Tahun 2018	3.543.682.517,00

**5.3.1.c 7) Akumulasi
Penyusutan**

	<u>2018 (Rp)</u>	<u>2017 (Rp)</u>
	1.135.441.215.039,53	1.014.513.243.155,83

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar **Rp1.135.441.215.039,53** Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.120 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	380.516.110.973,44	315.162.711.408,95
2	Gedung dan Bangunan	126.954.989.715,45	120.586.505.893,76
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	627.970.114.350,64	578.764.025.853,13
4	Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	1.135.441.215.039,53	1.014.513.243.155,83

Perhitungan akumulasi penyusutan tahun 2018 sudah memperhitungkan kapitalisasi asset, yang semula merupakan asset induk, sekarang sudah dikapitalisasi menjadi asset induk dan anak. Perlakuan asset kapitalisasi akan berpengaruh terhadap perhitungan akumulasi penyusutan awal.



5.3.1.d. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

5.3.1.e. Aset Lainnya	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	75.927.365.558,65	52.575.828.848,65

Aset Lainnya

Tahun 2018 adalah sebesar Rp75.927.365.558,65 yang meliputi kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain. Apabila dibandingkan dengan Aset Lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp52.575.828.848,65 terdapat kenaikan sebesar Rp23.351.536.710,00.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.121 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018

No	Akun	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2018		Saldo per 31 Des 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.468.000.000,00	0,00	0,00	12.468.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud	11.286.514.877,00	2.525.919.105,00	168.360.750,00	13.644.073.232,00
3	Amortisasi	(9.756.948.720,46)	(1.141.462.911,94)	(92.137.010,00)	(10.806.274.622,40)
4	Aset Lain-Lain	63.225.375.526,11	36.189.216.633,57	14.187.302.307,97	85.227.289.851,71
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(24.647.112.834,00)	(12.446.283.991,29)	(12.487.673.922,63)	(24.605.722.902,66)
	Jumlah	52.575.828.848,65	25.127.388.835,34	1.775.852.125,34	75.927.365.558,65

5.3.1.e.1) Kemitraan

Kemitraan adalah perjanjian antara Pemerintah Kota Magelang dengan pihak ketiga yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Aset Kemitraan sebesar Rp12.468.000.000,00, terdiri dari:

- Sebidang Tanah di Kel. Tidar Selatan dengan sertifikat Hak Pengelolaan (HPI) No. 5 seluas 16.870 m² atas nama Pemerintah Kota Magelang, dengan total nilai tanah tercatat dalam KIB dan Neraca sebesar Rp4.038.750.000,00 berdasarkan nilai tanah pada Daftar barang Milik daerah yang dimanfaatkan dalam Kerjasama Kemitraan Pembangunan Pasar Gotong Royong.

Pasar Gotong Royong dibangun dengan pola kemitraan melalui mekanisme kerja sama Bangun Serah Guna oleh PT Yoga Guna Sakti yang berkedudukan di Jalan Diponegoro 109 Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur selama 20 Tahun (yang akan berakhir pada tanggal 22 Juli 2028) yang dituangkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT Yoga Guna Sakti Nomor 12 Tahun 2007- Nomor 10/YGS/II/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Pekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang. Selanjutnya diubah dengan Perjanjian Kerjasama Nomor



43 Tahun 2007- Nomor 017/PP/YGS/XII/2007 dan terakhir diubah dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 12 Tahun 2010 - Nomor 019/PP/YGS/VIII/2010. Setelah jangka waktu 20 Tahun berakhir, tanah dan bangunan kios/los menjadi hak Pemerintah Kota Magelang. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Pihak Kedua (investor) mempunyai kewajiban memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama (Pemerintah Kota Magelang) sejumlah Rp1.724.217.000,00 berupa penggantian sewa pemakaian kios dan los selama tiga tahun (tahun 2004 s.d. 2006) sebesar Rp514.875.000,00, pemutihan biaya balik nama kios dan los sebesar Rp24.065.000,00 dan kewajiban bayar denda keterlambatan sebesar Rp737.400.000,00 dan membayar IMB sebesar Rp447.877.000,00.

- b) Sebidang Tanah di Kelurahan Wates (dulu masuk Kelurahan Potrobangsari) dengan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3 seluas 5.645m² atas nama Pemerintah Kota Magelang, dengan total nilai sebesar Rp3.669.250.000,00 berdasarkan nilai tanah pada Daftar Barang Milik daerah yang dimanfaatkan untuk kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha (Pasar Kebonpolo)

Pasar Kebonpolo dibangun oleh PT Karsa Bayu Bangun Perkasa yang berkedudukan di Jakarta dengan bentuk kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dengan jangka waktu 20 tahun berdasarkan akta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada Nomor 18 tanggal 12 Desember 2001. Pihak Kedua sesuai akta perjanjian kerjasama menyertakan modal sebesar Rp4.849.443.000,00 dalam bentuk biaya persiapan dan biaya pembangunan los dan kios Pasar Kebonpolo.

- c) Sebidang Tanah Pasar Rejowinangun, sebagian dari sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2 seluas 4.760 m² (dari total luas 21.560m²) atas nama Pemerintah Kota Magelang dengan total nilai tercatat di KIB dan Neraca sebesar Rp4.760.000.000,00 berdasarkan nilai tanah pada daftar barang milik daerah yang dimanfaatkan untuk kerjasama Bangun Guna Serah Pasar Rejowinangun (sebagian)

Biaya Pembangunan Pasar Rejowinangun berupa toko, kios, sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rejowinangun senilai Rp29.002.840.000,00.

Pasar Rejowinangun di bangun oleh PT PUTRA WAHID PRATAMA bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman 97 Salatiga, PT KUNTJUP berkedudukan di Salatiga, KSO berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT Putra Wahid Pratama-PT Kuntjup, KSO Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011, Nomor 21/PWPK/VIII/2011 selanjutnya diubah dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 04 Tahun 2012, Nomor 36/PWPK/V/2012, 8 Mei 2012 dan terakhir diubah Nomor 13.1 Tahun 2012, Nomor 58/PWPK/IX/2012 tentang Perubahan Kedua



atas Perjanjian Kejasama Pembangunan Pasar Rejowinangun tanggal 24 September 2012. Perjanjian tersebut diperbaharui dengan Perjanjian kerjasama nomor 5 Tahun 2013, nomor 72/PWPK/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang Perjanjian kerjasama ketiga.

Jangka waktu perjanjian kerjasama selama 30 tahun (berakhir tahun 2043). Dalam perjanjian kerjasama Pasar Rejowinangun tersebut, Pihak Kedua diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Pihak Kedua selama 30 tahun di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kota Magelang. Selanjutnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Pihak Kedua tersebut dilakukan pemecahan ke dalam beberapa HGB kios-kios yang dapat dijual haknya kepada pihak lain sebatas masa berlaku HGB 30 tahun sesuai dengan perjanjian. Apabila jangka waktu perjanjian berakhir maka hak atas tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Kota Magelang.

5.3.1.e.2) Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp13.644.073.232,00 terdiri dari :

Tabel 5.122 Rincian Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2018

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2018 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
Aset tak berwujud	11.286.514.877,00	2.525.919.105,00	168.360.750,00	13.644.073.232,00

Tabel 5.123 Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018

Uraian	Nilai Aset tak berwujud	Amortisasi 2017	Nilai Buku per 31 Desember 2018
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Aset Tak Berwujud	13.644.073.232,00	(10.806.274.622,40)	2.837.798.609,60

Mutasi Aset Tak Berwujud selama tahun 2018

ASET TAK BERWUJUD

awal Tahun 2018 Rp 11.286.514.877,00

Penambahan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 61.000.000,00

Dinas Kesehatan 82.623.705,00

Rumah Sakit Umum Daerah Tidar 915.000.000,00

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 15.000.000,00

Dinas Tenaga Kerja 60.750.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	89.659.000,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	390.092.000,00
DPMPTSP	79.167.000,00
Sekretariat Daerah	160.608.000,00
Kec. Magelang Tengah	6.499.300,00
Inspektorat	25.450.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.618.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	487.287.100,00
PPKD	49.500.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	47.665.000,00
Jumlah Penambahan Th.2018	Rp 2.525.919.105,00
Pengurangan	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000,00
Badan Litbang	4.135.750,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	49.500.000,00
PPKD	99.725.000,00
Jumlah Pengurangan Th.2018	Rp 168.360.750,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Th.2018	Rp 13.644.073.232,00

Berikut ini rincian Aset Tak Berwujud per OPD :

Tabel 5.124 Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.836.883.138,00	1.775.883.138,00
2	Dinas Kesehatan	274.688.344,00	194.044.639,00
3	Puskesmas Magelang Selatan	69.970.499,00	69.970.499,00
4	Puskesmas Jurangombo	76.934.781,00	76.934.781,00
5	Puskesmas Magelang Tengah	92.843.352,00	90.863.352,00
6	Puskesmas Kerkopan	69.970.499,00	69.970.499,00
7	Puskesmas Magelang Utara	97.827.638,00	97.827.638,00
8	RSUD Tidar	2.651.213.000,00	1.736.213.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	242.187.550,00	257.187.550,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	35.244.250,00	20.244.250,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	45.974.000,00	45.974.000,00
12	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan	9.340.000,00	9.340.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perlindungan Masyarakat		
13	Dinas Lingkungan Hidup	300.202.700,00	300.202.700,00
14	Dinas Sosial	12.950.000,00	12.950.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja	90.852.293,00	30.102.293,00
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.382.271.815,00	1.292.612.815,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.000.000,00	3.000.000,00
18	Dinas Perhubungan	166.944.000,00	166.944.000,00
19	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	1.563.898.850,00	1.173.806.850,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	275.145.200,00	195.978.200,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	568.777.473,00	568.777.473,00
22	Dinas Pertanian dan Pangan	65.221.750,00	65.221.750,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.427.800,00	49.427.800,00
24	Setda Bagian Tata Pemerintahan	80.000.000,00	80.000.000,00
25	Setda Bagian Organisasi	49.750.000,00	0,00
26	Setda Bagian Hukum	37.422.000,00	18.205.000,00
27	Setda Bagian Pembangunan	99.845.000,00	48.950.000,00
28	Setda Bagian Kesejahteraan rakyat	40.746.000,00	0,00
29	Setda Bagian Hubungan Masyarakat	16.775.000,00	16.775.000,00
30	Setda Bagian PKP	0,00	0,00
31	Setda Bagian Umum	0,00	0,00
32	Kec. Magelang Selatan	14.669.600,00	14.669.600,00
33	Kec. Magelang Tengah	15.001.300,00	8.502.000,00
34	Kec. Magelang Utara	10.984.000,00	10.984.000,00
35	Inspektorat	64.849.000,00	39.399.000,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.231.545.500,00	1.175.927.500,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.560.984.300,00	1.123.197.200,00
38	PPKD	97.444.800,00	147.669.800,00
39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	312.012.800,00	264.347.800,00
40	Badan Penelitian dan Pengembangan	30.275.000,00	34.410.750,00
	JUMLAH	13.644.073.232,00	11.286.514.877,00

5.3.1.e. 3) Aset Lain-Lain

Nilai buku Aset Lain-Lain setelah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.125 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018

Uraian	Nilai Aset Lain-Lain	Akumulasi Penyusutan 2018	Nilai Buku per 31 Desember 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aset lain-lain	85.227.289.851,71	(24.605.722.902,66)	60.621.566.949,05



Penjelasan atas mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

Terdapat berita acara koreksi dari SKPD tentang reklasifikasi dari asset tetap ke asset lain-lain dikarenakan kondisi barang yang rusak berat dan atau hilang atau sudah dibongkar tetapi belum dihapuskan dari daftar barang milik daerah dan ada pula berita acara koreksi asset lain-lain intracomptable yang direklas ke extracomptable karena nilainya dibawah kapitalisasi tetapi kondisi barangnya rusak berat dan ada pula barang yang hilang tidak ditemukan.

Mutasi aset Lain-lain Tahun 2018

Saldo awal Tahun 2018	Rp	63.225.375.526,11
Penambahan		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		8.871.900,00
Dinas Kesehatan		130.651.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		853.548.929,11
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar		3.299.442.101,29
Dinas Sosial		55.987.840,00
Dinas Lingkungan Hidup		119.903.830,00
Dinas Tenaga Kerja		97.467.600,00
Dinas Perhubungan		25.204.599.528,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		1.641.268.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		159.597.718,00
Dinas Pertanian dan Pangan		1.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		244.325.321,00
Sekretariat Daerah		251.385.394,00
Sekretariat DPRD		2.242.850.900,00
Kec. Magelang Selatan		37.153.500,00
Kel. Jurangombo Selatan		42.429.000,00
Kel. Jurangombo Utara		64.490.400,00
Kel. Tidar Utara		23.890.450,00
Kec. Magelang Tengah		76.183.950,00
Kel. Cacaban		15.708.955,00
Kel. Gelangan		11.190.000,00
Kel. Kemirirejo		8.449.580,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Kel. Magelang	12.072.575,00
Kel. Panjang	49.689.000,00
Kel. Rejowinangun Utara	16.383.770,00
Kec. Magelang Utara	38.931.300,00
Kel. Kedungsari	39.221.700,00
Kel. Kramat Utara	36.221.020,00
Kel. Potrobangsari	20.913.700,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	320.470.452,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	664.106.958,00
PPKD	287.060.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	86.515.362,50
Badan Penelitian dan Pengembangan	40.218.350,00
Jumlah Penambahan Th.2018	Rp 36.202.200.583,90
Pengurangan	
Dinas Kesehatan	332.054.843,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	531.521.508,89
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	6.798.509.252,00
Satuan Polisi Pamong Praja	149.466.161,90
Badan Kesatuan, Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	65.713.550,00
Dinas Lingkungan Hidup	225.945.303,00
Dinas Tenaga Kerja	97.467.600,00
DPMP4KB	127.756.325,00
Dinas Perhubungan	185.313.496,67
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	389.774.300,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	53.571.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.426.000,00
Dinas Pertanian dan Pangan	11.799.750,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.147.933.232,00
Sekretariat Daerah	1.988.555.772,50
Kel. Jurangombo Utara	67.770.750,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Kel. Rejowinangun Selatan	13.350.000,00
Kel.Tidar Selatan	39.574.500,00
Kel. Tidar Utara	27.422.450,00
Kec. Magelang Tengah	18.537.900,00
Kel. Gelangan	11.578.000,00
Kel. Kemirirejo	74.863.500,00
Kel. Rejowinangun Utara	103.880.000,00
Kec. Magelang Utara	53.582.000,00
Kel. Kedungsari	5.475.000,00
Kel. Kramat Utara	22.375.050,00
Kel. Potrobangsari	431.350.000,00
Kel. Wates	17.065.400,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	221.364.433,34
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	561.054.780,00
PPKD	144.000.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	180.415.200,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	89.819.200,00
Jumlah Pengurangan Th.2018	Rp 14.200.286.258,30
Jumlah Aset Lain-lain Th.2018	Rp 85.227.289.851,71

Berikut rincian Aset Lain – lain masing-masing OPD per 31 Desember 2018:

Tabel 5.126 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.870.262.255,00	22.861.390.355,00
2	Dinas Kesehatan	510.727.600,00	712.131.443,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	5.635.756.476,29	9.134.823.627,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.528.471.380,54	15.206.443.960,32
5	Satuan Polisi Pamong Praja	156.850.494,43	306.316.656,33
6	Badan Kesatuan, Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	65.713.550,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	429.242.580,00	535.284.053,00
8	Dinas Sosial	55.987.840,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	83.044.450,00	83.044.450,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	212.159.056,00	339.915.381,00
11	Dinas Perhubungan	26.330.237.528,00	1.310.951.496,67
12	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	1.641.268.500,00	389.774.300,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	159.597.718,00	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	0,00	53.571.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.810.500,00	101.236.500,00
16	Dinas Pertanian dan Pangan	24.240.000,00	35.039.750,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	317.508.821,00	1.221.116.732,00
18	Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan	33.283.900,00	95.421.000,00
19	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	32.337.389,00	86.528.611,00
20	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	50.370.650,00	50.370.650,00
21	Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan	17.298.500,00	18.871.250,00
22	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	15.149.350,00	23.948.750,00
23	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat	195.003.872,00	195.003.872,00
24	Sekretariat Daerah Bagian PKP	756.683.737,95	2.225.713.883,45
25	Sekretariat Daerah Bagian Umum	242.486.361,00	383.926.122,00
26	Sekretariat DPRD	2.242.850.900,00	0,00
27	Kecamatan Magelang Selatan	37.153.500,00	0,00
28	Kelurahan Jurangombo Selatan	42.429.000,00	0,00
29	Kelurahan Jurangombo Utara	22.726.400,00	26.006.750,00
30	Kelurahan Rejowinangun Selatan	0,00	13.350.000,00
31	Kelurahan Tidar Selatan	0,00	39.574.500,00
32	Kelurahan Tidar Utara	10.906.500,00	14.438.500,00
33	Kecamatan Magelang Tengah	76.183.950,00	18.537.900,00
34	Kelurahan Cacaban	345.268.955,00	329.560.000,00
35	Kelurahan Gelangan	43.374.000,00	43.762.000,00
36	Kelurahan Kemirirejo	8.449.580,00	74.863.500,00
37	Kel. Magelang	12.072.575,00	0,00
38	Kelurahan Panjang	49.689.000,00	0,00
39	Kelurahan Rejowinangun Utara	96.383.770,00	183.880.000,00
40	Kecamatan Magelang Utara	38.931.300,00	53.582.000,00
41	Kelurahan Kedungsari	213.621.700,00	179.875.000,00
42	Kelurahan Kramat Utara	36.221.020,00	22.375.050,00
43	Kelurahan Potrobangsari	587.913.700,00	998.350.000,00
44	Kelurahan Wates	99.470.000,00	116.535.400,00
45	Inspektorat	126.844.670,00	126.844.670,00
46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	320.470.452,00	221.364.433,34
47	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.267.324.758,00	2.164.272.580,00



No.	OPD	2018 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
48	PPKD	2.964.349.450,00	2.821.289.450,00
49	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	86.515.362,50	180.415.200,00
50	Badan Penelitian dan Pengembangan	110.360.350,00	159.961.200,00
	JUMLAH ASET LAIN-LAIN	85.227.289.851,71	63.225.375.526,11

Penambahan aset lain-lain diantaranya yaitu :

- a. RSUD sebesar Rp2.075.756.476,29 yang berupa aset tetap gedung bangunan, bangunan air kotor dan tanaman yang direklas ke aset lain-lain karena sudah dibongkar dan siap untuk dihapus dari daftar barang milik daerah.
- b. Dinas Perhubungan Rp25.143.207.042,00 berupa aset tanah, peralatan mesin, bangunan gedung terminal, jalan, instalasi dan tanaman yang akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Terdapat pula penambahan dari persediaan yang direklas ke aset lain-lain karena sudah tidak digunakan lagi dengan berubahnya peraturan yang berlaku berupa plat uji dan karcis retribusi senilai Rp61.392.486,00.
- c. Sekretariat DPRD Rp2.237.518.900,00 berupa aset gedung bangunan rumah dinas yang sudah dibangun kembali sehingga direklas ke aset lain-lain dan siap untuk dihapus dari daftar barang milik daerah.
- d. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Rp1.641.268.500,00 berupa aset peralatan mesin dengan kondisi rusak berat direklas ke aset lain-lain.
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp576.273.908,11 berupa peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat direklas ke aset lain-lain.
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa persediaan bedgesting pre cast tribun stadion madya direklas ke aset lain-lain Rp207.476.221,00. Kemudian hasil dari pengecekan oleh BPK pada saat pemeriksaan terinci terdapat udith dan plat beton untuk dicatat di aset lain-lain sebesar Rp15.171.000,00.
- g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp159.416.986,00 merupakan piutang PBB yang sudah diverifikasi direklas ke aset lain-lain dan siap untuk dihapuskan, beserta Rp492.919.972,00 berupa aset peralatan dan mesin yang rusak berat direklas ke aset lain-lain.

Penghapusan Aset Lain-Lain Intra sebesar Rp13.631.927.308,30 diantaranya yaitu :

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan :
 - penghapusan barang milik daerah sebesar Rp943.600.000,00 berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/802/440 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang penghapusan barang milik daerah berupa Bangunan Pasar Gotong Royong dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Unit Pelaksana Teknis Pasar Gotong Royong pada



Pengguna Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Magelang tahun 2018, yang seharusnya sudah dihapus sejak terjualnya hasil bongkaran material atas bangunan pasar tersebut, tetapi dokumen penjualan baru ditemukan tahun 2018 sehingga baru dihapuskan dari daftar Barang Milik Daerah di tahun 2018.

- UPTD Cacaban Rp5.671.571,00 dan UPT Pasar Rejowinangun sebesar Rp6.770.765,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/697/440 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang penghapusan barang milik daerah berupa Peralatan dan Mesin Rusak Berat dari Daftar Barang Kuasa Pengguna UPTD Pasar Cacaban dan UPTD Pasar Rejowinangun pada Pengguna Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun 2018;
- b. PPKD sebesar Rp144.000.000,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 032 / 126 / 112 Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan kios Sub Terminal Sambung dari daftar barang pengelola Kota Magelang tahun 2018 karena bangunannya sudah dibongkar;
- c. RSUD Tidar Magelang sebesar Rp5.617.383.923,000 sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030 / 699 / 440 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin yang kondisinya Rusak Berat dari daftar Barang Pengguna pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2018;
- d. Penghapusan aset lain-lain di beberapa OPD berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik daerah Nomor 032 / 630 / 440 Tahun 2018 Tanggal 28 November 2018 tentang Penghapusan barang milik daerah yang kondisinya rusak berat pada perangkat daerah se-kota magelang tahun 2018 dan terdapat aset senilai Rp4.135.567.726,36;
- e. Kecamatan Magelang Utara sebesar Rp53.582.000,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030 / 321 / 440 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Atap Aula dari Daftar Barang Pengguna pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang tahun 2018;
- f. Dinas Kesehatan sebesar Rp332.054.843,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 032 / 407 / 440 Tahun 2018 tanggal 26 September 2018 tentang Berupa Peralatan dan Mesin yang Kondisinya Rusak Berat dari Daftar Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2018;
- g. Penghapusan kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp974.050.000,00 sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 030 / 127/ 112 Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sembilan Eks



Kendaraan Dinas Operasional pada Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018

- h. RSUD Tidar sebesar Rp1.223.685.625,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030 / 635 / 112 Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Aster, Sebagian Doorlop Ruang F, Parkir Karyawan serta Taman Sekitar Aster dari Daftar Barang Pengguna pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang tahun 2018;
- i. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp97.467.600,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030 / 701 / 440 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Dari Daftar Barang Pengguna Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang tahun 2018
- j. Sekretariat Daerah sebesar Rp31.480.000,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030 / 700 / 440 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Toilet Ruang Serba Guna Dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Bagian Umum pada Pengguna Barang Sekretariat Daerah Kota Magelang tahun 2018
- k. Kecamatan Magelang Selatan pada Kelurahan Jurangombo Utara sebesar Rp47.698.000,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030 / 702 / 440 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Teralis dan Sebagian Gedung Kantor Kelurahan Jurangombo Utara Dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Kelurahan Jurangombo Utara pada Pengguna Barang Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang tahun 2018
- l. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp11.770.000,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030 / 603 / 440 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Laptop dari Daftar Barang Pengguna pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2018
- m. Kecamatan Magelang Utara pada Kelurahan Potrobangsari sebesar Rp15.250.000,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030 / 623 / 440 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda Dua dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Kelurahan Potrobangsari pada Pengguna Barang Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang tahun 2018
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp2.707.000,00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030 / 698 / 440 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kalkulator,



- Kursi Kayu, Printer LQ 300 Epson dan Kipas Angin dari Daftar Barang Pengguna Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang tahun 2018
- o. Kelurahan Tidar Utara sebesar Rp12.983.950,00 direklasifikasi ke aset lain-lain ekstrakomptable.

Penjelasan lain atas Aset lain-lain baik intracomptable maupun asset extracomptable :

1. Aset lain-lain Pemerintah Kota Magelang termasuk didalamnya Asuransi Jiwa Bakrie Program Golden Age dan Dwiguna sebesar Rp1.549.299.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Bakrie yang berkedudukan di Gedung Artha Graha Lt 16 Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 yakni perjanjian kerja sama pengelolaan program asuransi Golden Age bagi pegawai negeri sipil dan program Asuransi Dwi Guna bagi tenaga kontrak pemerintah Kota Magelang yang berlaku sejak tanggal 11 Desember 2003 sampai dengan 10 Desember 2011 yang terdaftar resmi sesuai polis Nomor 60.2003.0022, polis nomor 80.2003.0023 dan polis nomor 62.2003.2006 tercantum Pemegang polis Nama Perusahaan/Instansi Pemerintah Kota Magelang.
 - b. Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun Anggaran 2005 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Yogyakarta Nomor : 69/R/XIV.Yk/06/2006 tanggal 22 Juni 2006 dinyatakan bahwa bantuan asuransi bagi PNS dan tenaga kontrak daerah pada APBD Tahun Anggaran 2005 tidak tepat. Selanjutnya Walikota Magelang menghentikan program pembayaran asuransi atas beban APBD dengan memperhitungkan jumlah klaim asuransi yang dapat diterima Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disetor ke kas daerah.
 - c. Sebagai tindak lanjut maka pada tanggal 11 Desember 2006 telah diadakan penandatanganan Addendum I Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT Asuransi Jiwa Bakrie tentang Pengelolaan Program Asuransi Golden Age bagi Pegawai Negeri Sipil dan Program Asuransi Dwi Guna Bagi Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Magelang Nomor: ADD.120 Tahun 2005 – Nomor : ADD.PKS/633/AJB/DIR/XII/2005.
 - d. Berdasarkan Addendum I pasal 7 ayat 2 (e) disebutkan bahwa saat berakhirnya masa asuransi pada tanggal 10 Desember 2011, maka Pihak Kedua (PT Asuransi Jiwa Bakrie) dalam jangka waktu 14 hari kerja akan memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran uang pertanggungan kepada Pihak Pertama (Pemerintah Kota Magelang) dengan perhitungan $4.295 \text{ orang tertanggung} \times \text{jumlah uang pertanggungan sebesar Rp362.250,00} = \text{Rp1.556.937.500,00}$ (satu miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pembayaran klaim meninggal dunia tahun berjalan.



- e. Sebagai tindak lanjut dari Addendum I Perjanjian Kerja Sama tersebut, Pemerintah Kota Magelang telah mengirimkan surat Nomor 900/246/290 tanggal 29 Maret 2011 tentang laporan berakhirnya kerja sama Program Asuransi Golden Age dan Dwi Guna kepada PT Asuransi Jiwa Bakrie. Surat tersebut dijawab oleh Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Bakrie dengan surat Nomor S.2227/AJB/DII/IX/2011 perihal pemberitahuan berupa manfaat pembayaran klaim program asuransi Golden Age dan Dwi Guna, yang isinya bahwa klaim yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Magelang adalah sebesar Rp1.549.299.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa berakhirnya asuransi adalah tanggal 10 Desember 2011
- f. Pada tanggal 31 Oktober 2011, pemerintah Kota Magelang mengirimkan surat tanggapan kepada Dirut PT Asuransi Jiwa Bakrie dengan surat Nomor 842.3/1999/290 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan pembayaran uang pertanggungan, yang pada intinya meminta pembayaran klaim Program Asuransi Golden Age dan Dwi Guna untuk dapat ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp1.549.299.000,00. Surat tersebut dijawab oleh Dirut PT Asuransi Jiwa Bakrie dengan surat Nomor S/2264/AJB/DIR/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang menjelaskan bahwa PT Asuransi Jiwa Bakrie tidak dapat melaksanakan komitmen sesuai dengan perjanjian kerja sama yakni pembayaran klaim atas pengelolaan program asuransi Golden Age bagi pegawai negeri sipil dan program Asuransi Dwi Guna bagi tenaga kontrak pemerintah Kota Magelang dan dijadwalkan ulang pada tanggal 29 Februari 2012 .
- g. Pada tanggal 8 Februari 2012 Pemerintah Kota Magelang mengirimkan Surat Nomor 900/268/290 tentang permintaan pernyataan tertulis kepada PT Asuransi Jiwa Bakrie yang intinya meminta Pihak PT Asuransi Jiwa Bakrie untuk membuat pernyataan tertulis tentang kesanggupan membayar klaim tersebut pada tanggal 29 Februari 2012
- h. Selanjutnya, Surat Walikota Magelang nomor 900/268/290 tanggal 8 Februari 2012 ditanggapi oleh pihak PT Asuransi Jiwa Bakrie yang diwakili oleh Direktur Utama yakni Sdr. Timoer Sutanto dan Hary Prianto sebagai Direktur dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar kewajiban terhadap klaim pada tanggal 29 Februari 2012, dan surat pernyataan tersebut diterima pada tanggal 6 Maret 2012.
- i. Pihak PT Asuransi Jiwa Bakrie tidak menepati kewajibannya kepada Pemerintah Kota Magelang untuk membayar klaim Asuransi Golden Age dan Dwi Guna sesuai dengan kompensasi keterlambatan pembayaran klaim sebesar 4% pa (per tahun) dari nilai total klaim tersebut seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar kewajiban terhadap klaim pada tanggal 29 Februari 2012.



- j. Surat Aduan keempat dari Walikota Magelang Nomor 900/814/440 tanggal 28 September 2017 kepada Ketua Dewan Komisiner OJK. Selanjutnya dari Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK aduan diteruskan ke Pihak Asuransi Jiwa Bakrie untuk mendapatkan tanggapan penyelesaian atas permasalahan ini.
- k. Pihak PT Asuransi Jiwa Bakrie menjawab Surat Aduan dari Pemerintah Kota Magelang melalui jawaban surat nomor: S.5512/DIR/AJB/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal menindaklanjuti pengaduan Walikota Magelang terkait Klaim Asuransi Golden Age dan Dwiguna yang pada intinya Pihak PT Asuransi Jiwa Bakrie menawarkan penggantian kewajiban atas klaim pemerintah kota Magelang dengan saham Bakrie and Brothers (BNBR) sejumlah 30.985.980 lembar saham @Rp50,-
- l. Sampai akhir tahun 2018 PT Asuransi Jiwa Bakrie telah mentransfer uang pertanggungan ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp960.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Tanggal 13 September 2018 | Rp100.000.000,00 |
| 2. Tanggal 01 Nopember 2018 | Rp100.000.000,00 |
| 3. Tanggal 09 Nopember 2018 | Rp280.000.000,00 |
| 4. Tanggal 04 Desember 2018 | Rp480.000.000,00 |
| Jumlah Total Setoran 2018 | Rp960.000.000,00 |

5.3.2. KEWAJIBAN

2018 (Rp)	2017 (Rp)
2.062.128.961,00	1.768.768.797,17

Kewajiban per 31 Desember 2018 terdiri dari :

5.3.2.a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.062.128.961,00, terdapat kenaikan sebesar Rp293.360.163,83 dibandingkan dengan tahun 2017. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.127 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	107.649.002,00	0,00	97.114.938,00	10.534.064,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	826.448.167,17	646.008.936,00	826.448.167,17	646.008.936,00
3	Utang Beban	768.961.561,00	1.387.999.461,00	768.961.561,00	1.387.999.461,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	65.710.067,00	17.586.500,00	65.710.067,00	17.586.500,00
	Jumlah	1.768.768.797,17	2.051.594.897,00	1.758.234.733,17	2.062.128.961,00



5.3.2.a. 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.534.064,00 merupakan utang pemerintah Kota Magelang kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.128 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2018

No	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Nilai (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PPN (DPU)	7.457.082,00	Utang pajak dari PB. Gotong Royong dari pihak ketiga yang belum dibayar sejak tahun 2015
2	PPN (DPU)	1.081.818,00	Utang pajak dari CV. Trihita Karana dari pihak ketiga yang belum dibayar sejak tahun 2015
3	PPH 23 (DPU)	1.562.437,00	Utang pajak dari PB. Gotong Royong dari pihak ketiga yang belum dibayar sejak tahun 2015
4	PPH 23 (DPU)	432.727,00	Utang pajak dari CV. Trihita Karana dari pihak ketiga yang belum dibayar sejak tahun 2015
	Jumlah	10.534.064,00	

5.3.2.a. 2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pengertian dari pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima tetapi belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah karena pendapatan tersebut masih untuk 1 periode atau beberapa periode yang akan datang. Rincian dari pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut :

Tabel 5.129 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1	DLH	594.696.304,17	241.697.500,00	594.696.304,17	241.697.500,00
2	BPKAD	231.751.863,00	404.311.436,00	231.751.863,00	404.311.436,00
	Jumlah	826.448.167,17	646.008.936,00	826.448.167,17	646.008.936,00

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp646.008.936,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan BPKAD dengan rincian sebagai berikut :

- DLH terdapat pendapatan diterima dimuka dari retribusi pemakaman sebesar Rp241.697.500,00
- BPKAD terdapat pendapatan diterima dimuka dari pajak reklame sebesar **Rp404.311.436,00.**



5.3.2.a. 3) Utang Beban

Utang beban sebesar Rp1.387.999.461,00 timbul karena Pemerintah Kota Magelang menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut. Utang beban ini terdiri dari utang air, telpon, listrik, internet dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130 Rincian Utang Beban per 31 Desember 2018

NO.	OPD	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	107.355.097,00
2	Dinas Kesehatan	15.527.100,00
3	Puskesmas Magelang Selatan	4.935.928,00
4	Puskesmas Magelang Utara	4.717.949,00
5	Puskesmas Magelang Tengah	4.510.575,00
6	Puskesmas Jurangombo	5.769.368,00
7	Puskesmas Kerkopan	2.961.443,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar	343.613.138,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.791.780,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.745.078,00
11	Badan Perencanaan dan Pembangunan	7.223.259,00
12	Dinas Perhubungan	11.386.832,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.163.232,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	513.321.431,00
15	Dinas Sosial	2.052.061,00
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	11.896.508,00
17	Dinas Tenaga Kerja	7.492.253,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45.069.239,00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.973.225,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	2.832.956,00
21	Badan Kesatuan, Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.408.473,00
22	Sekretariat DPRD	13.574.414,00
23	Sekretarian Daerah Bagian Umum	148.011.789,00
24	Sekretarian Daerah Bagian PKP	0,00
25	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.528.559,00
26	Kecamatan Magelang Utara	3.267.358,00
27	Kecamatan Magelang Selatan	3.897.841,00
28	Kecamatan Magelang Tengah	5.315.619,00
29	Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.400.727,00
30	Kelurahan Magersari	1.645.396,00
31	Kelurahan Jurangombo Utara	1.445.585,00
32	Kelurahan Jurangombo Selatan	1.358.523,00
33	Kelurahan Tidar Utara	1.796.850,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO.	OPD	JUMLAH (Rp)
34	Kelurahan Tidar Selatan	1.151.008,00
35	Kelurahan Wates	977.174,00
36	Kelurahan Potrobangsari	1.416.353,00
37	Kelurahan Kedungsari	853.916,00
38	Kelurahan Kramat Utara	761.410,00
39	Kelurahan Kramat Selatan	867.938,00
40	Kelurahan Kemirirejo	1.116.850,00
41	Kelurahan Cacaban	1.383.765,00
42	Kelurahan Rejowinangun Utara	1.704.781,00
43	Kelurahan Magelang	1.896.601,00
44	Kelurahan Panjang	1.319.304,00
45	Kelurahan Gelangan	819.357,00
46	Inspektorat	533.752,00
47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.170.500,00
48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	8.177.898,00
49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.207.868,00
50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.923.003,00
51	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.771.991,00
52	Dinas Pertanian dan Pangan	11.956.406,00
JUMLAH		1.387.999.461,00

Berikut ini uraian Utang Beban Tahun 2018 :

Tabel 5.131 Rincian Utang Beban per 31 Desember 2018

No	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Utang Listrik	998.784.679,00
2	Utang Air	156.398.580,00
3	Utang Telepon	29.836.171,00
4	Utang Internet	80.177.631,00
5	Utang Obat-obatan	108.002.400,00
6	Utang Pegawai BLUD	14.800.000,00
JUMLAH		1.387.999.461,00

5.3.2.a. 4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.586.500,00, nilai utang jangka pendek lainnya tersebut diantaranya kegiatan prolanis pada Puskesmas Magelang Utara sebesar Rp1.740.000,00 dan protesa gigi pada Puskesmas Magelang Utara sebesar Rp2.359.000,00, kegiatan prolanis pada Puskesmas Kerkopan sebesar Rp587.500,00, utang jasa dokter jaga pada RSUD Tidar sebesar Rp12.900.000,00.



Tabel 5.132 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018

No	OPD	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Puskesmas Kerkopan	587.500,00
2	Puskesmas Magelang Utara	4.099.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	12.900.000,00
	JUMLAH	17.586.500,00

5.3.3. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.863.338.967.603,41 dengan rincian sebagai berikut :

-	Ekuitas Awal	Rp 3.577.441.141.332,80
-	Surplus/Defisit LO	Rp 110.971.272.279,78
-	Penyesuaian/Mutasi	Rp 174.926.553.990,84
	Penambahan dan Pengurangan	
-	Ekuitas Akhir	Rp 3.863.338.967.603,41



5.4. PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2018. Struktur Laporan Operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN - LO	XXXX
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	XXXX
PENDAPATAN TRANSFER - LO	XXXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	XXXX
BEBAN	XXXX
BEBAN PEGAWAI	XXXX
BEBAN PERSEDIAAN	XXXX
BEBAN JASA	XXXX
BEBAN PEMELIHARAAN	XXXX
BEBAN PERJALANAN DINAS	XXXX
BEBAN HIBAH	XXXX
BEBAN BANTUAN SOSIAL	XXXX
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	XXXX
BEBAN LAIN-LAIN	XXXX
BEBAN TRANSFER	XXXX
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	XXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXXX
SURPLUS PENJUALAN ASET NON LANCAR - LO	XXXX
SURPLUS DARI KEG. OPERASIONAL LAINNYA - LO	XXXX
DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR - LO	XXXX
DEFISIT DARI KEG. OPERASIONAL LAINNYA - LO	XXXX
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEG NON OPERASIONAL	XXXX
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	XXXX
POS LUAR BIASA	XXXX
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	XXXX
BEBAN LUAR BIASA	XXXX
SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	XXXX
SURPLUS/ DEFISIT - LO	XXXX



Laporan Operasional Tahun 2018 disajikan dengan perbandingan Laporan Operasional tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Kota Magelang adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp920.672.473.991,31** meningkat sebesar Rp16.993.519.054,96 atau naik 1,88% dibandingkan tahun 2017 sebesar **Rp903.678.954.936,35** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133 Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2018 dan 2017

No	Pendapatan – LO	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	PAD – LO	252.195.775.555,31	228.195.033.748,35	24.000.741.806,96
2	Pendapatan Transfer – LO	641.416.360.730,00	652.227.026.858,00	(10.810.666.128,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	27.060.337.706,00	23.256.894.330,00	3.803.443.376,00
	Jumlah	920.672.473.991,31	903.678.954.936,35	16.993.519.054,96

5.4.1.a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional Kota Magelang periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 terealisasi sebesar **Rp252.195.775.555,31** meningkat sebesar Rp24.000.741.806,96 atau 10,52% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar **Rp228.195.033.748,35** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 134 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1)	Pajak Daerah – LO	34.567.922.597,00	31.232.410.736,00	3.335.511.861,00
	a. Pajak Hotel	3.867.045.264,00	3.304.979.480,00	562.065.784,00
	b. Pajak Restoran	4.354.866.624,00	3.388.469.448,00	966.397.176,00
	c. Pajak Hiburan	3.146.201.358,00	1.886.016.938,00	1.260.184.420,00
	d. Pajak Reklame	912.170.120,00	906.930.725,00	5.239.395,00
	e. Pajak Penerangan Jalan	8.777.965.767,00	8.189.824.792,00	588.140.975,00
	f. Pajak Parkir	167.276.733,00	207.502.220,00	(40.225.487,00)
	g. Pajak Air Tanah	362.756.400,00	338.391.300,00	24.365.100,00
	h. Pajak Sarang Burung Walet	10.925.000,00	10.925.000,00	0
	i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.471.340.024,00	6.257.673.488,00	213.666.536,00
	j. BPHTB	6.497.375.307,00	6.741.697.345,00	(244.322.038,00)
2)	Retribusi Daerah – LO	5.995.330.783,17	6.073.906.418,46	(78.575.635,29)
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	543.570.000,00	486.829.000,00	56.741.000,00
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	321.832.600,00	326.865.600,00	(5.033.000,00)
	c. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	534.164.854,17	62.838.895,83	471.325.958,34
	d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	669.970.000,00	654.850.000,00	15.120.000,00
	e. Retribusi Pelayanan Pasar	1.738.809.925,00	1.576.138.050,00	162.671.875,00



No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	418.622.500,00	388.045.500,00	30.577.000,00
	g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.245.000,00	7.520.000,00	2.725.000,00
	h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	31.350.000,00	24.890.000,00	6.460.000,00
	i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.660.854,00	0,00	38.660.854,00
	j. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.845.000,00	609.040.120,00	(583.195.120,00)
	k. Retribusi Terminal	0	0,00	0
	l. Retribusi Tempat Khusus Parkir	230.760.000,00	229.560.000,00	1.200.000,00
	m. Retribusi Rumah Potong Hewan	110.290.000,00	96.345.000,00	13.945.000,00
	n. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	292.896.000,00	241.598.000,00	51.298.000,00
	o. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	878.746.000,00	916.262.000,00	(37.516.000,00)
	p. Retribusi Izin Gangguan	60.531.450,00	444.929.252,63	(384.397.802,63)
	q. Retribusi Izin Trayek	8.050.000,00	8.195.000,00	(145.000,00)
	r. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol	15.000.000,00	0	15.000.000,00
	s. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	65.986.600,00	0	65.986.600,00
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	13.493.406.635,14	7.711.404.121,00	5.782.002.514,14
	a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan	13.493.406.635,14	7.710.904.121,00	5.782.502.514,14
	b. Bagian laba atas penyertaan modal pada koperasi	0,00	0,00	0
	c. Bagian laba atas penyertaan modal pada pengusaha kecil menengah	0,00	500.000,00	(500.000,00)
4)	Lain Lain PAD yang Sah – LO	198.139.115.540,00	183.177.312.472,89	14.961.803.067,11
	a. Hasil penjualan peralatan mesin	311.110.198,00	31.200.000,00	279.910.198,00
	b. Hasil penjualan aset tetap lainnya	99.050.000,00	89.135.000,00	9.915.000,00
	c. Jasa giro	8.638.846.757,00	8.610.446.017,00	28.400.740,00
	d. Pendapatan bunga deposito	613.424.655,00	1.636.609.788,89	(1.023.185.133,89)
	e. Tuntutan ganti kerugian daerah	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
	f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum	0,00	0,00	0,00
	g. Pendapatan denda pajak	159.789.242,00	225.991.584,00	(66.202.342,00)
	h. Pendapatan denda retribusi	11.043.810,00	10.339.600,00	704.210,00
	i. Pendapatan dari pengembalian	0,00	0,00	0
	j. Pendapatan sewa aset daerah	0,00	479.235,00	(479.235,00)
	k. Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa	1.289.612.585,00	431.459.685,00	858.152.900,00
	l. Pendapatan BLUD	183.386.804.798,00	170.303.590.814,00	13.083.213.984,00
	m. Lain-lain PAD yang sah lainnya	58.204.064,00	0	58.204.064,00
	m. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah lainnya	3.571.229.431,00	1.835.060.749,00	1.736.168.682,00
	Jumlah	252.195.775.555,31	228.195.033.748,35	24.000.741.806,96

**5.4.1.b. Pendapatan Transfer - LO**

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun realisasi Pendapatan Transfer yang diterima Kota Magelang untuk periode TA 2018 sebesar Rp641.416.360.730,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.810.666.128,00 atau 1,66% dibandingkan dengan TA 2017 yang terealisasi sebesar Rp652.227.026.858,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.135 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1)	Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan – LO	570.455.641.253,00	553.630.731.358,00
	a. Bagi hasil pajak	23.082.924.075,00	23.233.937.205,00
	b. Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam	1.340.170.369,00	1.617.366.830,00
	c. Dana Alokasi Umum	440.041.244.000,00	440.041.244.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus	105.991.302.809,00	88.738.183.323,00
2)	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	18.250.000.000,00	47.039.466.000,00
	Dana penyesuaian (tunj sertifikasi guru dan tambahan penghasilan guru SD	18.250.000.000,00	47.039.466.000,00
3)	Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya – LO	48.794.429.477,00	41.855.667.000,00
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	48.794.429.477,00	41.855.667.000,00
4)	Bantuan Keuangan – LO	3.916.290.000,00	9.701.162.500,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	3.916.290.000,00	9.701.162.500,00
	Jumlah	641.416.360.730,00	652.227.026.858,00

5.4.1.c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Kota Magelang adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 terealisasi sebesar **Rp27.060.337.706,00** meningkat sebesar Rp3.803.443.376,00 atau naik 16,35% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar **Rp23.256.894.330,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136 Realisasi Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1)	Pendapatan Hibah – LO	26.346.423.781,00	23.050.892.937,00	3.295.530.844,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO	26.346.423.781,00	23.050.892.937,00	3.295.530.844,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/organisasi Swasta	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan-LO	0,00	0,00	0,00
2)	Pendapatan Lainnya – LO	713.913.925,00	206.001.393,00	507.912.532,00
	Pendapatan Lainnya-LO	713.913.925,00	206.001.393,00	507.912.532,00
	Jumlah	27.060.337.706,00	23.256.894.330,00	3.803.443.376,00



Rincian Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp26.346.423.781,00 terdiri dari :

- 1) Penerimaan Dana BOS Tahun 2018 oleh Dinas Pendidikan (sekolah-sekolah) sebesar Rp16.596.872.725,00;
- 2) Hibah Dari Kementerian PUPR senilai Rp6.341.281.484,00;
- 3) Hibah dari Pemerintah untuk sarana air minum senilai Rp1.491.000.000,00;
- 4) Hibah Dari Pemerintah Provinsi senilai Rp890.358.572,00;
- 5) Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke SMPN 9 senilai Rp90.000.000,00; dan
- 6) Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke SMPN 1 senilai Rp936.911.000,00.

Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2018 sebesar Rp713.913.925,00 merupakan pendapatan dari kompensasi pajak PPh 21 gaji yang disebabkan karena adanya peraturan baru pada Tahun 2015 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dan PMK 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada Tahun 2016 terdapat kelebihan pajak yang sudah terlanjur disetor ke Kas Negara, dan kelebihan setor tersebut telah dikompensasikan ke dalam PPh 21 mulai Tahun 2017.

5.4.2. Beban - LO

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, pada prinsipnya pengelompokan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp809.701.201.711,53** meningkat sebesar Rp54.214.642.424,40 atau meningkat 7,18% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar **Rp755.486.559.287,13**.

Beban-LO terdiri dari Beban Operasi sebesar **Rp809.040.499.411,53** dan Beban Transfer sebesar **Rp660.702.300,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137 Realisasi Beban Operasi Tahun 2018 dan 2017

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
a	Beban Pegawai	317.708.621.090,00	321.794.027.524,00	(4.085.406.434,00)
b	Beban Persediaan	90.174.960.885,08	77.662.303.525,54	12.512.657.359,54
c	Beban Jasa	205.116.125.826,00	179.894.701.358,00	25.221.424.468,00
d	Beban Pemeliharaan	29.380.926.698,00	26.693.340.922,00	2.687.585.776,00
e	Beban Perjalanan Dinas	32.003.626.124,00	28.299.063.037,00	3.704.563.087,00
f	Beban Hibah	10.447.285.378,00	8.385.895.620,00	2.061.389.758,00
g	Beban Bantuan Sosial	6.698.273.000,00	4.962.870.000,00	1.735.403.000,00
h	Beban Penyusutan dan Amortisasi	116.308.942.026,35	104.866.354.794,19	11.442.587.232,16
i	Beban Lain-lain	1.201.738.384,10	2.367.300.206,40	(1.165.561.822,30)



No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
j	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	0	100.000.000,00
k	Beban Transfer Bantuan Keuangan	560.702.300,00	560.702.300,00	0
	Jumlah	809.701.201.711,53	755.486.559.287,13	54.214.642.424,40

Berikut uraian Beban Operasi selama tahun 2018:

5.4.2.a. Beban Pegawai

Beban pegawai Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp317.708.621.090,00,00 turun sebesar Rp4.085.406.434,00 atau 1,27% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp321.794.027.524,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	226.684.236.223,00	234.441.235.209,00	(7.756.998.986,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	29.691.170.000,00	31.307.670.000,00	(1.616.500.000,00)
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.527.000.000,00	2.926.800.000,00	1.600.200.000,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.360.992.978,00	1.394.699.275,00	(33.706.297,00)
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	185.185.716,00	191.540.347,00	(6.354.631,00)
6	Beban Uang Lembur	3.034.242.300,00	2.712.038.650,00	322.203.650,00
7	Beban Pegawai BOS	1.419.764.028,00	1.542.564.700,00	(122.800.672)
8	Beban Honorarium	39.233.558.845,00	36.472.912.843,00	2.760.646.002,00
9	Beban Pegawai Rumah Sakit	11.572.471.000,00	10.804.566.500,00	767.904.500,00
	Jumlah	317.708.621.090,00	321.794.027.524,00	(4.085.406.434,00)

5.4.2.b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp90.174.960.885,08 meningkat sebesar Rp12.512.657.359,54 atau naik 16,11% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp77.662.303.525,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	20.023.154.903,95	15.692.146.318,96	4.331.008.584,99
2	Beban Persediaan Bahan/Material	70.151.805.981,13	61.972.335.206,58	8.179.470.774,55
3	Beban Barang Untuk Diserahkan kpd masyarakat	0,00	0,00	0,00
4	Beban Persediaan RSUD	0,00	0,00	0,00
5	Beban Persediaan Puskesmas	0,00	0,00	0,00
6	Beban Persediaan Lain - lain	0,00	(2.178.000,00)	2.178.000,00
	Jumlah	90.174.960.885,08	77.662.303.525,54	12.512.657.359,54

5.4.2.c. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp205.116.125.826,00 naik sebesar Rp25.221.424.468,00 atau 14,02% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp179.894.701.358,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.140 Realisasi Beban Jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	136.897.864.154,00	111.158.731.454,00	25.739.132.700,00
2	Beban Premi Asuransi	6.868.725.032,00	8.045.914.383,00	(1.177.189.351,00)
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4	Beban Cetak dan Penggandaan	5.618.522.515,00	3.814.211.702,00	1.804.310.813,00
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang	1.203.423.150,00	997.058.000,00	206.365.150,00
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	880.441.000,00	712.995.000,00	167.446.000,00
7	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.711.571.340,00	1.704.658.470,00	1.006.912.870,00
8	Beban Makanan dan Minuman	25.192.913.902,00	17.859.372.125,00	7.333.541.777,00
9	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.571.873.400,00	1.664.606.575,00	(92.733.175)
10	Beban Pakaian Kerja	578.907.250,00	501.530.550,00	77.376.700
11	Beban Pakaian Khusus dan Hari2 Tertentu	1.635.155.500,00	1.186.853.000,00	448.302.500,00
12	Beban Jasa Konsultasi	4.715.364.600,00	6.143.251.205,00	(1.427.886.605,00)
13	Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)
15	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.064.566.258,00	1.351.194.189,00	713.372.069,00
16	Beban Honorarium PNS	3.900.000,00	8.300.000,00	(4.400.000,00)
17	Beban Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
18	Beban Uang Untuk Diberikan Pihak Ketiga	2.253.742.400,00	1.668.245.000,00	585.497.400,00
19	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00
20	Beban Yang Bersumber Dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00
21	Beban Jasa Tenaga Ahli Instruktur/Nara Sumber	7.144.333.352,00	4.688.459.076,00	2.455.874.276,00
22	Beban Ijin Operasional	23.698.541,00	61.992.817,00	(38.294.276,00)
23	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	1.229.269.450,00	1.968.304.876,00	(739.035.426,00)
24	Beban Pengembangan Sekolah	2.231.656.530,00	2.010.974.400,00	220.682.130,00
25	Beban Peralatan dan Perlengkapan	2.218.400.452,00	810.993.600,00	1.407.406.852,00
26	Beban Promosi	71.797.000,00	81.950.245,00	(10.153.245)
27	Beban Honor Pengelolaan Keuangan BLUD	0,00	0,00	0,00
28	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	13.395.104.691,00	(13.395.104.691,00)
	Jumlah	205.116.125.826,00	179.894.701.358,00	25.221.424.468,00

5.4.2.d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2018 terealisasi sebesar **Rp29.380.926.698,00** meningkat sebesar Rp2.687.585.776,00 atau 10,07% dari realisasi tahun 2017 **Rp26.693.340.922,00** dan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.141 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	8.208.802.646,00	6.658.820.041,00	1.549.982.605,00
2	Beban Pemeliharaan	21.172.124.052,00	20.034.520.881,00	1.137.603.171,00
3	Beban Pemeliharaan RSUD	0,00	0,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Puskesmas	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	29.380.926.698,00	26.693.340.922,00	2.687.585.776,00

**5.4.2.e. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar **Rp32.003.626.124,00** meningkat sebesar Rp3.704.563.087,00 atau 13,09% dari realisasi tahun 2017 sebesar **Rp28.299.063.037,00** dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.142 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.818.300,00	10.425.000,00	88.393.300,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.525.309.417,00	27.801.018.251,00	3.724.291.166,00
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	228.261.829,00	(228.261.829,00)
4	Beban Perjalanan Dinas BLUD	379.498.407,00	259.357.957,00	120.140.450,00
	Jumlah	32.003.626.124,00	28.299.063.037,00	3.704.563.087,00

5.4.2.f. Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2018 terealisasi sebesar **Rp10.447.285.378,00** mengalami peningkatan sebesar Rp2.061.389.758,00 atau meningkat 24,58% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp8.385.895.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.143 Realisasi Beban Hibah Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Hibah kepada Organisasi Masyarakat	2.602.029.378,00	1.413.259.010,00	1.188.770.368,00
2	Hibah kepada Sekolah	7.845.256.000,00	6.972.636.610,00	872.619.390,00
	Jumlah	10.447.285.378,00	8.385.895.620,00	2.061.389.758,00

5.4.2.g. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2018 terealisasi sebesar **Rp6.698.273.000,00** meningkat sebesar Rp1.735.403.000,00 atau naik 34,97% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp4.962.870.000,00. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 5.144 Realisasi Beban Bansos Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial kepada masyarakat	6.227.273.000,00	4.492.870.000,00	1.734.403.000,00
2	Beban bantuan Sosial yang tidak direncanakan	471.000.000,00	470.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah	6.698.273.000,00	4.962.870.000,00	1.735.403.000,00

5.4.2.h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud tahun 2018 yang perhitungannya dilakukan secara tahunan dimulai sejak tanggal perolehan berdasarkan dokumen. Untuk tahun 2018 terealisasi sebesar Rp116.308.942.026,35 atau meningkat sebesar Rp11.442.587.232,16 atau 10,91% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp104.866.354.794,19 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.145 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2018 dan Tahun 2017**

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	67.621.084.846,02	62.817.038.975,32	4.804.045.870,70
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.326.172.362,54	14.799.014.733,27	(472.842.370,73)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.353.044.140,85	26.610.877.189,67	6.742.166.951,18
4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.008.012.726,94	639.423.895,93	368.588.831,01
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	627.950,00	0,00	627.950,00
6	Beban Aset Tetap RSUD Tidar	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	116.308.942.026,35	104.866.354.794,19	11.442.587.232,16

5.4.2.i. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain tahun 2018 terealisasi sebesar Rp1.201.738.384,10 terdiri dari

Tabel 5.146 Beban Lain-lain Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	450.242.624,60	685.380.228,10	(235.137.603,50)
2	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	450.541.592,75	1.674.704.978,30	(1.224.163.385,55)
3	Beban Penyisihan Piutang Koperasi Perindag	300.379.166,75	6.500.000,00	293.879.166,75
4	Beban Lain - lain	575.000,00	715.000,00	(140.000,00)
	Jumlah	1.201.738.384,10	2.367.300.206,40	(1.165.561.822,30)

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp900.784.217,35 terdiri dari:

1. Beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp450.242.624,60
2. Beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp450.541.592,75

Beban Penyisihan Piutang lainnya sebesar Rp300.379.166,75 merupakan penyisihan piutang koperasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Beban lain-lain sebesar Rp575.000,00 merupakan beban di puskesmas yang tidak tertampung di rekening beban yang ada.

5.4.2.j. Beban Transfer

Beban Transfer terdiri dari :

- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya sebesar Rp100.000.000,00

**Tabel 5.147 Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya
Tahun 2018**

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	100.000.000,00	0,00
	Jumlah	100.000.000,00	0,00

- Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp560.702.300,00

**Tabel 5.148 Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Tahun 2018**

No	Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	560.702.300,00	560.702.300,00
	Jumlah	560.702.300,00	560.702.300,00



5.4.3. Kegiatan Non Operasional

Pada tahun 2018 tidak terdapat adanya aktivitas Non Operasional yang bersifat menambah Surplus Non Operasional - LO.

5.4.4. Surplus Defisit Non Operasional

Surplus Defisit Non Operasional tahun 2018 sebesar Rp0,00.

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00

b. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp0,00

5.4.5. Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2018 sebesar **Rp110.971.272.279,78**

5.4.6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2018 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Pos Luar Biasa tahun 2018 sebesar Rp0,00.

5.4.7. Surplus/ Defisit LO

Surplus/ Defisit LO per 31 Desember 2018 sebesar **Rp110.971.272.279,78.**



5.5. PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan BLUD Pemerintah Kota Magelang. Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris selama periode akuntansi. Penjelasan masing-masing aktivitas sebagai berikut :

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menghasilkan Arus Kas Bersih sebesar **Rp207.732.957.434,00** yang terdiri dari Arus Kas Masuk sebesar **Rp907.655.789.711,00** dan Arus Kas Keluar sebesar **Rp699.922.832.277,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp907.655.789.711,00** merupakan penerimaan Pemerintah Kota Magelang dalam Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari :

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2018	2017
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk		
1) Pendapatan Pajak Daerah	34.283.039.991,00	31.206.960.485,00
2) Pendapatan Retribusi Daerah	5.642.331.979,00	6.243.021.736,00
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.693.813.515,00	7.711.404.121,00
4) Lain-lain PAD yang Sah	200.824.542.664,00	188.275.993.014,00
5) Dana Bagi Hasil Pajak	23.082.924.075,00	25.341.079.039,00
6) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.340.170.369,00	1.344.690.250,00
7) Dana Alokasi Umum	440.041.244.000,00	440.041.244.000,00
8) Dana Alokasi Khusus	105.991.302.809,00	86.387.994.323,00
9) Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
10) Dana Penyesuaian	18.250.000.000,00	47.039.466.000,00
11) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	46.788.343.659,00	41.855.667.000,00
12) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	3.916.290.000,00	9.701.162.500,00
13) Pendapatan Hibah	18.087.872.725,00	24.050.844.059,00
14) Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
15) Pendapatan Lainnya	713.913.925,00	206.001.393,00
Jumlah Arus Masuk Kas	907.655.789.711,00	909.405.527.920,00



Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp200.824.558.343,00 terdiri dari:

No	URAIAN	REALISASI TA 2018 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	8.635.672.201,00
2	Penerimaan Bunga deposito	613.424.655,00
3	Penerimaan piutang TGR	0,00
4	Pendapatan denda Pajak	159.789.242,00
5	Pendapatan denda retribusi	11.043.810,00
6	Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah	1.173.239.285,00
7	Pendapatan BLUD	186.559.675.976,00
8	Lain-lain PAD yang sah lainnya	3.612.327.795,00
9	Penerimaan dari Perpustakaan	11.527.700,00
10	Penjualan benih ikan	47.842.000,00
	JUMLAH	200.824.542.664,00

Penerimaan Hibah tahun 2018 sebesar Rp18.087.872.725,00 terdiri dari:

- Penerimaan Hibah dari Pemerintah berupa Air Minum Rp1.491.000.000,00
- Penerimaan Hibah BOS tahun 2018 Rp16.596.872.725,00

Pendapatan Lainnya sebesar Rp713.913.925,00 merupakan pendapatan kompensasi pajak PPh 21 atas gaji pegawai selama tahun 2018.

b. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp699.922.832.277,00** merupakan pengeluaran kas untuk biaya operasional pemerintah dalam Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Keluar	2018	2017
	(Rp)	(Rp)
1) Belanja Pegawai	317.860.101.090,00	321.762.777.524,00
2) Belanja Barang	364.256.470.509,00	310.534.234.831,00
3) Bunga	0,00	0,00
4) Subsidi	0,00	0,00
5) Bantuan Hibah	10.447.285.378,00	8.385.895.620,00
6) Bantuan Sosial	6.698.273.000,00	4.962.870.000,00
7) Bantuan Keuangan	660.702.300,00	560.702.300,00
8) Belanja Tak Terduga	0,00	130.744.540,00
Jumlah Arus Keluar Kas	699.922.832.277,00	646.337.224.815,00

Dari seluruh aktivitas operasional Pemerintah Kota Magelang diperoleh Arus Kas Bersih sebesar **Rp207.732.957.434,00**.



5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi menghasilkan Arus Kas Bersih sebesar **(Rp236.989.217.995,00)** dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar **Rp433.696.198,00** dengan rincian sebagai berikut :

Arus Kas Masuk	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1) Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	311.110.198,00	31.200.000,00
2) Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	75.100.000,00	64.300.000,00
3) Penerimaan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	47.486.000,00	24.835.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	433.696.198,00	120.335.000,00

b. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar **Rp237.422.914.193,00** dipergunakan untuk :

Arus Kas Keluar	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1) Belanja Tanah	15.078.648.890,00	1.476.985.650,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	50.034.279.487,00	83.695.014.076,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	100.030.943.779,00	91.298.298.210,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.172.294.944,00	53.058.480.055,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	662.032.988,00	2.625.453.018,00
6) Belanja Aset Lainnya	1.444.714.105,00	916.725.623,00
Jumlah Arus Keluar Kas	237.422.914.193,00	233.070.956.632,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Defisit sebesar **(Rp236.989.217.995,00)**.

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar **(Rp17.327.704.001,00)** terdiri dari Arus Kas Masuk sebesar **Rp3.735.069.999,00** dan Arus Kas Keluar sebesar **Rp21.062.774.000,00** dengan penjelasan sebagai berikut :



a. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari aktivitas pendanaan sebesar **Rp3.735.069.999,00** dengan perincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	<u>2018</u> <u>(Rp)</u>	<u>2017</u> <u>(Rp)</u>
1) Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
3) Penerimaan Kembali Dana Bergulir	7.069.999,00	47.840.451,00
4) Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
5) Penerimaan hasil penarikan (AMU Bank Jateng)	3.728.000.000,00	2.650.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	<u>3.735.069.999,00</u>	<u>2.697.840.451,00</u>

b. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari aktivitas pendanaan sebesar **Rp21.062.774.000,00** dipergunakan untuk :

Arus Keluar Kas	<u>2018</u> <u>(Rp)</u>	<u>2017</u> <u>(Rp)</u>
1) Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000,00	14.167.657.000,00
3) Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	<u>21.062.774.000,00</u>	<u>14.167.657.000,00</u>

Penyertaan Modal sebesar **Rp21.062.774.000,00** terdiri dari :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Bank Jateng	8.500.000.000,00
2	Bank Magelang	3.000.000.000,00
3	BKK Magelang	500.000.000,00
4	PDAM	6.562.774.000,00
5	PDOW Taman Kyai Langgeng	2.500.000.000,00
		21.062.774.000,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar **(Rp17.327.704.001,00)**.

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah Arus Kas yang berasal dari transaksi di luar APBD Tahun berkenaan sebesar **(Rp113.476.112,00)** terdiri dari Arus Kas Masuk sebesar **Rp20.952.219.287,00** dan Arus Kas Keluar sebesar **Rp21.065.695.399,00** dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar **Rp20.952.219.287,00** terdiri dari :



- 1) Penerimaan Penyetoran kembali sisa UUDP (UP) Tahun 2018 adalah sebesar Rp0,00
- 2) Perhitungan Pihak Ketiga sebesar **Rp20.947.333.897,00** yang terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPH 21 dan Askes dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA	JUMLAH (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	13.351.103.116,00
2	Iuran Taperum	253.564.000,00
3	PPH 21	1.856.143.519,00
4	Asuransi kesehatan	4.035.650.285,00
5	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	295.421.027,00
6	Jaminan Kematian (JKM)	1.155.451.950,00
	JUMLAH	20.947.333.897,00

- 3) Penerimaan Jasa giro dari rekening bendahara Dinas Perumahan dan Pemukiman tahun 2017 yang disetorkan ke kas daerah pada tahun 2018 sebesar Rp4.598.680,00.
- 4) Penerimaan Jasa Giro dari rekening bendahara Dinas Komunikasi dan Statistik tahun 2017 yang disetorkan ke kas daerah pada tahun 2018 sebesar Rp286.710,00.

b. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar **Rp21.065.695.399,00** terdiri dari:

- 1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga yang merupakan penyetoran atas Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPH 21 dan Askes dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebesar **Rp20.947.333.897,00** terdiri dari:

NO	URAIAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA	JUMLAH (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	13.351.103.116,00
2	Iuran Taperum	253.564.000,00
3	PPH 21	1.856.143.519,00
4	Asuransi kesehatan	4.035.650.285,00
5	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	295.421.027,00
6	Jaminan Kematian (JKM)	1.155.451.950,00
	JUMLAH	20.947.333.897,00

- 2) Terdapat pemindahbukuan dari kas daerah ke rekening SMP Muhammadiyah sebesar Rp640.000,00 yang merupakan saldo BOS yang salah masuk ke rekening Kasda yang seharusnya disetor ke Propinsi pada tahun 2017 dan sudah dipindahbukukan di tahun 2018.
- 3) Saldo kas di bendahara pengeluaran tahun 2017 sebesar Rp107.649.002,00 terdiri dari :



- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan Pemungutan / Pematangan Pajak sebesar **Rp10.534.064,00** dari Pihak Ketiga yang sampai pada akhir periode akuntansi 2018 belum disetorkan ke Kantor Pajak.
- Saldo kas di bendahara pengeluaran Dinas Perumahan dan Pemukiman sejumlah **Rp62.378.750,00** merupakan SP2D yang dipindahbukukan ke rekening bendahara pada tanggal 30 Desember 2017 tetapi sudah menjadi realisasi.
- Saldo kas di bendahara pengeluaran Kelurahan Rejo Utara Kecamatan Magelang Tengah sebesar **Rp8.015.000,00** yang merupakan SP2D yang dipindahbukukan ke rekening bendahara pada tanggal 30 Desember 2017 tetapi sudah menjadi realisasi.
- Saldo kas di bendahara pengeluaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar **Rp26.721.188,00** yang merupakan hutang Pajak terdiri dari:
 - a. PPh 21 Rp10.417.500,00
 - b. PPh 22 Rp 1.818.000,00
 - c. PPh 23 Rp 1.105.871,00
 - d. PPN Rp 13.379.817,00
- 4) Kas Lainnya pada puskesmas sebesar Rp10.072.500,00 terdiri dari Kas lainnya pada Puskesmas Kerkopan Rp7.108.000,00 dan Puskesmas Magelang Utara Rp2.964.500,00

5.5.5. Kenaikan/ Penurunan Kas

Kenaikan Kas Bersih selama periode Tahun Anggaran 2018 dari keseluruhan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Magelang sebesar **Rp46.697.440.674,00** dengan rincian sebagai berikut :

Arus Kas :

a. Dari aktivitas operasi	Rp	207.732.957.434,00
b. Dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(236.989.217.995,00)
c. Dari aktivitas pendanaan	Rp	(17.327.704.001,00)
d. Dari aktivitas transitoris	Rp	(113.476.112,00)
Jumlah	Rp	(46.697.440.674,00)



5.5.1. Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD

Saldo Awal Kas BUD dan BLUD sebesar **Rp181.106.014.439,00** yang merupakan Saldo Akhir Kas di BUD pada 31 Desember Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kas di Kasda	149.893.319.461,00
2	Kas di BOS	4.385.596.314,00
3	Kas Lainnya	10.712.500,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	107.649.002,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	89.926.584,00
6	RSUD Tidar	22.630.044.021,00
7	Puskesmas Magelang Selatan	658.550.434,00
8	Puskesmas Jurangombo	418.120.098,00
9	Puskesmas Magelang Tengah	1.308.510.035,00
10	Puskesmas Kerkopan	386.017.402,00
11	Puskesmas Magelang Utara	1.217.568.588,00
	JUMLAH	181.106.014.439,00

5.5.2. Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD

Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD pada 31 Desember 2018 sebesar **Rp134.423.794.329,00** terdiri dari :

- Saldo Akhir Kas di BUD pada 31 Desember 2018 sebesar Rp116.091.824.866,00 merupakan saldo kas pada Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2018.
- Saldo Kas di BLUD pada 31 Desember 2018 sebesar Rp15.478.181.127,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	RSUD Tidar	12.228.792.156,00
2	Puskesmas Magelang Selatan	274.153.630,00
3	Puskesmas Jurangombo	129.148.735,00
4	Puskesmas Magelang Tengah	1.505.073.539,00
5	Puskesmas Kerkopan	322.234.925,00
6	Puskesmas Magelang Utara	1.018.778.142,00
	JUMLAH	15.478.181.127,00

- Saldo Akhir Kas di BOS pada 31 Desember 2018 sebesar Rp2.838.567.772,00
- Saldo Akhir Kas Lainnya pada 31 Desember 2018 sebesar Rp4.686.500,00 terdiri dari:
 - Puskesmas Kerkopan : Rp 587.500,00
 - Puskesmas Magelang Utara : Rp4.099.000,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2018 sebesar Rp10.534.064,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan Pemungutan/Pemotongan Pajak dari Pihak Ketiga yang sampai pada akhir periode akuntansi 2018 belum disetorkan ke Kantor Pajak.



5.6. PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar **Rp3.577.441.141.332,80** merupakan ekuitas dana tahun 2018.

5.6.2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai **Rp110.971.272.279,78**.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.3.a. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan senilai Rp0,00

5.6.3.b. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap sebesar Rp0,00.

5.6.3.c. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp174.933.828.990,46 meliputi:

- 1) Saldo Awal Koreksi Ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp514.313.138.520,77.
- 2) Total penambahan Koreksi Ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp963.072.648.127,32 yang terdiri dari:
 - a) Mutasi aset antar OPD sebesar Rp123.697.325.039,77
 - b) Jurnal Balik Koreksi Ekuitas tahun 2017 di OPD pada awal tahun 2018 sebesar Rp115.529.655.712,90
 - c) SILPA pada RSUD Tidar yang disetor ke Kasda sebesar Rp22.630.044.021,00
 - d) Jasa giro Disperkim dan Diskominsta tahun 2017 yang disetor ke Kas Daerah di tahun 2018 sebesar Rp4.885.390,00
 - e) Hibah aset dari pusat sebesar Rp1.072.355.567,60
 - f) Penambahan Aset berdasarkan SK Walikota sebesar Rp127.234.438.300,47
 - g) Reklasifikasi antar aset sebesar Rp6.812.239.891,72
 - h) Penghapusan Dividen Tahun 2017 yang diterima di Tahun 2018 atas investasi permanen metode ekuitas sebesar Rp5.446.400.498,00
 - i) Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp555.673.942.355,13



- j) Koreksi Nilai Aset sebesar Rp156.597.230,59
- k) Penyesuaian atas investasi jangka panjang dengan metode Ekuitas sebesar Rp4.799.593.120,14
- l) Aset yang belum tercatat dalam neraca sebesar Rp15.171.000,00
- 3) Total pengurangan Koreksi Ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp1.302.451.957.657,63 yang terdiri dari:
 - a) Mutasi ke OPD lain sebesar Rp52.427.963.035,36.
 - b) Jurnal Balik Koreksi Ekuitas tahun 2017 sebesar Rp625.284.529.580,56
 - c) Hibah diterima PPKD kemudian diserahkan ke SMP Negeri 1 berupa bangunan gedung hibah dari Kementerian Pendidikan senilai Rp936.911.000,00, SMP Negeri 9 terima aset hibah dari Kementerian Pendidikan berupa alat peraga kesenian senilai Rp90.000.000,00 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terima aset hibah dari BMG Provinsi senilai Rp890.358.572,00 jadi total hibah yang diserahkan sebesar Rp1.917.269.572,00
 - d) Reklasifikasi Aset sebesar Rp2.403.260.815,23
 - e) Hasil Review Inspektorat sebesar Rp674.142,00 yang merupakan pengembalian kelebihan bayar karena kekurangan volume pekerjaan dari bangunan gedung Puskesmas Magelang Tengah sehingga mengurangi nilai aset bangunan gedungnya.
 - f) Koreksi Aset tetap dari *Intracomptable* ke *Extracomptable* karena nilai aset dibawah kapitalisasi sebesar Rp1.241.023.815,63
 - g) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp578.069.633.680,91
 - h) Koreksi Pengurangan Nilai Aset sebesar Rp372.168.627,14
 - i) Koreksi Perhitungan Ekuitas dengan persentasi Ekuitas BUMD sebesar Rp15.478.072.892,49
 - j) Terdapat setoran ke Kas Daerah sebesar Rp22.882.719.168,81
 - k) Penghapusan Aset sebesar Rp2.374.642.327,50

5.6.4. Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir sebesar **Rp3.863.338.967.603,41** merupakan ekuitas dana tahun 2018.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

a. Entitas Akuntansi

Sesuai Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Nama Entitas di Jajaran Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan
 - a) Puskesmas Magelang Selatan
 - b) Puskesmas Jurangombo
 - c) Puskesmas Magelang Tengah (Botton)
 - d) Puskesmas Kerkopan
 - e) Puskesmas Magelang Utara
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja
- 7) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 8) Dinas Sosial
- 9) Dinas Tenaga Kerja
- 10) Dinas Lingkungan Hidup
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 13) Dinas Perhubungan
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 16) Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
- 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 18) Dinas Pertanian dan Pangan
- 19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 20) Sekretariat Daerah
 - a) Bagian Tata Pemerintahan
 - b) Bagian Organisasi
 - c) Bagian Hukum
 - d) Bagian Perekonomian
 - e) Bagian Pembangunan
 - f) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - g) Bagian Hubungan Masyarakat
 - h) Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
 - i) Bagian Umum
- 21) Sekretariat DPRD



- 22) Kecamatan Magelang Selatan
- 23) Kecamatan Magelang Tengah
- 24) Kecamatan Magelang Utara
- 25) Inspektorat
- 26) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 27) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 28) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- 29) Badan Penelitian dan Pengembangan

b. Entitas Pelaporan

1) Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Pembangunan Kota Magelang tak lepas dari campur tangan pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola sumber – sumber potensi yang ada di Magelang. Salah satu badan yang membantu pemerintah dalam mengupayakan peningkatan pembangunan tersebut yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi serta otonomi fiskal maka daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak atau retribusi dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, menjadi tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang selaku perangkat daerah untuk membantu pemerintah Kota Magelang dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Visi BPKAD Kota Magelang yaitu :

“Terwujudnya pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel dan transparan”.

Sedangkan Misi BPKAD Kota Magelang yaitu :

- a) Mewujudkan aparatur Pengelola Keuangan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan.
- b) Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- c) Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.

2) Struktur dan Fungsi Tugas Pokok BPKAD

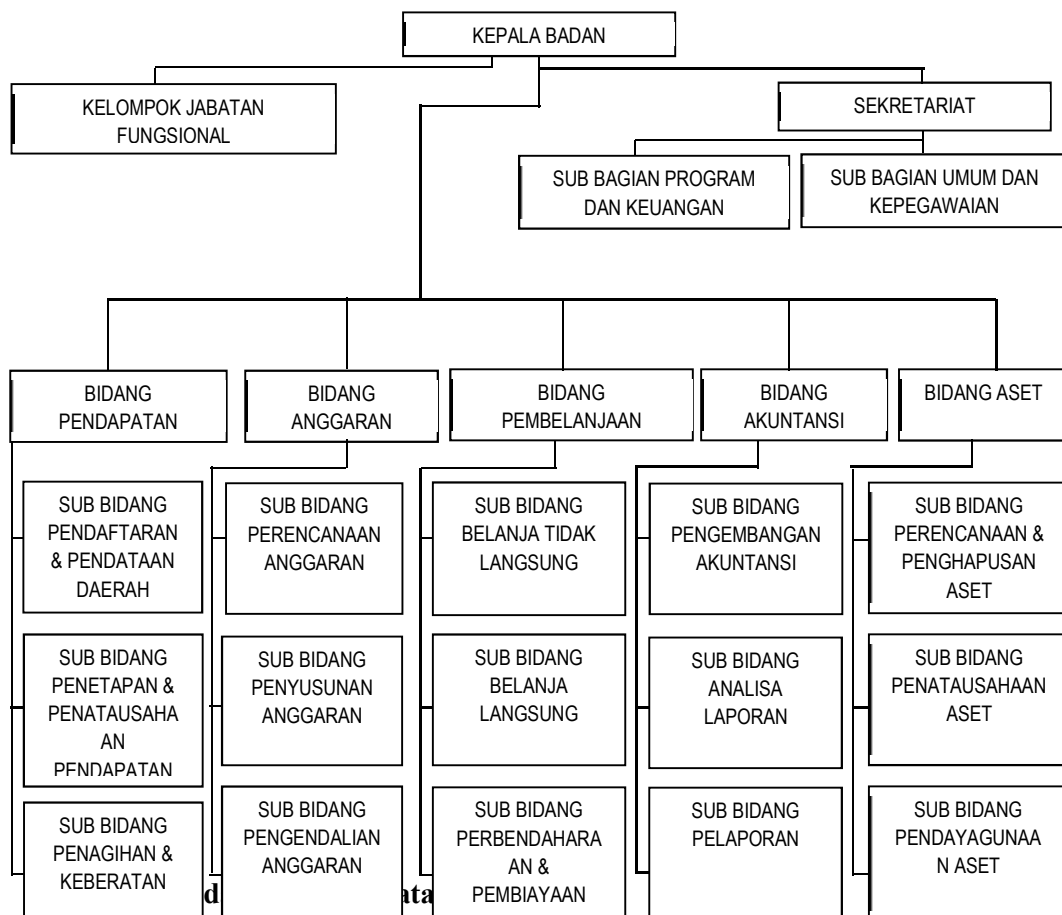
Berdasarkan Tugas Pokok dan wewenang masing-masing jabatan di BPKAD Kota Magelang dapat dijelaskan menggunakan bagan. Struktur organisasi BPKAD Kota Magelang diperlukan sebagai sarana untuk menunjang peningkatan kemampuan dan fungsi organisasi, serta



memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban sekaligus mencerminkan pembagian tugas dan wewenang dalam suatu organisasi kedinasan selanjutnya, aliran kekuasaan dan tanggung jawab bercabang dalam setiap tingkat unit kerja. Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hierarki.

Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Organisasi yang dimaksud untuk membina keharmonisan kerja, agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan penuh tanggung jawab. Sehingga rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

Gambar 6.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Magelang



Kekuasaan tertinggi terletak pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Kepala badan mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,



pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah membawahi 6 (enam) kepala sub dinas yaitu:

a) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan dinas. Sekertaris membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretariat dalam menyusun rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

(2) Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekertaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administratif kepegawaian di lingkungan dinas.

b) Kepala Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam bidang pendapatan asli daerah. Kepala pendapatan asli daerah membawahi 3 (tiga) sub bagian:

(1) Sub Bagian Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah.

Sub Bagian Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam sub bidang pendaftaran, pendataan.

(2) Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan.

Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam penetapan dan pemungutan pajak daerah, pengkoordinasian dan pengendalian retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(3) Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan.

Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam sub bidang keberatan, angsuran dan pendapatan.

c) Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam bidang anggaran dan mempunyai fungsi yaitu perencanaan penyusunan program, pengkoordinasian pelaksanaan program, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian program serta kegiatan bidang anggaran. Kepala bidang anggaran membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

(1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran.



- Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam sub bidang perencanaan anggaran,
- (2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
Sub Bidang Penyusunan Anggaran tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam sub bidang penyusunan anggaran.
- (3) Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam sub bidang pengendalian anggaran.
- d) Kepala Bidang Pembelanjaan
Kepala bidang pembelanjaan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam bidang pembelanjaan. Kepala bidang pembelanjaan membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:
- (1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembelanjaan dalam sub bidang belanja tidak langsung.
- (2) Sub bidang Belanja Langsung
Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembelanjaan dalam sub bidang belanja langsung.
- (3) Sub bidang Perbendaharaan Dan Pembiayaan
Sub Bidang Perbendaharaan Dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembelanjaan dalam sub bidang perbendaharaan dan pembiayaan.
- e) Kepala Bidang Akuntansi
Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam bidang akuntansi. Kepala bidang akuntansi membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:
- (1) Sub Bidang Pengembangan Akutansi
Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam sub bidang pengembangan akuntansi.
- (2) Sub Bidang Analisa Laporan
Sub Bidang Analisa Laporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam sub bidang analisa laporan.
- (3) Sub bidang Pelaporan
Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam sub bidang pelaporan.
- f) Kepala Bidang Aset
Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam bidang aset. Kepala Bidang Aset membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :
- (1) Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset



Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam sub bidang perencanaan dan penghapusan aset.

(2) Sub Bidang Penatausahaan Aset

Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam sub bidang penatausahaan aset.

(3) Sub Bidang Pendayagunaan Aset

Sub Bidang Pendayagunaan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam sub bidang pendayagunaan aset.

2. Kondisi Geografis Dan Jumlah Penduduk Kota Magelang

a. Letak Geografis

Perkembangan dan dinamika Kota Magelang yang pesat sebagai Kota Jasa saat ini tidak terlepas dari kondisi geografis yang ada walaupun luasnya hanya 18,12 km². Secara geografis Kota Magelang terletak pada 110o12'30" - 110o12'52" Bujur Timur dan 7o26'28" - 7o30'9" Lintang Selatan serta terletak pada posisi strategis, karena berada tepat di tengah-tengah Pulau Jawa, dan berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo, di samping berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng dan Dataran Tinggi Dieng.

Letak strategis Kota Magelang juga ditunjang dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Secara topografis Kota Magelang merupakan dataran tinggi yang berada kurang dari lebih 380 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar antara 5o - 45o, sehingga Kota Magelang merupakan wilayah yang bebas banjir dengan ditunjang keberadaan Sungai Progo di sisi barat dan Sungai Elo di sisi timur. Klimatologi Kota Magelang dikategorikan sebagai daerah beriklim basah dengan curah hujan yang cukup tinggi sebesar +7,10 mm/th.

Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
- Sebelah Timur, Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
- Sebelah Selatan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
- Sebelah Barat, Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

1) Kecamatan Magelang Utara

Luas wilayah 6.128 m², Terdiri dari 5 kelurahan yaitu:

- a) Kelurahan Potrobangsari
- b) Kelurahan Wates
- c) Kelurahan Kedungsari
- d) Kelurahan Kramat Selatan
- e) Kelurahan Kramat Utara

2) Kecamatan Magelang Tengah

Luas wilayah 5.104 m², Terdiri dari 6 kelurahan yaitu:



- a) Kelurahan Kemirirejo
 - b) Kelurahan Cacaban
 - c) Kelurahan Magelang
 - d) Kelurahan Panjang
 - e) Kelurahan Gelangan
 - f) Kelurahan Rejowinangun Utara
- 3) Kecamatan Magelang Selatan
Luas wilayah 6.888 m², Terdiri dari 6 kelurahan yaitu:
- a) Kelurahan Jurangombo Selatan
 - b) Kelurahan Jurangombo Utara
 - c) Kelurahan Magersari
 - d) Kelurahan Rejowinangun Selatan
 - e) Kelurahan Tidar Utara
 - f) Kelurahan Tidar Selatan

b. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tabel 6.1 terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2016 yaitu 132.662 jiwa. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Kota Magelang Tahun 2016

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	L	P	
Total	65.375	67.287	132.662
0 – 4	4.071	3.822	7.893
5 – 9	4.833	4.562	9.395
10 – 14	5.139	4.923	10.062
15 – 19	5.268	5.037	10.305
20 – 24	5.330	5.003	10.333
25 – 29	4.812	4.576	9.388
30 – 34	5.056	4.810	9.866
35 – 39	5.270	5.251	10.521
40 – 44	4.954	5.098	10.052
45 – 49	4.935	5.316	10.251
50 – 54	4.261	5.116	9.377
55 – 59	3.850	4.283	8.133
60 – 64	3.156	3.146	6.302
65 – 69	1.679	2.079	3.758
70 – 74	1.179	1.732	2.911
75+	1.582	2.533	4.115

Sumber : DISPENDUKCAPIL Kota Magelang

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Magelang sebesar 132.662 jiwa yang terdiri dari 65.375 jiwa penduduk laki-laki dan 67.287 jiwa penduduk perempuan. Komposisi jumlah penduduk Kota Magelang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Hal ini mengindikasikan perlunya kegiatan pemberdayaan perempuan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya perempuan serta meningkatkan kapasitas diri perempuan sebagai upaya untuk menuju pembangunan berkelanjutan.



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Magelang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Magelang,
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO